

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN KINERJA

2020





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841
e-mail : inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu informasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang terdapat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Bab I terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Target Kinerja serta Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2020 dan Bab II terkait Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah khusus akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2020 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas informasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang terdapat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang terdapat dalam Laporan ini.

Padang, Maret 2021

Plt. INSPEKTUR,

Ir. BENNI WARLIS, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19621004 198903 1 005

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu	i	
Daftar Isi	ii	
Kata Pengantar	iv	
Ikhtisar Eksekutif	vi	
Daftar Tabel	xii	
Daftar Grafik	xvii	
BAB I PENDAHULUAN	1	
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Maksud dan Tujuan	2	
1.3. Dasar hukum	2	
1.4. Kondisi Daerah Sumatera Barat	4	
1.5. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	9	
1.6. Sistematika Penulisan	18	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21	
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	21	
2.2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	25	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38	
3.1. Metodologi Pengukuran Kinerja	38	
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	39	
3.3. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	43	
Sasaran 1.1.1	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	45
Sasaran 1.2.1	Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya	53
Sasaran 2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	67
Sasaran 2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	82
Sasaran 2.1.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	94
Sasaran 3.1.1	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	106
Sasaran 3.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	118
Sasaran 4.1.1	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat	140
Sasaran 4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	147
Sasaran 4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	156

Sasaran 4.1.4	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	163
Sasaran 5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	185
Sasaran 5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	192
Sasaran 5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	198
Sasaran 5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	205
Sasaran 5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	218
Sasaran 5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	232
Sasaran 5.2.3	Menurunnya risiko bencana	238
3.4. Realisasi Anggaran		244

BAB IV PENUTUP **249**

LAMPIRAN

1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 menggambarkan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Kinerja ini didasarkan pada ketercapaian 9 indikator kinerja yang mengukur 7 tujuan dan 23 indikator kinerja yang mengukur 18 sasaran yang ditetapkan pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja tersebut memberikan informasi terkait kinerja yang dicapai di tahun 2020, hambatan/kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan serta evaluasi pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2020 sebagai dasar untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

 **GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

MAHYELDI

Tkhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 menggambarkan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Kinerja ini didasarkan pada ketercapaian 9 indikator kinerja yang mengukur 7 tujuan dan 23 indikator kinerja yang mengukur 18 sasaran yang ditetapkan pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan 5 misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Analisa terhadap 7 tujuan dan 18 sasaran strategis tersebut memberikan informasi terkait kinerja yang dicapai, hambatan/kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan serta evaluasi pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2020 sebagai dasar untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan di masa yang akan datang.

Rata-rata capaian 18 sasaran strategis berdasarkan realisasi 23 indikator kinerja adalah 81,08% termasuk kategori keberhasilan "Baik". Dari 18 sasaran strategis yang ditetapkan, sebanyak 6 sasaran strategis (33,33%) mencapai keberhasilan dengan kategori memuaskan, 10 sasaran strategis (55,55%) mencapai keberhasilan dengan kategori *sangat baik*, 1 sasaran strategis (5,56%) mencapai keberhasilan dengan kategori *cukup* dan 1 sasaran strategis (5,56%) mencapai keberhasilan dengan kategori *kurang baik*.

Sasaran strategis dengan pencapaian tertinggi adalah sasaran meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah dengan capaian sebesar 115,79%, dan sasaran strategis terendah adalah sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi daerah dengan capaian sebesar -227,42%.

Pencapaian 7 tujuan dan 18 sasaran strategis selama tahun 2020 dikelompokkan berdasarkan misi diuraikan sebagai berikut:

Misi 1 Meningkatkan Tata Kehidupan yang Harmonis, Agamis, Beradat dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Pencapaian Misi 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilihat dari pencapaian 2 tujuan yaitu “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama” dan “Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan”. Masing-masing tujuan tersebut memiliki 1 sasaran yang diukur dengan 2 indikator kinerja yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks Kerukunan	68,8	64,4	93,60
1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1 Indeks Kerukunan	68,8	64,4	93,60
2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional	47	41	87,23
2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	2.1.1 Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional	47	41	87,23
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Misi 1					90,42

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 1 yang diukur melalui pencapaian 2 indikator kinerja adalah 90,42%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Misi 2 Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Pencapaian Misi 2 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilihat dari pencapaian 1 tujuan yaitu “Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi”. Tujuan tersebut memiliki 3 sasaran strategis yang diukur dengan 5 indikator kinerja yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	71	66,79	94,07
1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.1.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		1.2.2 Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)	BB (75,89)	97,29
1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	1.2.1 Indeks Profesionalitas ASN	54	53,75	99,54
		1.2.2 Indeks e-Government	2,9	3,1	106,90
1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.3.1 Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik	84,80	90,14	106,30
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Misi 2					102,72

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 2 yang diukur melalui pencapaian 5 indikator kinerja adalah 102,72%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Misi 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berakarakter, dan Berkualitas Tinggi.

Pencapaian Misi 3 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilihat dari pencapaian 1 tujuan yaitu “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia”. Tujuan tersebut memiliki 2 sasaran strategis yang diukur dengan 3 indikator kinerja yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,13	72,39	100,36
1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	1.1.1 Harapan lama sekolah	14,86	14,01	94,28
		1.1.2 Rata-rata lama sekolah	8,85	8,92	100,79
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.2.1 Angka Harapan Hidup	69,38	69,31	99,90
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Misi 3					98,72

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 3 yang diukur melalui pencapaian 3 indikator kinerja adalah 98,72%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Misi 4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan yang Tangguh, Produktif, dan Berdaya Saing Regional dan Global, dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan Daerah.

Pencapaian Misi 4 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilihat dari pencapaian 1 tujuan yaitu "Meningkatnya Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi serta Daya Saing Daerah". Tujuan tersebut memiliki 4 sasaran strategis yang diukur dengan 5 indikator kinerja yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,88	-1,6	-27,21
		Indeks Gini	0,328	0,301	108,23
1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1.1.1 Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta)	48,19	44,03	91,37
1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	1.2.1 Persentase pertumbuhan investasi	3,83	-8,71	-227,42
1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	1.3.1 Nilai Ekspor (US\$ Juta)	1.365,81	1.531,84	112,16
1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	1.4.1 Tingkat Kemiskinan	5,83	6,56	87,48
		1.4.2 Tingkat Pengangguran	5,82	6,88	81,79
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Misi 4					15,19

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 4 yang diukur melalui pencapaian 5 indikator kinerja adalah 15,19%, termasuk kategori keberhasilan kurang baik. Hal ini dikarenakan capaian indikator kinerja misi ini sangat terdampak dengan covid 19.

Misi 5. Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Pencapaian Misi 5 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilihat dari pencapaian 2 tujuan yaitu “Meningkatkan Fungsi Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah” dan “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”. Tujuan tersebut memiliki 7 sasaran strategis yang diukur dengan 8 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap		38	44	115,79
		Rasio Elektrifikasi		99,30	99,33	100,03
1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	1.1.1	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	38	44	115,79
1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	1.2.1	Rasio Elektrifikasi	99,30	99,33	100,03
1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	1.3.1	Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air	65,37	64,20	98,21
1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	1.4.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	54	55,57	102,91

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		77,76	79,33	102,02
2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.1.1	Indeks Kualitas Air	78	75	96,15
		2.1.2	Indeks Kualitas Udara	90	90,39	100,43
2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	2.2.1	Indeks Tutupan Hutan	68,4	66,31	96,94
2.3	Menurunnya risiko bencana	2.3.1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	75	75	100
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Misi 5						101,74

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 5 yang diukur melalui pencapaian 8 indikator kinerja adalah 101,74%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	24
Tabel 2.2.	Perubahan Perjanjian Kinerja	26
Tabel 3. 1	Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	39
Tabel 3. 2	Realisasi indikator kinerja tujuan 1.1	44
Tabel 3. 3	Pencapaian Sasaran Strategis 1.1.1	46
Tabel 3. 4	Kategori Indeks Kerukunan	47
Tabel 3. 5	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Kerukunan	47
Tabel 3. 6	Realisasi indikator kinerja tujuan 1.2	52
Tabel 3. 7	Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 1.2.1	54
Tabel 3. 8	Warisan Budaya Sumatera Barat yang ditetapkan secara nasional sampai 2020	54
Tabel 3. 9	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional	56
Tabel 3. 10	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2.1	61
Tabel 3. 11	Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	62
Tabel 3. 12	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi	63
Tabel 3. 13	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.1	68
Tabel 3. 14	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	71
Tabel 3. 15	Rincian Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2020	76
Tabel 3. 16	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2019	77
Tabel 3. 17	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Nilai evaluasi SAKIP	78

Tabel 3. 18	Pemerintah Provinsi di Indonesia dengan Prediket Nilai Akuntabilitas Kinerja AA, A dan BB tahun 2019	78
Tabel 3. 19	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.2	83
Tabel 3. 20	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks profesionalitas ASN	85
Tabel 3. 21	Rincian Penilaian Indeks SPBE	90
Tabel 3. 22	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks e-government/SPBE	91
Tabel 3. 23	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.3	95
Tabel 3. 24	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 8 Organisasi Perangkat Daerah	95
Tabel 3. 25	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	96
Tabel 3. 26	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3.1	100
Tabel 3. 27	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia	102
Tabel 3. 28	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3.1.1	106
Tabel 3. 29	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah	109
Tabel 3. 30	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja rata-rata Lama Sekolah	113
Tabel 3. 31	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.2	119
Tabel 3. 32	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Angka harapan hidup	121
Tabel 3. 33	Jumlah kematian ibu tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	123
Tabel 3. 34	Jumlah kematian neonatal tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	123
Tabel 3. 35	Jumlah kematian bayi tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	124

Tabel 3. 36	Realisasi indikator kinerja tujuan 4.1	130
Tabel 3. 37	PDRB Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha atas Dasar harga konstan 2010 Tahun 2018-2020	133
Tabel 3. 38	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja laju pertumbuhan ekonomi	135
Tabel 3. 39	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks/rasio gini	138
Tabel 3. 40	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4.1.1	141
Tabel 3. 41	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja PDRB perkapita	142
Tabel 3. 42	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4.1.2	148
Tabel 3. 43	Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2020 berdasarkan sektor usaha	149
Tabel 3. 44	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Persentase pertumbuhan investasi	152
Tabel 3. 45	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4.1.3	157
Tabel 3. 46	Ekspor Non Migas Sumatera Barat Berdasarkan Beberapa Golongan Barang Tahun 2016-2020	157
Tabel 3. 47	Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	158
Tabel 3. 48	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja nilai ekspor	159
Tabel 3. 49	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4.1.4	164
Tabel 3. 50	Garis Kemiskinan Tahun 2019-2020	166
Tabel 3. 51	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja tingkat kemiskinan	167
Tabel 3. 52	Tingkat pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2019-2020	174
Tabel 3. 53	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	176
Tabel 3. 54	Dampak COVID-19 terhadap penduduk Usia Kerja menurut	176

	Jenis Kelamin dan Derah Tempat Tinggal, Agustus 2020	
Tabel 3. 55	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja tingkat pengangguran	177
Tabel 3. 56	Realisasi indikator kinerja tujuan 5.1	183
Tabel 3. 57	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.1	186
Tabel 3. 58	Ruas jalan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	187
Tabel 3. 59	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	189
Tabel 3. 60	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.2	193
Tabel 3. 61	Rincian Rasio Elektrifikasi 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	194
Tabel 3. 62	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi	195
Tabel 3. 63	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.3	199
Tabel 3. 64	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air	200
Tabel 3. 65	Rincian Daerah Irigasi yang Direhabilitasi Tahun 2020	202
Tabel 3. 66	Rincian Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Tahun 2020	202
Tabel 3. 67	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.4	206
Tabel 3. 68	Penanganan RTLH berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	209
Tabel 3. 69	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat	209
Tabel 3. 70	Capaian indikator kinerja Tujuan 5.1	214
Tabel 3. 71	Skor dan Kriteria IKLH	214
Tabel 3. 72	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas lingkungan hidup	215

Tabel 3. 73	Capaian indikator kinerja Kinerja Sasaran Strategis 5.2.1	219
Tabel 3. 74	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas air	222
Tabel 3. 75	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas udara	228
Tabel 3. 76	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.2.2	233
Tabel 3. 77	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas lahan	235
Tabel 3. 78	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2.3	240
Tabel 3. 79	Jenis Bencana yang terjadi di tahun 2020 di Sumatera Barat	240
Tabel 3. 80	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 I indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana	242
Tabel 3. 81	Anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung program/kegiatan yang mendukung pencapaian 18 sasaran strategis tahun 2020	245

Daftar Grafik

Grafik 1	Jumlah Penduduk Sumatera Barat dari Tahun 2011-2016	8
Grafik 2	Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020	8
Grafik 3	Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	11
Grafik 4	Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Desember 2019	17
Grafik 5	Komposisi Aparatur Berdasarkan Golongan	18
Grafik 6	Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	23
Grafik 7	Gambaran pencapaian indikator Kinerja Tahun 2020	42
Grafik 8	Indeks Kerukunan Provinsi di Indonesia Tahun 2019	48
Grafik 9	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	64
Grafik 10	Perkembangan nilai evaluasi SAKIP tahun 2016-2020	79
Grafik 11	Perbandingan indeks profesionalitas ASN	86
Grafik 12	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten/Kota tahun 2020	86
Grafik 13	OPD yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2020	96
Grafik 14	IPM 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	101
Grafik 15	IPM Sumatera Barat, Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020	103
Grafik 16	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020	108
Grafik 17	Harapan Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020	109
Grafik 18	Harapan lama sekolah Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2020	110
Grafik 19	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020	112
Grafik 20	Rata-rata Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se	113

	Sumatera Barat tahun 2020	
Grafik 21	Rata-rata lama sekolah Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2020	114
Grafik 22	Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020	120
Grafik 23	Angka Harapan Hidup 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020	120
Grafik 24	Angka Harapan hidup Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2020	122
Grafik 25	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2020 (%)	136
Grafik 26	Tren Indeks/Rasio Gini Sumatera Barat September 2018-2020	138
Grafik 27	Rasio gini Sumatera Barat dibandingkan Provinsi Lain di Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2020	140
Grafik 28	PDRB perkapita Menurut Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2020 (Juta Rupiah)	143
Grafik 29	Negara Penyumbang PMA Terbesar Tahun 2020	150
Grafik 30	Kabupaten/Kota Penerima PMA Terbesar Tahun 2020	151
Grafik 31	Kabupaten/Kota Penerima PMDN terbesar Tahun 2020	152
Grafik 32	Perbandingan Peningkatan Nilai Ekspor di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan Provinsi Lain di Sumatera dan Nasional Tahun 2020	160
Grafik 33	Daftar Komoditi Makanan Yang Berkontribusi Terhadap Garis Kemiskinan	166
Grafik 34	Daftar Komoditi Non Makanan Yang Berkontribusi Terhadap Garis Kemiskinan	167
Grafik 35	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020	169
Grafik 36	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan	175
Grafik 37	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau	179

	Sumatera dan Nasional Agustus 2020	
Grafik 38	Persentase penduduk bekerja menurut kegiatan Formal/Informal Agustus 2018 - Agustus 2020	180
Grafik 39	Rasio Elektrifikasi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020	196
Grafik 40	Perkembangan Cakupan Air Minum Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2020	207
Grafik 41	Cakupan Air Minum Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	207
Grafik 42	Cakupan Sanitasi Kabupaten/Kota tahun 2020	208
Grafik 43.	Indeks Kualitas Air 6 Sungai yang dipantau	221
Grafik 44	Indeks Kualitas Air Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	221
Grafik 45	Indeks Kualitas Air Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020	223
Grafik 46	Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	227
Grafik 47	Indeks Kualitas Udara Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020	229
Grafik 48	Indeks Kualitas Lahan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	234
Grafik 49	Indeks Kualitas Lahan Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020	236
Grafik 50	Kejadian Bencana di Sumatera Barat Tahun 2016-2020	241
Grafik 51	Rincian Belanja Langsung Tahun 2020	245



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaporan kinerja menjadi salah satu komponen yang harus dipenuhi oleh instansi Pemerintah dalam hal mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Bentuk pelaporan kinerja tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan output dari SAKIP dan menjadi salah satu bahan yang di evaluasi dalam evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan kinerja menjadi media akuntabilitas bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja instansi pemerintah. Kewajiban menyusun Laporan Kinerja ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 dan pasal 23 yang menyatakan bahwa Gubernur menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Kinerja tahun 2020. Laporan kinerja ini menginformasikan pada *stakeholders* bagaimana pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dimaksudkan untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah untuk memberikan informasi kepada *stakeholders* terkait pencapaian kinerja pemerintah provinsi Sumatera Barat beserta analisa terhadap hambatan/kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut serta mengevaluasi pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan di masa yang akan datang.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang.
- b. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah diubah dengan Peraturan

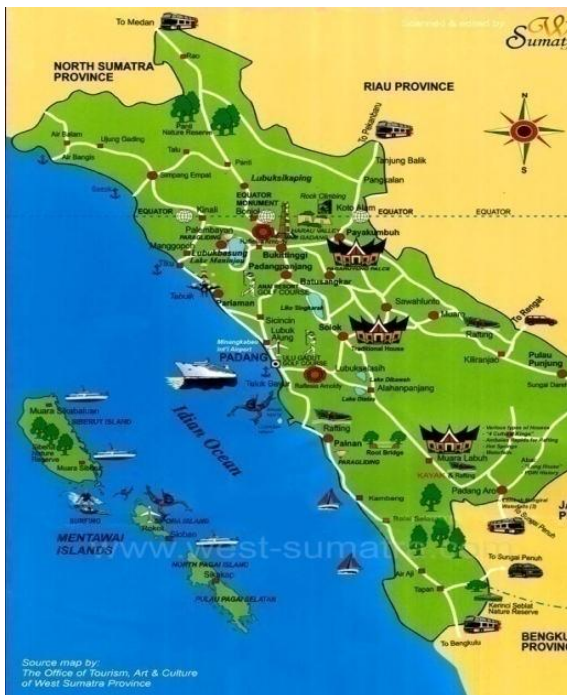
Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.4. KONDISI DAERAH SUMATERA BARAT

1.4.1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

1.4.1.1. Letak dan Luas Wilayah Administrasi

Provinsi Sumatera Barat terletak antara $0^{\circ} 54'$ Lintang Utara (LU), sampai dengan $3^{\circ} 30'$ Lintang Selatan (LS), dan antara $98^{\circ} 36'$ sampai $101^{\circ} 53'$ Bujur Timur (BT). Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera dan mempunyai luas wilayah $\pm 42.297,30 \text{ km}^2$ atau setara dengan 2,21% dari luas Republik Indonesia.



Provinsi Sumatera Barat sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi. Provinsi Sumatera Barat berada di Pulau Sumatera yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota.

Dari 19 Kabupaten/Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas yaitu 6,01 ribu Km^2 , sedangkan Kota Padang Panjang memiliki luas wilayah terkecil yaitu 23 Km^2 . Sumatera Barat memiliki 391 gugusan pulau

dengan jumlah terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai, sedangkan Kabupaten Agam mempunyai pulau paling sedikit.

1.4.1.2. Topografi

Ketinggian permukaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m dpl hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian > 3000 m di atas permukaan laut (dpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30,41%), areal dengan ketinggian 100-500 m dpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500-1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000-1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500-2.000 m dpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%) dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 m dpl. Dataran rendah (< 500 m dpl) tercatat hanya 45%, dataran menengah (500 – 1.000 m) 32% dan 23% daerah dataran tinggi. Dataran tinggi berupa jejeran bukit dan gunung adalah rantai dari pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan berbukit dan bergunung dengan kelerengan di atas 40% tercatat 1.017.000 Ha. Wilayah yang lebih datar dijumpai di bahagian Timur Sumatera Barat.

1.4.1.3. Geologi

Struktur yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat adalah struktur perlipatan (*antiklinorium*) dan struktur sesar dengan arah umum barat laut tenggara, yang mengikuti struktur regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa *Great Sumatera Fault* di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan Mentawai *Fault* di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Kondisi

ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi kerawanan bencana gempa bumi yang cukup tinggi.

1.4.1.4. Hidrologi

Provinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya air yang cukup besar. Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat mencapai 606 sungai yang sebahagian bermuara ke Samudera Hindia di Pantai Barat dan sebahagian lagi ke arah Pantai Timur Pulau Sumatera. Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai ini dapat dibagi atas 9 Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu SWS Akuaman, Pulau Siberut, Natal-Batahan, Kampar, Batang Hari, Silaut, Rokan, Indragiri dan Masang. Sumber air sungai di provinsi ini berasal dari pegunungan dan danau (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Maninjau dan Danau Singkarak). Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar mempunyai luas 13.011 km², Danau Maninjau terdapat di Kabupaten Agam mempunyai luas 9.950 km², sedangkan Danau Diatas (3.150 km²), Danau Dibawah (1.400 km²), dan Danau Talang (1,02 km²) terdapat di Kabupaten Solok.

1.4.1.5. Klimatologi

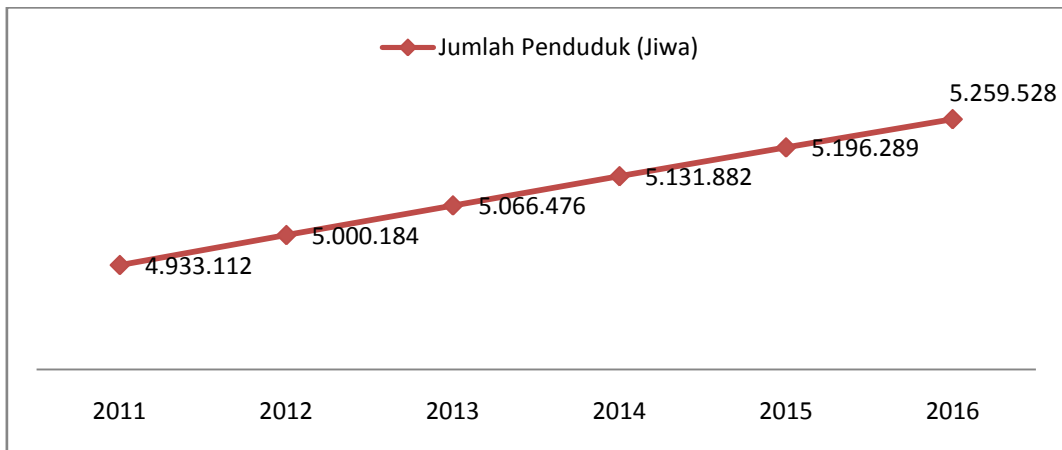
Kondisi iklim Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu wilayahnya. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.980 sampai lebih dari 5.000 mm/tahun dengan kecenderungan daerah bagian barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian timur. Keadaan yang lebih basah di bagian barat ini berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan angin laut yang membentur bukit dan gunung sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut menyediakan air yang cukup banyak di bagian barat provinsi ini sehingga sangat menunjang untuk budidaya pertanian antara lain untuk tanaman pangan dan *hortikultura*.

Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim *tropika* basah. Adapun klasifikasi iklim berdasarkan sistem *Schmidt-Fergusson* daerah ini dapat dibagi menjadi 3 tipe iklim yaitu tipe A, B dan C. Daerah sepanjang pantai barat tergolong kepada tipe A dengan luas wilayah cakupannya mencapai 2.672.000 Ha. Adapun daerah lereng timur Bukit Barisan yang merupakan daerah bayangan hujan menerima curah hujan lebih kecil tergolong kepada tipe B dengan 265.700 Ha dan tipe C dengan luas wilayah cakupannya 100.800 Ha terdapat di lereng Timur Gunung Merapi yaitu sekitar Danau Singkarak di Kabupaten Tanah Datar dan di selatan Gunung Talang meliputi di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Suhu rata-rata di Sumatera Barat tercatat antara 180 – 340 C dengan suhu rata-rata lebih kurang 25,50 C. Perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 50–70 C. Suhu terendah biasanya terjadi antara bulan Oktober sampai dengan Desember dan suhu tertinggi terjadi antara bulan Juli dan Agustus. Pada umumnya daerah dataran tinggi mempunyai suhu 40– 60 C lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah pesisir barat. Lebih rendahnya suhu di daerah pegunungan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sentra *hortikultura* dan dapat dikembangkan sebagai daerah *agrowisata* potensial terutama dipegunungan yang terdapat di wilayah Agam, Tanah Datar, Bukittinggi dan Padang Panjang serta pada kawasan Kayu Aro sampai ke Pantai Cermin di Kabupaten Solok. Kelembaban udara antara 79%–87% dengan kecepatan angin antara 1,25–7,72 knot. Daerah dengan kelembaban yang tinggi terjadi di daerah pesisir dan Kepulauan Mentawai.

1.4.2. KONDISI DEMOGRAFI

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah populasi Sumatera Barat mencapai 4.865,33 ribu jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 110 jiwa/km². Jumlah Penduduk Sumatera Barat dari tahun 2011-2016 dapat dilihat pada grafik 1.

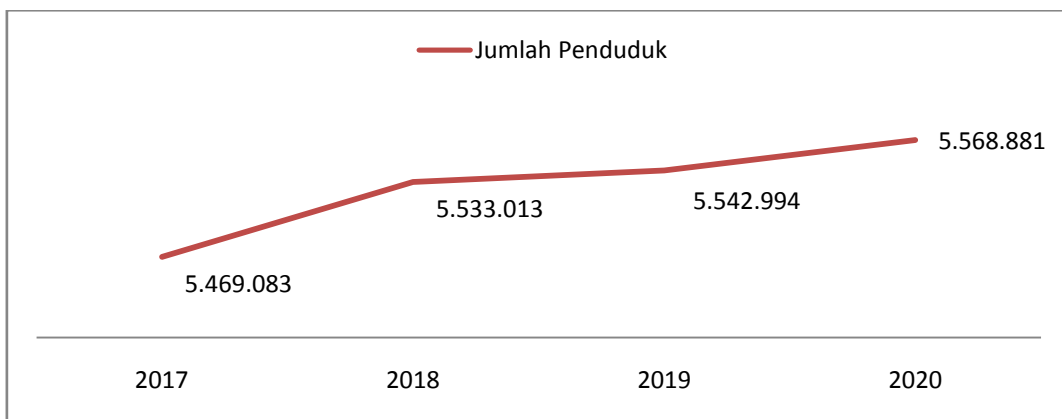
Grafik 1 Jumlah Penduduk Sumatera Barat dari Tahun 2011-2016



Sumber data: Tabel Statistik BPS 3 November 2017

Untuk tahun 2017-2020, data kependudukan Pemerintah Provinsi mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2017-2020 berdasarkan data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dapat dilihat pada grafik 2.

Grafik 2 Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020



Sumber data: Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa penduduk Sumatera Barat dalam kurun waktu 2017-2020 terus mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019 (data konsolidasi bersih semester I), di tahun 2020 meningkat sebanyak 25.887 jiwa. Jumlah penduduk sebanyak 5.568.881 jiwa di tahun 2020 berasal dari data konsolidasi bersih semester I

tahun 2020. Dari 5.568.881 jiwa 50,31% berjenis kelamin laki-laki (2.801.468 jiwa) dan 49,69% berjenis kelamin perempuan (2.767.413 jiwa).

1.5. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

1.5.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Provinsi Sumatera Barat sebagai Daerah Provinsi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979. Undang-undang ini merupakan landasan legal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah yang untuk Provinsi disebut Gubernur dan perangkat daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 91 ayat 2, Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota.
2. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.
3. memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
4. melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.
5. melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota.
6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

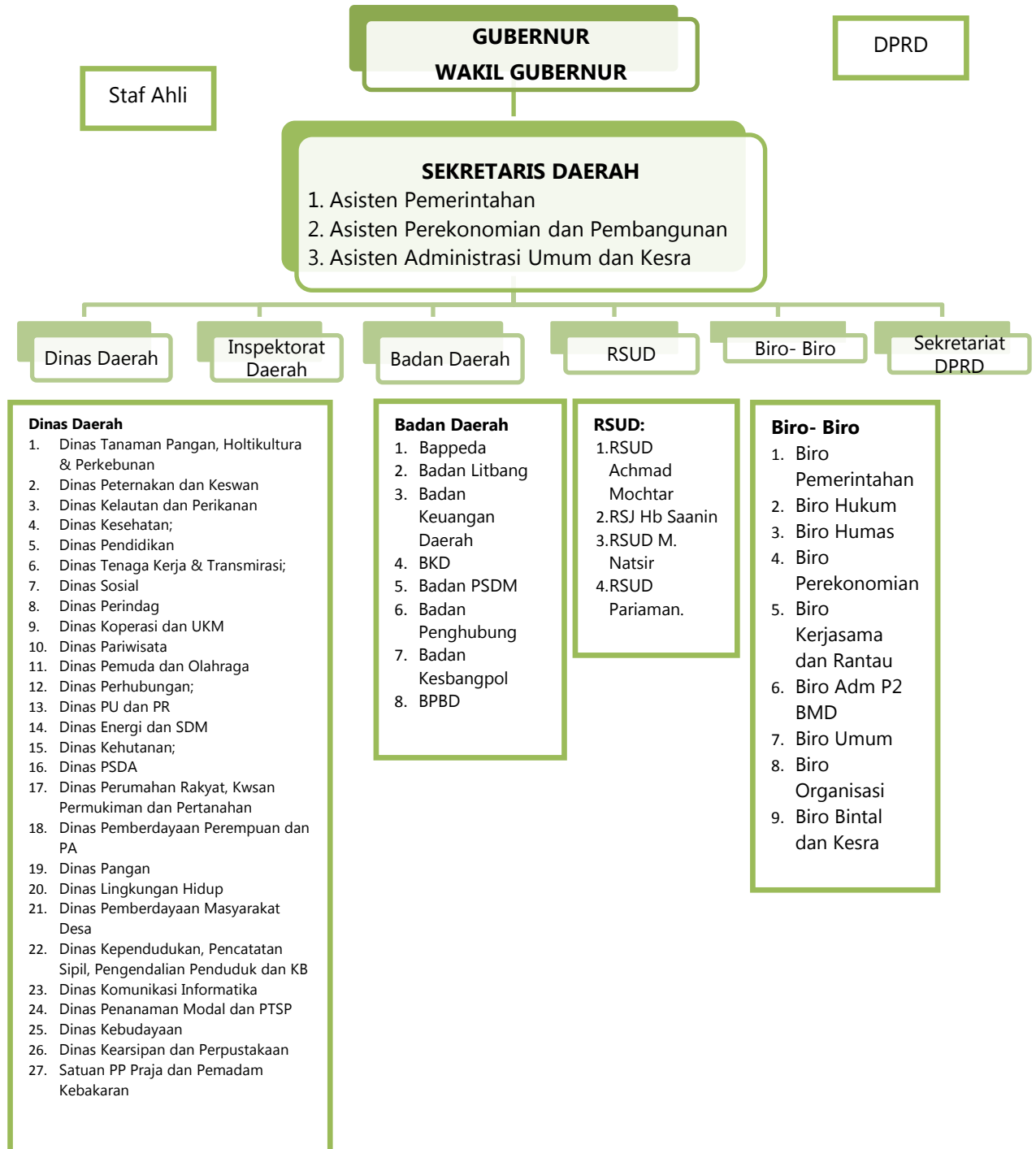
Sementara itu dalam pasal 91 ayat 3 diuraikan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Walikota.
2. memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
4. memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota.
5. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik 3 di bawah ini:

Grafik 3 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat



1.5.3. Isu-isu Strategis

Berikut ini akan diuraikan isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021:

1. Pembangunan Mental dan Peningkatan Pengamalan Nilai-nilai Adat dan Agama

Pembangunan mental dan penerapan nilai-nilai adat dan pengamalan ajaran agama penting bagi daerah untuk menangkis pengaruh negatif keterbukaan informasi melalui media sosial dan masuknya budaya-budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Pembangunan bidang ini dilaksanakan untuk menyiapkan generasi muda Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter, berdaya saing dan mewujudkan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertakwa.

2. Penanganan Bencana Alam

Letak geografis Sumatera Barat yang rawan terhadap berbagai bencana alam dapat menghambat percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi hambatan tersebut, pemerintah Sumatera Barat harus memberikan perhatian yang besar untuk mengurangi resiko, penanggulangan bencana dan pemulihan daerah yang terkena bencana. Hal ini diharapkan akan berdampak pada percepatan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

3. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah

Kemiskinan dan ketimpangan pembangunan daerah masih merupakan isu penting bagi Sumatera Barat, meskipun sudah terjadi penurunan tingkat

kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar daerah selama periode 2010-2015. Persoalan kemiskinan yang dihadapi saat ini sudah bergeser untuk menanggulangi tingkat keparahan dan tingkat kedalaman kelompok masyarakat yang miskin. Untuk mengeluarkan atau membebaskan kelompok masyarakat dari kemiskinan diperlukan upaya yang lebih besar lagi dari yang telah dilakukan sebelum ini. Jika kelompok masyarakat miskin dapat diatasi, maka tujuan Sumatera Barat bebas dari kemiskinan dalam arti yang sesungguhnya dapat diwujudkan.

Selanjutnya Sumatera Barat juga ingin mewujudkan keinginan untuk menjadi provinsi yang bebas dari daerah tertinggal. Saat ini masih terdapat tiga daerah tertinggal (Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat). Ketiga daerah kabupaten ini mempunyai karakteristik yang relatif berbeda, tetapi sama-sama menghadapi keterbatasan akses untuk keluar masuk, infrastruktur dan kualitas sumberdaya manusia yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi dan percepatan pembangunan. Untuk membebaskan ketiga daerah kabupaten ini dari ketertinggalannya, diperlukan dana yang besar dan usaha yang terintegrasi, fokus, terukur dan tepat sasaran.

4. Penguatan Struktur Ekonomi Daerah

Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada sektor-sektor produktivitas tinggi dan menyerap banyak lapangan kerja. Oleh sebab itu, penguatan struktur ekonomi dijadikan isu strategis dalam rangka lebih menumbuh kembangkan industri pengolahan pertanian, industri kerajinan dan industri pariwisata untuk mendorong penguatan dan perubahan struktur ekonomi Sumatera Barat.

5. Peningkatan Infrastruktur

Sumatera Barat mempunyai daya saing daerah yang belum mencukupi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha. Salah satu faktor penghalang adalah rendahnya ketersediaan infrastruktur; jalan, listrik, transportasi, (darat, laut, udara, kereta api), pantai, sungai, irigasi, perumahan/permukiman, bangunan gedung serta prasarana air minum sanitasi. Oleh sebab itu peningkatan pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, sehingga menarik bagi investor untuk mengembangkan berbagai usaha di Sumatera Barat.

6. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Untuk mendukung terlaksananya pemerintah yang baik dan bersih diperlukan peningkatan integritas dan kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan publik, memantapkan sistem manajemen kepegawaian, keterbukaan informasi kepada publik dan keterlibatan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

7. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia adalah faktor penentu kemajuan suatu negara dan daerah. Pentingnya isu peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah untuk mengatasi ketimpangan kualitas sumberdaya manusia antar daerah di Sumatera Barat dan untuk menyiapkan generasi muda yang siap bersaing di berbagai sektor.

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sumatera Barat diperlukan pembenahan pembangunan pendidikan, kesehatan dan lingkungan seperti

peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dengan menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan.

8. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) menjadi isu pembangunan daerah karena bahagian terbesar yang menggerakkan ekonomi Sumatera Barat adalah usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Jika UMKMK tidak mengalami perkembangan, maka perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kesempatan kerja akan terjadi di Sumatera Barat.

9. Peningkatan Ketahanan Pangan

Peningkatan produktivitas dan pemenuhan kebutuhan pangan menjadi isu penting bagi pemerintah provinsi Sumatera Barat. Untuk pemenuhan kebutuhan pangan, Sumatera Barat perlu berupaya untuk menjadi provinsi penghasil pangan nasional untuk mendukung kedaulatan pangan.

10. Pemanfaatan Potensi Kelautan dan Kemaritiman

Dalam upaya pemanfaatan potensi kelautan dan kemaritiman guna meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memanfaatkan potensi kelautan dan kemaritiman secara optimal dengan peningkatan sumberdaya manusia, menyediakan sarana dan prasarana seperti penyediaan armada dan alat tangkap di bidang perikanan serta sarana prasarana untuk pariwisata bahari dan sarana transportasi untuk pembangunan kemaritiman.

11. Pengurangan Pengangguran

Pengurangan pengangguran menjadi isu pembangunan daerah karena pengangguran menjadi hambatan dalam pembangunan dan menambah beban

tanggung yang berat bagi rumah tangga dan daerah serta berkaitan dengan kemiskinan. Untuk penanganan pengangguran di Sumatera Barat diperlukan pembenahan pada sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Aspek yang perlu mendapat perhatian dari sisi penawaran adalah peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja sehingga cocok dengan permintaan di pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, pembenahan balai latihan yang dapat menghasilkan dan mengembangkan wirausaha baru untuk sektor UMKMK dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Aspek yang perlu mendapat perhatian dari sisi permintaan tenaga kerja adalah meningkatkan dan membuka lapangan kerja baru dan alternatif bagi pekerja yang masuk kategori setengah pengangguran. Membuka lapangan kerja tentu memerlukan pengembangan berbagai sektor yang dapat diunggulkan Sumatera Barat seperti sektor pariwisata, kelautan dan kemaritiman dan konstruksi bangunan.

12. Peningkatan Daya Saing Daerah

Terbukanya pasar bebas di era globalisasi baik regional maupun internasional, seperti *Asean Economic Community* (AEC) dan *Asean China Free Trade Area* (ACFTA) menjadi potensi dan peluang untuk meningkatkan perekonomian nasional dan daerah. Peluang akses pasar untuk produk-produk Sumatera Barat terbuka cukup besar terutama ke negara Asean dan China. Untuk itu, upaya pemanfaatan pasar global tersebut guna percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat perlu diiringi dengan peningkatan daya saing daerah yang ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan sumberdaya manusia yang berkualitas serta tingkat keamanan yang tinggi. Oleh sebab itu peningkatan daya saing daerah perlu dirumuskan

sedemikian rupa dengan mengintegrasikan dengan pembangunan bidang-bidang lainnya.

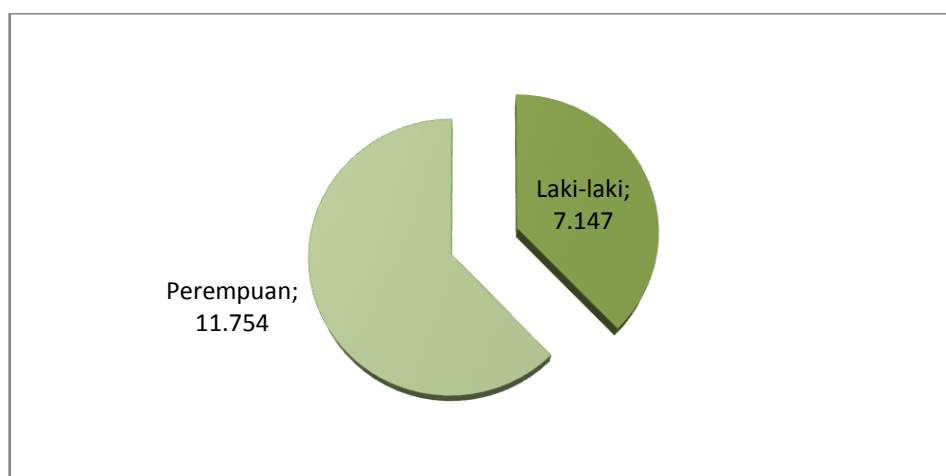
13. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dijadikan isu pembangunan agar pembangunan yang akan dilaksanakan berbasis daya dukung dan daya tampung. Pembangunan dan pengembangan berbagai sektor yang akan dilaksanakan di masa mendatang harus dipastikan tidak merusak dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Untuk mewujudkan hal ini, konsep pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau (*green economy*) perencanaan tata ruang perlu menjadi acuan semua pihak-pihak yang berkepentingan.

1.5.4. Sumber Daya Manusia

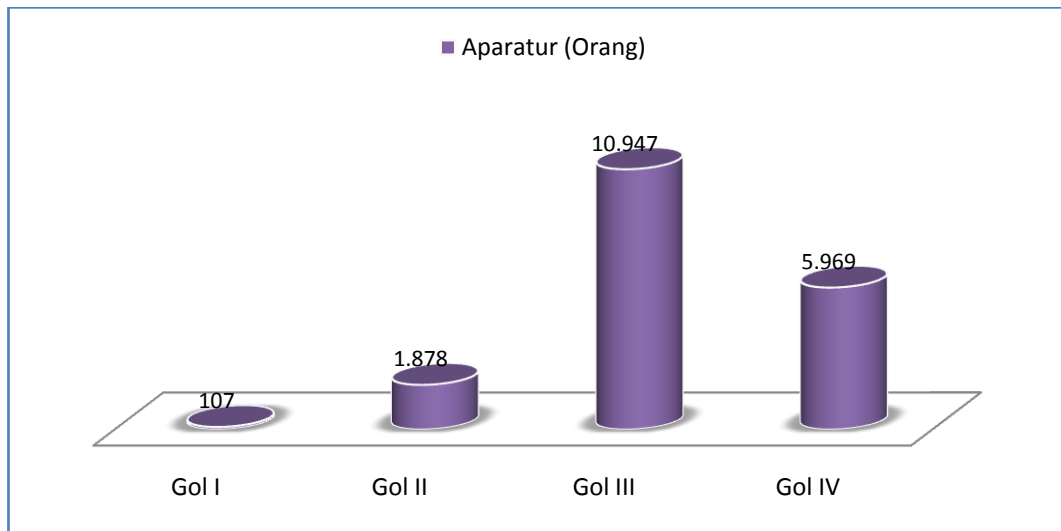
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 5 Januari 2021 adalah sebanyak 18.901 orang. Dibandingkan dengan PNS di akhir Desember 2019, jumlah ini menurun sebanyak 888 orang. Komposisi PNS berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik 4 dan grafik 5.

Grafik 4 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Desember 2019



Sumber data: BKD Provinsi Sumbar

Grafik 5 Komposisi Aparatur Berdasarkan Golongan



Sumber data: BKD Provinsi Sumbar

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan:

- a. Metodologi Pengukuran Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja
- c. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, evaluasi dan analisi capaian kinerja dimaksud.

d. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.

Bab IV : Penutup, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

Lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Sesuai dengan visi gubernur dan wakil Gubernur, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah:

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”

Madani

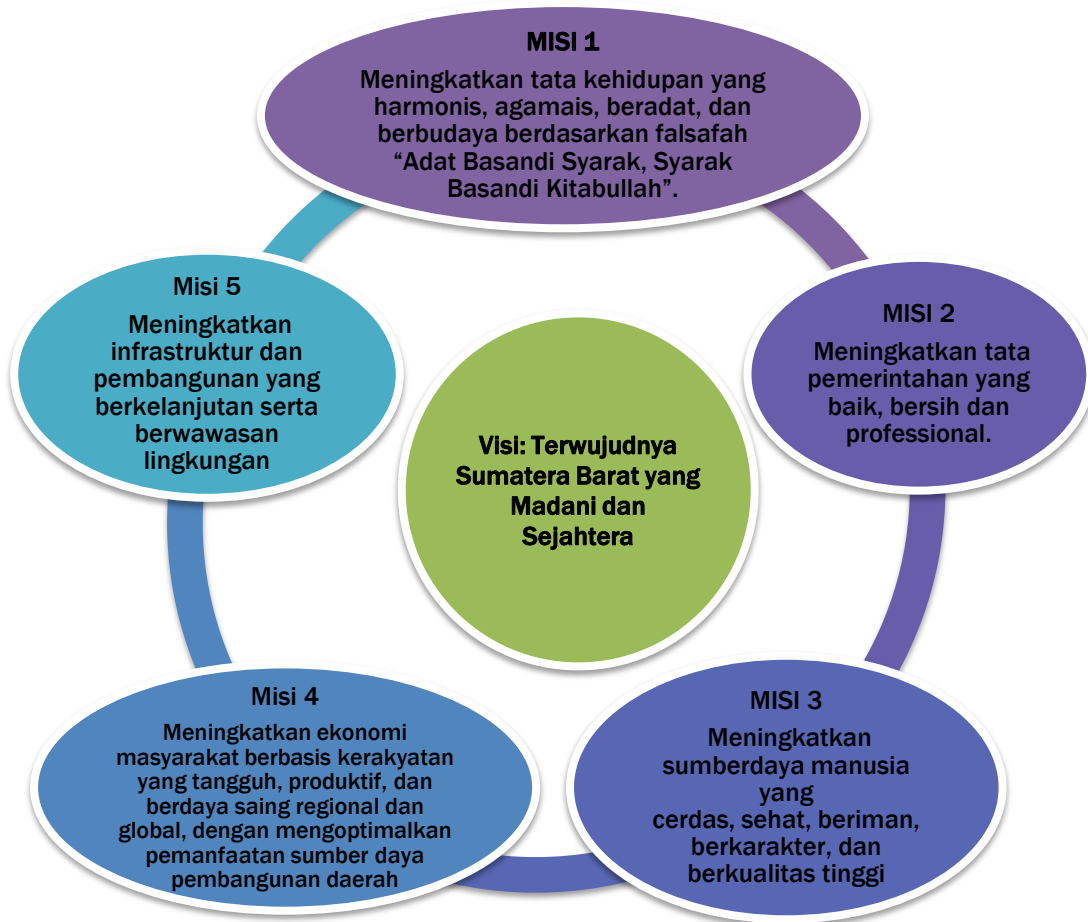
Sumatera Barat *Madani* adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara.

Sejahtera

Sumatera Barat *Sejahtera* merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan, terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 menetapkan 5 Misi sebagaimana tergambar pada grafik 6.

Grafik 6 Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021



Sumber data: RPJMD Prov Sumbar 2016-2021

Berdasarkan visi dan misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Untuk tujuan dan sasaran yang ada dalam RPJMD tahun 2016-2021 disempurnakan berdasarkan kerangka berpikir logis (*Cascading Kinerja*) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 065-1038-2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-832-2018 tentang penetapan hasil rekomendasi tim penguatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI: "TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA"

	MISI		TUJUAN		SASARAN
1	Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".	1.1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
		1.2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya
				1.2.2	Meningkatnya implementasi Adat Basandi Syara'- Syara' basandi kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.	2.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
				2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien
				2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3	Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	3.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
				3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
4	Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	4.1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat
				4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi
				4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor
				4.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran
5	Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.	5.1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah
				5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan
				5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air
				5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur

MISI	TUJUAN	SASARAN
	5.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	5.2.1 Layanan Dasar Masyarakat Meningkatnya Kualitas Air dan Udara 5.2.2 Meningkatnya kualitas hutan dan lahan 5.3.1 Menurunnya risiko bencana

2.2. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat sudah menyusun dokumen perjanjian kinerja tahun 2020. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut juga sudah diupload ke aplikasi <https://esr.menpan.go.id/>. Sepanjang tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan refocusing anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid 19. Hal ini tentunya akan berpengaruh baik langsung atau tidak langsung terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja. Perubahan tersebut meliputi:

1. Perubahan target beberapa indikator kinerja antara lain pada:
 - Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional
 - Indeks Reformasi Birokrasi
 - Indeks Profesionalitas ASN
2. Perubahan anggaran menyesuaikan dengan kondisi anggaran setelah *refocusing* dan anggaran perubahan.

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2. Perubahan Perjanjian Kinerja

PROVINSI : SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
MISI 1	MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAI, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH" ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH".			
Tujuan 1.1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks Kerukunan	68,8	Satpol PP, B. Kesbangpol, Biro Bina Mental dan Kesra
1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1.1 Indeks Kerukunan	68,8	Satpol PP, B. Kesbangpol, Biro Bina Mental dan Kesra
Tujuan 1.2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional	47	Dinas Kebudayaan
1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1.2.1.1 Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional	47	Dinas Kebudayaan
MISI 2	MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL			
Tujuan 2.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	71	OPD terkait 8 Area Perubahan
2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	2.1.1.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	B. Keuda, Sekretariat Daerah, Inspektorat,
		2.1.1.2 Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)	Bappeda, Biro Organisasi, Inspektorat
2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	2.1.2.1 Indeks Profesionalitas ASN	54	B. Kepegawaian Daerah, B. Pengembangan SDM, Biro Organisasi

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
		2.1.2.2 Indeks e-Government	2,9	D. Kominfo dan Biro Humas
2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.1.3.1 Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik	84,80	Biro Organisasi
MISI 3	MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI			
Tujuan 3.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,13	Lintas PD
3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1 Harapan lama sekolah	14,86	D. Pendidikan
		3.1.1.2 Rata-rata lama sekolah	8,85	
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.1.2.1 Angka Harapan Hidup	69,38	D. Kesehatan dan RSUD
MISI 4	MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH			
Tujuan 4.1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,88	Lintas PD
		Indeks Gini	0,328	Lintas PD
4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	4.1.1.1 Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta)	48,19	Lintas PD
4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	4.1.2.1 Persentase pertumbuhan investasi	3,83	D. Penanaman Modal dan PTSP
4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	4.1.3.1 Nilai Ekspor (US\$ Juta)	1365,81	Disperindag

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
4.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	4.1.4.1 Tingkat Kemiskinan	5,83	Lintas PD
		4.1.4.2 Tingkat Pengangguran	5,82	Lintas PD
MISI 5	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN			
Tujuan 5.1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	38	D.PU dan PR dan D. Perhubungan
		Rasio Elektrifikasi	99,30	D. ESDM
5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	5.1.1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	38	D. PU dan PR dan D. Perhubungan
5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	5.1.2.1 Rasio Elektrifikasi	99,30	D. ESDM
5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	5.1.3.1 Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air	65,37	D. PSDA
5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.1.4.1 Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	54	D. PU dan PR dan D. Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Tujuan 5.2	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,76	D. Lingkungan Hidup dan D. Kehutanan
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.2.1.1 Indeks Kualitas Air	78	D. Lingkungan Hidup
		5.2.1.2 Indeks Kualitas Udara	90	

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	5.2.2.1 Indeks Tutupan Hutan	68,4	D. Kehutanan
5.2.3	Menurunnya risiko bencana	5.2.3.1 Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	75	BPBD

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
A	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	18.060.569.901	
1	Peningkatan Perlindungan Masyarakat	104.138.829	Satpol PP dan
2	Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	2.291.982.565	Damkar
3	Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	51.461.300	
4	Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	1.754.341.918	
5	Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur	56.054.000	
6	Pemetaan daerah rawan kebakaran	35.314.000	
7	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	1.437.727.580	B. Kesbangpol
8	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	43.561.600	
9	Pendidikan Politik Masyarakat	683.000.000	
10	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	260.129.675	
11	Pencegahan, Penangan Dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	42.300.700	
12	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	2.469.467.232	Biro Bina Mental
13	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamatan, dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama	8.672.658.481	dan Kesra
14	Pengembangan lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	158.432.021	
B	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	16.242.888.597	
1	Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.799.017.200	D. Kebudayaan

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
2	Pemberdayaan Dan Penguatan Eksistensi Lembaga-lembaga Adat, Seni Dan Budaya	150.000.000	
3	Pembinaan Dan Pengembangan Pendidikan Budaya	511.328.000	
4	Pengembangan Dan Penguatan Nilai Budaya	12.096.739.333	
5	Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya	685.804.064	
C	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan akuntabel	31.656.728.055	
1	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	47.779.000	Inspektorat Daerah
2	Peningkatan Fungsi Pengawasan Dan Penegakan Hukum	7.101.631.403	
3	Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	734.702.974	Biro AP2BMD
4	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.094.786.289	D. PUPR, D. Nakertrans, Biro Umum
5	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5.135.895.691	B. Keuangan Daerah
6	Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	417.237.815	
7	Peningkatan Pendapatan Daerah	5.591.976.645	
8	Kerjasama Pembangunan	553.694.696	Biro Kerjasama,
9	Peningkatan Manajemen Pemerintah Daerah	361.223.940	Pemb & Rantau
10	Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan	244.725.000	
11	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dan Ketatalaksanaan Pemda	1.119.696.338	Biro AP2BMD
12	Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah	107.395.459	Biro Pemerintahan
13	Perencanaan Pembangunan Daerah	1.278.368.923	Bappeda
14	Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan	210.624.628	
15	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.552.773.808	
16	Pengelolaan Otonomi Daerah	904.527.862	
17	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Dan SKPD Provinsi Sumatera Barat	128.515.800	Biro Organisasi
18	Manajemen Perubahan	71.171.784	
D	Meningkatnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	28.008.45.326	
1	Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	5.430.336.770	B. Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi
2	Pendidikan Kedinasan	1.999.120.460	BPSDM
3	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	486.716.890	
4	Kerjasama Informasi Dan Media Massa	508.552.300	D. Kominfo

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
5	Informasi dan Komunikasi Publik	2.390.488.552	
6	Pengelolaan E-Government Pemerintahan Daerah	9.685.283.478	
7	Peningkatan penyediaan data statistik sektoral	314.783.500	
8	Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandiaan	325.853.400	
9	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3.967.050.739	Biro Humas
10	Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah	535.226.488	Biro Organisasi
11	Pembangunan Materi Hukum	716.222.200	Biro Hukum
12	Sarana Dan Informasi Hukum	49.203.250	
13	Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	523.898.500	
14	Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	216.220.270	Biro Organisasi
15	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	859.495.529	Biro Perekonomian
E	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	89.300.642.033	
1	Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	3.019.342.111	Biro Umum
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	61.568.641	Biro Organisasi
3	Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum	481.788.200	Biro Hukum
4	Peningkatan Pelayanan Kedinasan	14.854.915.932	Biro Umum, B. Penghubung
5	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	66.651.739.176	Set. DPRD
6	Pengembangan Data Dan Informasi	78.072.400	B. Penghubung
7	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	221.744.600	
8	Peningkatan Pelayanan Publik	1.361.860.000	B. Penghubung, B. Keuangan Daerah
9	Penguatan Inovasi Daerah	899.609.900	B. Litbang
10	Penelitian Dan Pengembangan IPTEK Untuk Menunjang Pemerintahan Daerah Dan Pembangunan	935.373.023	
11	Penataan Administrasi Kependudukan	509.843.800	D. Pengendalian Penduduk KPS
12	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	141.357.900	D. Kearsipan Perpustakaan
13	Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan	83.426.350	

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
F	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	622.506.278.363	
1	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	105.000.000	D. Pendidikan
2	Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus	11.020.212.700	
3	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan	6.623.776.750	
4	Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	155.662.089.180	
5	Peningkatan Mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Menengah	448.487.591.631	
6	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	607.608.102	D. Kearsipan Perpustakaan
G	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	532.430.769.927	
1	Obat Dan Pembekalan Kesehatan	5.072.754.473	D. Kesehatan dan RSUD
2	Upaya Kesehatan Masyarakat	10.060.182.749	
3	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	3.262.814.007	
4	Perbaikan Gizi Masyarakat	5.027.375.600	
5	Pengembangan Lingkungan Sehat	895.789.550	
6	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit (Menular/Tidak Menular)	4.097.502.300	
7	Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata	183.082.094.043	
8	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	8.698.200	
9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata	229.930.000	
10	Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	461.147.500	
11	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	55.813.429.531	
12	Peningkatan Pelayanan BLUD	251.469.930.735	
13	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	436.115.078	D. Pemberdayaan Perempuan dan PA
14	Peningkatan Kualitas Keluarga	23.067.250	
15	Peningkatan Sistem Data Gender Dan Anak	35.839.500	
16	Peningkatan Perlindungan Perempuan	257.596.393	
17	Peningkatan Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak	120.060.145	
18	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	397.985.358	
19	Diversifikasi Pangan	825.664.200	D. Pangan
20	Peningkatan Ketahanan Pangan	4.977.871.170	
21	Keluarga Berencana	103.992.950	D. Pengendalian Penduduk KPS
22	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	25.020.000	
23	Peningkatan Pengendalian Penduduk	81.890.739	
24	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	4.262.351.215	D. Pemuda Olahraga
25	Pengembangan Organisasi Pemuda Dan Manajemen Olahraga	1.180.718.280	

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
26	Peningkatan Penyadaran Kepemudaan	127.665.661	
27	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	93.283.300	
H	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat	75.133.221.029	
1	Pengamanan Sumber Daya Hewani	2.257.226.925	D. Peternakan dan Keswan
2	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil	636.288.700	
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana	921.040.752	
4	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	75.000.000	
5	Peningkatan Produksi Dan Produktifitas	8.411.543.000	
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM	261.974.000	
7	Peningkatan Perlindungan Konsumen	291.838.475	D. Perindustrian dan Perdagangan
8	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	509.718.900	
9	Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	649.046.471	
10	Peningkatan Kualitas Produk Industri	981.377.150	
11	Peningkatan SDM Pertanian	700.000.000	D. Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
12	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Pertanian	33.486.000	
13	Pemberdayaan Penyuluhan	100.000.000	
14	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil	368.726.763	
15	Peningkatan Sarana dan Prasarana	6.244.402.248	
16	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	4.070.265.863	
17	Peningkatan Produksi Dan Produktifitas	8.041.065.534	
18	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM	5.103.539.835	
19	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5.746.080.400	D. Pariwisata
20	Pengembangan Ekonomi Kreatif	1.550.997.404	
21	Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	3.649.831.746	
22	Pengembangan Destinasi Dan Daya Tarik Pariwisata	1.025.000.000	
23	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil	1.114.508.200	D. Kelautan dan Perikanan
24	Pengembangan Ekonomi Maritim	5.182.776.598	
25	Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	6.057.372.000	
26	Peningkatan Sarana dan Prasarana	183.673.900	
27	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	13.800.000	
28	Peningkatan Produksi Dan Produktifitas	1.648.588.820	
29	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM	3.435.026.230	
30	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.083.841.300	D. Koperasi dan UKM
31	Peningkatan Dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	1.036.036.550	
32	Peningkatan Dan Pengembangan Daya Saing UMKM	3.749.147.265	

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
I	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	2.329.079.135	
1	Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	616.057.456	D. Penanaman Modal dan PTSP
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	1.713.021.679	
J	Meningkatnya Nilai Ekspor	575.288.131	
1	Peningkatan Dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	575.288.131	D. Perindustrian dan Perdagangan
K	Menurunnya tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	73.068.083.914	
1	Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3.160.000	D. Sosial
2	Pembinaan Anak Terlantar	8.141.573.000	
3	Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas Dan Eks Trauma	3.349.048.946	
4	Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar	3.475.648.156	
5	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, Dan Penyakit Sosial Lainnya)	1.061.474.756	
6	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	150.271.500	
7	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	37.510.544.900	
8	Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	277.619.154	
9	Pemberdayaan Fakir Miskin	5.663.245.648	
10	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	672.129.900	Biro Bina Mental dan Kesra
11	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	380.000.000	D.
12	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari	4.655.164.053	Pemberdayaan Masyarakat Desa
13	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Diversifikasi Usaha	93.149.239	
14	Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3.278.864.100	
15	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari	358.110.950	
16	Penganggulungan Kemiskinan	183.000.000	
17	Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.541.031.562	D. Tenaga kerja dan Transmigrasi
18	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Diverifikasi Usaha	175.992.800	
19	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	333.941.300	

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
20	Perlindungan Tenaga Kerja Dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja	523.910.000	
21	Percepatan Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal	240.203.950	
L	Meningkatnya Konektivitas dan aksesibilitas Wilayah	338.235.383.051	
1	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Provinsi	42.673.814.816	D. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi	126.046.032.140	
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Binamargaan	1.092.718.300	
4	Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	160.829.254.184	
5	Peningkatan Dan Pengembangan Jasa Konstruksi	526.000.000	
6	Perencanaan Penataan Ruang	1.168.826.750	
7	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	175.000.000	
8	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perkerataapian	298.982.726	D. Perhubungan
9	Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	310.594.350	
10	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut	643.323.335	
11	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	92.164.000	
12	Peningkatan Pelayanan Angkutan	3.446.609.852	
13	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	932.062.598	
M	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur ECTL	1.958.724.957	
1	Pembinaan Dan Pengembangan Ketenagalistrikan	1.202.804.607	D. ESDM
2	Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Energi	166.900.050	
3	Pengelolaan Mineral Dan Batubara	497.550.500	
4	Perencanaan Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral	91.469.800	
N	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	61.649.161.107	
1	Peningkatan Dan Pengembangan Jasa Konstruksi	572.869.310	D.PSDA
2	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya	36.934.998.480,65	
3	Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku	1.514.122.900	
4	Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai	21.945.640.288,35	

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
5	Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Air Lainnya	681.530.128	
O	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.721.569.436	
1	Pengembangan Perumahan	149.713.246	D. Perumahan
2	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	2.987.439.400	Rakyat, Perkim &
3	Pengelolaan Pertanahan	291.576.550	Pertanahan
4	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota	258.245.400	D. Pekerjaan Umum dan
5	Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi	607.476.140	Penataan Ruang
6	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.229.704.200	
7	Pengelolaan, Pengembangan Dan Konservasi Air Tanah	197.414.500	D.ESDM
P	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.131.097.174	
1	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.122.887.375	D. Lingkungan Hidup
2	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	825.516.799	
3	Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	111.423.000	
4	Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam	880.494.800	
5	Pentaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan	128.347.200	
6	Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan	62.428.000	
Q	Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan	10.789.765.744	
1	Perlindungan Dan Konservasi Sumberdaya Alam	945.491.394	D. Kehutanan
2	Pengendalian Kebakaran Hutan	3.006.970.700	
3	Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	4.270.891.000	
4	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	1.433.102.300	
5	Perhutanan Sosial dan Kemitraan	1.031.780.600	
6	Pemantapan Kawasan Hutan	60.151.250	
7	Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	41.378.500	
R	Menurunnya Risiko Bencana	12.122.062.162	
1	Peningkatan Mitigasi Bencana	802.489.840	BPBD
2	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	5.123.902.393	
3	Pemulihan Daerah Pasca Bencana	1.691.863.097	
4	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebencanaan	4.103.806.832	
5	Penanganan Tanggap Darurat Bencana	400.000.000	
TOTAL		1.924.919.765.042	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut:

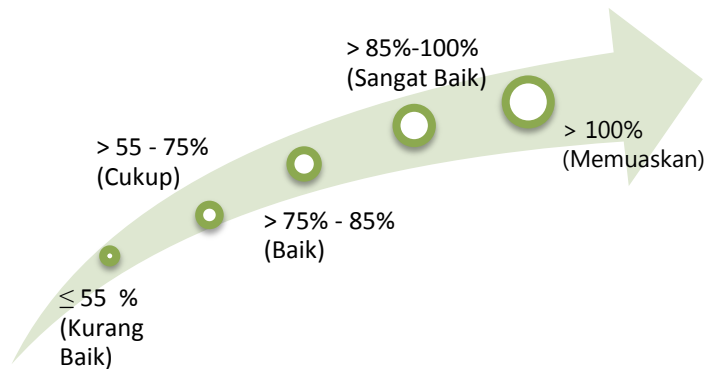
1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(2 \times Target) - Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dikategorikan sebagai berikut:



3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 didasarkan pada indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Dalam dokumen tersebut disajikan 7 tujuan dengan 18 sasaran untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian kinerja dilihat dari capaian target 9 indikator kinerja tujuan dan 23 indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran 9 indikator kinerja tujuan dan 23 indikator kinerja sasaran diuraikan pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
MISI 1	MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAIS, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH“ ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”.				
Tujuan 1.1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks Kerukunan	68,8	64.4	93,60
1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1.1 Indeks Kerukunan	68,8	64.4	93,60
Tujuan 1.2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional	47	41	87,23
1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1.2.1.1 Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional	47	41	87,23

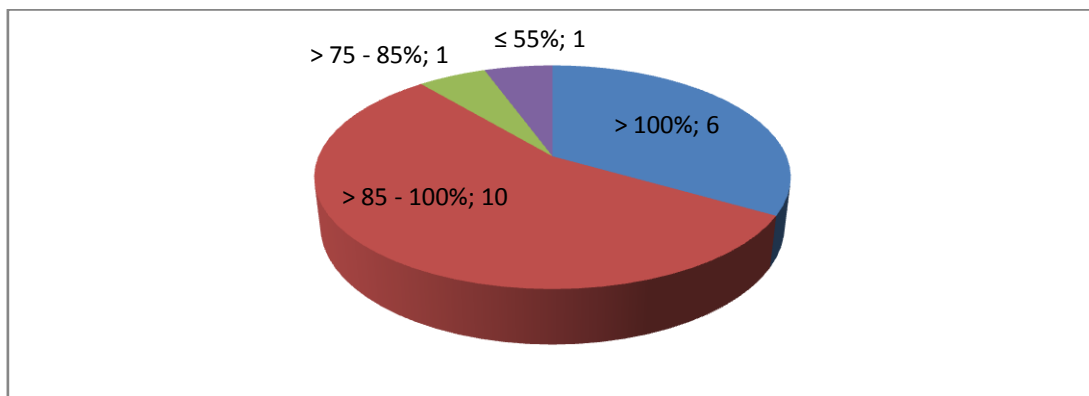
NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
MISI 2	MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL				
Tujuan 2.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	71	66,79	94,07
2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	2.1.1.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		2.1.1.2 Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)	BB (75,89)	97,29
2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	2.1.2.1 Indeks Profesionalitas ASN	54	53,75	99,54
		2.1.2.2 Indeks e-Government	2,9	3,1	106,90
2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.1.3.1 Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik	84,80	90,14	106,30
MISI 3	MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI				
Tujuan 3.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,13	72,39	100,36
3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1 Harapan lama sekolah	14,86	14,01	94,28
		3.1.1.2 Rata-rata lama sekolah	8,85	8,92	100,79
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.1.2.1 Angka Harapan Hidup	69,38	69,31	99,90
MISI 4	MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH				
Tujuan 4.1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,88	-1,6	-27,21
		Indeks Gini	0,328	0.301	108,23
4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	4.1.1.1 Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta)	48,19	44,03	91,37
4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	4.1.2.1 Persentase pertumbuhan investasi	3,83	-8,71	-227,42

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	4.1.3.1 Nilai Ekspor (US\$ Juta)	1365,81	1531,84	112,16
4.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	4.1.4.1 Tingkat Kemiskinan	5,83	6,56	87,48
		4.1.4.2 Tingkat Pengangguran	5,82	6,88	81,79
MISI 5	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN				
Tujuan 5.1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	38	44	115,79
		Rasio Elektrifikasi	99,30	99,33	100,03
5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	5.1.1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	38	44	115,79
5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	5.1.2.1 Rasio Elektrifikasi	99,30	99,33	100,03
5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	5.1.3.1 Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air	65,37	64,20	98,21
5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.1.4.1 Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	54	55,57	102,91
Tujuan 5.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,76	79,33	102,02
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.2.1.1 Indeks Kualitas Air	78	75	96,15
		5.2.1.2 Indeks Kualitas Udara	90	90,39	100,43
5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	5.2.2.1 Indeks Tutupan Hutan	68,4	66,31	96,94

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
5.2.3	Menurunnya risiko bencana	5.2.3.1 Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	75	75	100
Rata-rata Capaian Kinerja					81,08

Berdasarkan tabel di atas diketahui rata-rata pencapaian 18 sasaran strategis tercapai 81,08% termasuk kategori keberhasilan baik. Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dari pencapaian 23 indikator kinerja. Sasaran strategis dengan pencapaian tertinggi adalah sasaran meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah dengan capaian sebesar 115,79%, dan sasaran strategis terendah adalah sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi daerah dengan capaian sebesar -227,42%. Gambaran pencapaian 23 indikator kinerja disajikan pada grafik 7.

Grafik 7 Gambaran pencapaian indikator Kinerja Tahun 2020



Sumber data: Data Diolah

3.3. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian ini akan disajikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perubahan perjanjian kinerja tahun 2020 dalam rangka mencapai Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.



Tujuan 1.1 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama

Kehidupan beragama yang berkualitas dapat menciptakan kehidupan yang aman, nyaman dan damai. Kondisi tersebut dapat tercapai jika masyarakat hidup berdampingan dan saling bertoleransi. Sumatera Barat dengan etnis Minangkabau memiliki komitmen beragama yang sangat tinggi dan relevan dengan Prioritas 1 Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah dalam Kehidupan Masyarakat, dan sangat menghargai perbedaan dan keragaman, sebagaimana adagium, "lamak di awak, katuju dek urang".

Budaya Minang mengandung nilai antara lain kebersamaan, persatuan, gotong royong, sikap keterbukaan dalam menghadapi perbedaan, adanya kearifan lokal Kerapatan Adat Nagari (KAN), adanya pembauran seni dan budaya dengan masyarakat pendatang, serta peran proaktif Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kerukunan, merupakan potensi bagi terciptanya kerukunan umat beragama.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas kehidupan beragama sebagai tujuan pertama yang harus dicapai untuk mewujudkan misi 1. Ketercapaian tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja *indeks kerukunan*. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Indeks kerukunan meliputi nilai toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Indikator toleransi mempresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Perkembangan realisasi indikator kinerja indeks kerukunan tahun 2019-2020 disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Realisasi indikator kinerja tujuan 1.1

Indikator Kinerja	2020	2019
Indeks Kerukunan	64,4*	64,4

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui:

1. Realisasi indeks kerukunan tahun 2020 tercapai 64,4. Angka ini merupakan realisasi indeks kerukunan tahun 2019. Penetapan realisasi indeks kerukunan tahun 2020 berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia, tidak melaksanakan survei mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama baik untuk Indikator Kerukunan Umat beragama secara nasional maupun Indeks Kerukunan Umat

Beragama pada 34 (tiga puluh empat) provinsi, karena seluruh dana survei difocusing untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.

2. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun masih di bawah angka rata-rata Kerukunan Umat Beragama nasional di angka 73,83 tahun 2019. Skor indeks kerukunan umat beragama Sumatera Barat sebesar 64,4 masih tergolong tinggi karena berada di atas angka 60 yang termasuk kategori tinggi.

Dalam mencapai tujuan meningkatnya kualitas kehidupan beragama, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran Strategis 1.1.1

Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama


Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Toleransi merupakan salah satu sikap saling pengertian dan menghargai, tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah agama.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kerukunan antar umat beragama sebagai sasaran yang harus dicapai untuk menciptakan kehidupan beragama berkualitas yang diukur menggunakan indikator indeks kerukunan. Penetapan indeks kerukunan diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Kementerian

Agama dengan menggunakan indikator nilai toleransi, kesetaraan dan kerjasama diantara umat beragama.

Nilai indeks kerukunan tertinggi adalah 100 dengan kategori sangat rukun. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan target indeks kerukunan selalu meningkat setiap tahunnya. Dengan mempertimbangkan nilai indeks kerukunan tahun 2017 sebesar 67, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan indeks kerukunan tercapai 73,4 (kategori rukun) di tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021. Untuk tahun 2020, indeks kerukunan ditargetkan akan tercapai 68,8. Penetapan target ini dengan mempertimbangkan target indeks kerukunan pada dokumen perencanaan dan indeks kerukunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 (64,44). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, target tahun 2020 ditetapkan meningkat 4,4. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama diuraikan pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Pencapaian Sasaran Strategis 1.1.1

	Target	Realisasi	Capaian
 Indeks Kerukunan	68,8	64,44	93,60

Indikator kinerja indeks kerukunan target 68,8 terealisasi 64,44 dengan tingkat capaian sebesar 93,60% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Realisasi indek kerukunan tahun 2020 diukur berdasarkan realisasi indeks kerukunan tahun 2019 yang diperoleh dari hasil survei Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Kementerian Agama. Hal ini dikarenakan Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia tidak melaksanakan survei mengukur indeks kerukunan umat beragama baik untuk indikator kerukunan umat beragama secara nasional maupun indeks kerukunan

umat beragama pada 34 (tiga puluh empat) provinsi, karena seluruh dana survei difocusing untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Dengan indeks kerukunan sebesar 64,4, masyarakat Sumatera Barat berada pada kategori hidup rukun sebagaimana disajikan pada tabel kategori berikut ini:

Tabel 3. 4 Kategori Indeks Kerukunan

No	Range Indeks	Level/Kategori
1	0 – 20	Sangat Tidak Rukun
2	21 – 40	Tidak Rukun
3	41 – 60	Rukun Tingkat Sedang
4	61 – 80	Rukun
5	81 – 100	Sangat Rukun

Capaian indikator kinerja indeks kerukunan sebesar 93,60% diukur dengan menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kerukunan tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Kerukunan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks Kerukunan	64,44	64,44	93,60	95,83	73,4

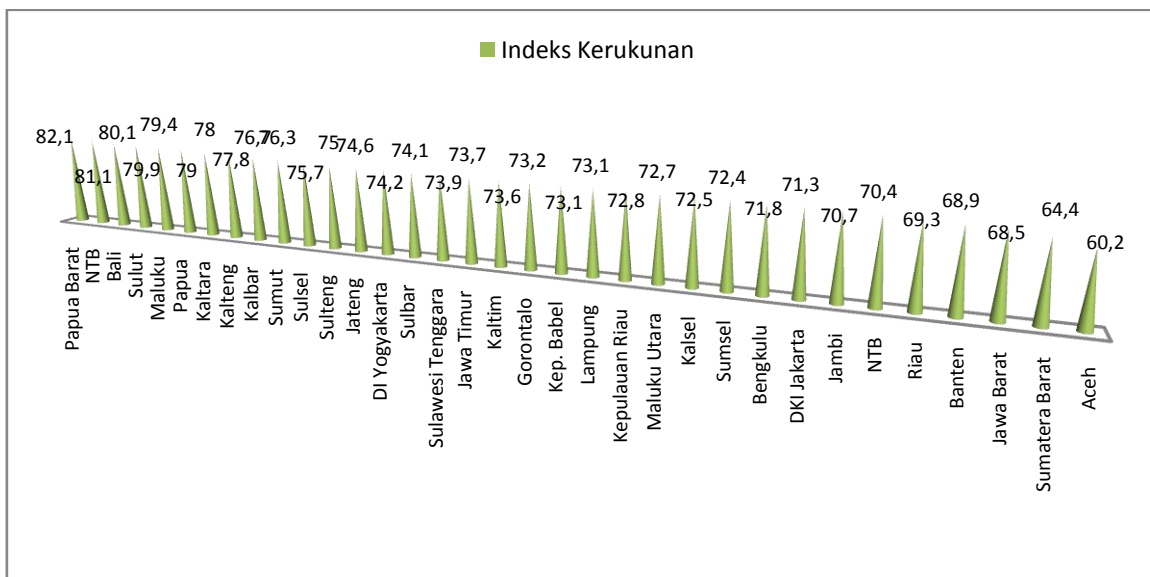
Dikarenakan realisasi indeks kerukunan yang digunakan adalah realisasi tahun 2019, maka realisasi 2020 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2019. Untuk capaian kinerjanya tahun 2019-2020 menunjukkan tren negatif dengan penurunan sebesar 2,23%.

Untuk tahun 2021, indeks kerukunan ditargetkan sebesar 73,4% atau meningkat 9% dari realisasi tahun 2020. Realisasi tahun 2020 sebesar 64,4% menunjukkan pencapaian sebesar 87,74% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan realisasi dari tahun 2018-2019, upaya yang

optimal dan konsisten serta kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tahun 2021.

Untuk perbandingan dengan Nasional dan Provinsi lain di Indonesia, angka indeks kerukunan yang bisa dibandingkan adalah indeks kerukunan tahun 2019. Untuk tahun 2019, 18 Provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat mempunyai indeks kerukunan di bawah rata-rata indeks kerukunan Nasional (73,83). Dari 34 Provinsi di Indonesia, Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat 33 secara nasional. Indeks kerukunan 34 provinsi di Indonesia tergambar pada grafik 8.

Grafik 8 Indeks Kerukunan Provinsi di Indonesia Tahun 2019



Sumber data: Balitbang Kemenag

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kerukunan umat beragama antara lain:

1. Mencegah terjadinya konflik dalam kelompok masyarakat yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dengan cara meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, memelihara kondisi damai dalam masyarakat dan mengembangkan sistem penyelesaian secara

damai. Selama tahun 2020, ada 33 potensi konflik dan hanya 1 konflik yang menimbulkan bentrokan atau kekerasan di tengah masyarakat.

2. Berperannya tim dan forum-forum strategis Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Kominda, Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Salah satu peran dari tim tersebut adalah menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Hal yang menjadi penghambat rendahnya indeks kerukunan di Sumatera Barat antara lain:

1. Belum optimalnya peran forum-forum strategis dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.
2. Tingkat homogenitas agama di Sumatera Barat $\pm 95\%$ penduduk di Sumatera Barat beragama islam. Untuk provinsi yang heterogen cenderung memiliki nilai indeks kerukunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang homogen.
3. Sumatera Barat mempunyai banyak aturan dan Perda terkait syariah agama tersebut seperti aturan tentang pemakaian jilbab dan baca alquran.
4. Identitas budaya di Sumatera Barat yang sangat kental dengan nilai-nilai islam sebagaimana falsafahnya "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya pencegahan konflik bernuansa SARA di masyarakat.
2. Mengoptimalkan peran dari tim dan forum-forum strategis dalam menangani permasalahan atau gangguan di masyarakat sehingga tidak menimbulkan bentrokan dan kekerasan.
3. Memberikan pembekalan dan sosialisasi bagi pelajar dan generasi muda sehingga memahami nilai-nilai toleransi dan saling menghormati.
4. Meningkatkan peran dari tokoh-tokoh masyarakat dalam menjaga toleransi dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dengan pihak keamanan yang lainnya serta tokoh masyarakat setempat dalam mencegah konflik, menghentikan konflik dan memulihkan kondisi pascakonflik.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama adalah Rp. 18.060.569.901,-. Anggaran ini tersebar pada 14 program yaitu program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan (7 kegiatan), program pendidikan politik masyarakat (4 kegiatan), program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) (1 kegiatan), program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (8 kegiatan), program pencegahan, penanganan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba (1 kegiatan), program peningkatan perlindungan masyarakat (1 kegiatan), program pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (10 kegiatan), program pencegahan dan pemberantasan maksiat (2 kegiatan), program peningkatan penegakan peraturan daerah dan pemberdayaan PPNS (3 kegiatan), program pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur (1

kegiatan), program pemetaan daerah rawan kebakaran (1 kegiatan), program peningkatan pelayanan kehidupan beragama (1 kegiatan), program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamatan, dan pengembangan nilai-nilai agama (6 kegiatan), program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan (2 kegiatan). Pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 18.060.569.901,- terealisasi Rp. 16.806.916.214,- atau 93,06%. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1.253.653.687 (6,94%). Efisiensi tertinggi berasal dari pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur yang realisasi anggarannya < 90% yaitu sebesar 87,97%. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama 93,60% dengan realisasi anggaran sebesar 93,06% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0.54%.

Tujuan 1.2 Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan

Provinsi Sumatera Barat merupakan Provinsi yang kaya akan budaya yang harus dilestarikan. Kekayaan budaya Sumatera Barat meliputi bahasa, adat istiadat, kesenian tradisional, pakaian tradisional, dan warisan budaya lainnya. Pelestarian budaya merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk Pembangunan kebudayaan. Selain upaya pelestarian, pelaksanaan gelar seni budaya, pemberdayaan, pengembangan, dan pemanfaatan seni-budaya untuk kesejahteraan masyarakat juga harus dilakukan untuk pembangunan kebudayaan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan terpelihara dan berkembangnya kebudayaan sebagai tujuan yang diukur

dengan jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional. Perkembangan jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional diuraikan pada tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Realisasi indikator kinerja tujuan 1.2

Indikator Kinerja	2020	2019
Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara Nasional	41	33

Berdasarkan tabel 3.6 dapat diketahui:

1. Sampai dengan tahun 2020, sebanyak 41 warisan budaya Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan secara nasional.
2. Selama tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap 34 karya/warisan budaya yang diusulkan untuk ditetapkan oleh Nasional. Akan tetapi, dikarenakan kondisi pandemi di tahun 2020, baru 8 warisan budaya yang ditetapkan oleh Nasional. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan tahun 2019, ada penambahan 8 warisan budaya yang telah ditetapkan secara nasional di tahun 2020.
3. Dengan peningkatan di tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa tujuan tersebut belum tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini salah satunya dikarenakan faktor eksternal yang tidak menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam mencapai tujuan terpelihara dan berkembangnya kebudayaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 1 sasaran strategis yaitu meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:




Sasaran Strategis 1.2.1 **Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya**

Kekayaan Budaya Sumatera Barat yang meliputi bahasa, adat istiadat, kesenian tradisional, pakaian tradisional, dan warisan budaya lainnya perlu dilestarikan. Pelestarian kebudayaan merupakan salah satu yang harus dilakukan dalam hal pembangunan kebudayaan. Dengan beranekaragamnya kebudayaan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya sebagai sasaran strategis yang harus diwujudkan untuk mencapai tujuan terpelihara dan berkembangnya kebudayaan. Ketercapaian sasaran tersebut diukur menggunakan indikator kinerja jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional.

Warisan budaya terbagi dua yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda (cagar budaya) terdiri dari warisan budaya bergerak, tidak bergerak dan bawah laut. Warisan budaya tak benda adalah berupa nilai-nilai (abstrak). Sebelum warisan budaya benda diusulkan untuk menjadi peringkat nasional maka terlebih dahulu harus dijadikan warisan budaya benda peringkat provinsi. Sedangkan warisan budaya tak benda cukup dalam bentuk rekomendasi saja.

Untuk tahun 2020, jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional di targetkan 47 warisan budaya. Target ini merupakan target akumulasi yang ditetapkan mengacu pada target tahun ke 5 dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, target tahun 2020 ditetapkan bertambah sebanyak 14 warisan budaya. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya diuraikan pada tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 1.2.1

	Target	Realisasi	Capaian
 Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional	47	41	87,23

Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional target 47, terealisasi 41 dengan tingkat capaian 87,23% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selama tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap 34 karya/warisan budaya yang diusulkan untuk ditetapkan oleh Nasional. Akan tetapi, dikarenakan kondisi pandemi di tahun 2020, baru 8 warisan budaya yang ditetapkan oleh Nasional. Oleh karena itu, sampai dengan tahun 2020 jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional menjadi 41 warisan budaya. Adapun warisan budaya Sumatera Barat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai tahun 2020 diuraikan pada tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Warisan Budaya Sumatera Barat yang ditetapkan secara nasional sampai 2020

No	Nama Karya Budaya	Tahun Penetapan	Lokasi Karya Budaya
1	Randang	2013	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
2	Sistem Matrilineal	2013	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
3	Tabuik	2013	Kab. Padang Pariaman Kota Pariaman
4	Rumah Gadang	2013	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
5	Indang Piaman	2014	Kab. Padang Pariaman Kota Pariaman
6	Kaba Cindua Mato	2014	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
7	Ronggeng Pasaman	2014	Kab. Pasaman dan Kab Pasaman Barat
8	Silek Minang	2014	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
9	Songket Pandai Sikek	2014	Kab. Tanah Datar

No	Nama Karya Budaya	Tahun Penetapan	Lokasi Karya Budaya
10	Tari Toga	2014	Siguntur, Kab Dharmasraya
11	Tato Mentawai	2014	Kab Kepulauan Mentawai
12	Ulu Ambek	2015	Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman
13	Rabab	2015	Solok Selatan, Pesisir Selatan, Pariaman,
14	Selawat Dulang	2015	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
15	Pasambahan	2015	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
16	Batombe	2015	Kab. Solok Selatan
17	Tari Tanduak	2016	Lubuak Tarok Kab Sijunjung
18	Tari Piriang	2016	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
19	Randai	2017	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
20	Bahasa Tansi	2018	Kota Sawahlunto
21	Babiola	2019	Kab. Pesisir Selatan
22	Tari Benten	2019	Kab. Pesisir Selatan
23	Sikambang Manih	2019	Kab. Pesisir Selatan
24	Tari Kain	2019	Kab. Pesisir Selatan
25	Anak Balam	2019	Kab. Pesisir Selatan
26	Patang Balimau	2019	Kab. Pesisir Selatan
27	Badampiang	2019	Kab. Pesisir Selatan
28	Batatah	2019	Kab. Pasaman
29	Diki Pano	2019	Kab. Pasaman
30	Talempong Unggan	2019	Kab. Sijunjung
31	Sikerei	2019	Kab. Kepulauan Mentawai
32	Arak Bako	2019	Kota Solok
33	Songket Silungkang	2019	Kota Sawahlunto
34	Basafa	2020	Kota Pariaman
35	Marosok	2020	Sumatera Barat
36	Uma Silaoinan	2020	Kab. Kepulauan Mentawai
37	Tari Balanse Madam	2020	Kota Padang
38	Tradisi Mato, Sistem Bagi Hasil Rumah Makan Minang	2020	Sumatera Barat
39	Baju Kurung Basiba	2020	Sumatera Barat
40	Pacu Jawi	2020	Kab. Tanah Datar
41	Pacu Itiak	2020	Kota Payakumbuh

Sumber data: Dinas Kebudayaan Prov Sumbar

Capaian indikator kinerja Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional sebesar 87,23% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi indikator kinerja jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.9.

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Jumlah Warisan budaya yang ditetapkan secara nasional	41	33	87,23	100	63

Realisasi jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator ini tercapai <100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi peningkatan jumlah warisan budaya sebanyak 8 warisan budaya yang ditetapkan nasional di tahun 2020. Walaupun selama tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengusulkan 34 warisan budaya untuk ditetapkan nasional. Untuk capaian kinerja tahun 2019-2020 menunjukkan tren negatif dengan penurunan sebesar 12,77%.

Untuk tahun 2021, jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional ditargetkan menjadi 63 warisan budaya atau meningkat 22 dibandingkan kondisi di tahun 2020. Realisasi tahun 2020 menunjukkan pencapaian 65,08% dibandingkan dengan target tahun 2021. Dengan memperhatikan jumlah usulan Provinsi ke Nasional yang masih belum ditetapkan di tahun 2020, target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Secara nasional sampai tahun 2020, sebanyak 1239 warisan budaya dari 34 Provinsi di Indonesia telah ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari 1239 warisan budaya tersebut 41 warisan budaya (3,31%) berasal dari Provinsi Sumatera Barat.

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya antara lain:

1. Inventarisasi karya budaya dan pengusulan karya budaya benda tak benda untuk pencatatan dan penetapan karya budaya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pelestarian budaya.
3. Pembinaan terhadap lembaga adat, seni dan budaya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan diskusi dengan seniman dan budayawan.
4. Pelestarian 1000 Cagar Budaya koleksi museum Adityawarman
5. Mengedukasi pengunjung yang datang ke museum Adityawarman sebagai bentuk pengembangan pendidikan budaya.
6. Revitalisasi museum Adityawarman.
7. Pemberdayaan pemangku adat sehingga pemangku adat mengetahui tugas dan fungsinya dan bisa mengaplikasikannya di kaumnya masing-masing.

Peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya di Provinsi Sumatera Barat masih menemui hambatan. Hambatan tersebut antara lain:

1. Masih belum memadainya inventarisir data kebudayaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat.
3. Semakin menurunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah.
4. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya.

Upaya pelestarian nilai-nilai budaya di masa yang akan datang antara lain:

1. Mengoptimalkan inventarisir data kebudayaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
2. Mengenalkan nilai-nilai budaya sejak dini melalui jenjang pendidikan.
3. Menggunakan atribut/warisan budaya Sumatera Barat pada event-event nasional dan lokal.
4. Mengoptimalkan inventarisir aset-aset budaya.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya adalah Rp 16.242.888.597,-. Anggaran ini tersebar pada 5 program yaitu program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga-lembaga adat, seni dan budaya (1 kegiatan), program pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya (3 kegiatan), program pengembangan dan penguatan nilai budaya (5 kegiatan), program pengelolaan kekayaan budaya (12 kegiatan), program peningkatan diplomasi seni dan budaya (5 kegiatan). Pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya.

Dari jumlah anggaran Rp 16.242.888.597,- terealisasi Rp. 14.078.781.767,- atau 86,68%. Artinya terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.164.106.830,- (13,32%). Efisiensi tertinggi berasal dari pelaksanaan program pengembangan dan penguatan nilai budaya yang realisasi anggarannya < 90% yaitu sebesar 82,97%. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya 87,23% dengan realisasi anggaran sebesar 86,68% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0.55%.

Misi 2

MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL

Tujuan 2.1 Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 menempatkan peningkatan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional menjadi salah satu misi untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera". Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan peningkatan tata pemerintah yang baik, bersih dan profesional adalah dengan mempercepat penerapan reformasi birokrasi agar dapat merubah perilaku birokrasi yang lebih profesional, bertanggung jawab, efisien, dan efektif, serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi saat ini diharapkan mampu merubah pola pikir dan perilaku birokrasi yang sudah ada. Meskipun perkembangannya kurang signifikan, namun perubahan dari tahun ke tahun selalu ada. Perubahan tersebut ditandai dengan kenaikan indeks reformasi birokrasi.

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai melaksanakan Reformasi Birokrasi pada tahun 2011 dengan mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 Tentang "Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015". Selanjutnya untuk periode kedua tahun 2016-2021 diatur oleh Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 065 Tahun 2016, yang direvisi dengan Peraturan

Gubernur Nomor 121 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 065 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi.

Penerapan Reformasi birokrasi selama kurang lebih dua periode belum memberi hasil yang optimal, meskipun Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan.

Untuk mewujudkan peningkatan tata pemerintah yang baik, bersih dan profesional maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi menjadi tujuan yang harus dicapai. Ketercapaian tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Penetapan indeks reformasi birokrasi didasarkan pada hasil evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada $n-1$.

Penilaian penerapan reformasi birokrasi tahun 2020 mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Penilaian reformasi birokrasi dilakukan 2 tahap yaitu:

1. Tahap Pertama, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB), dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah itu sendiri beserta unit kerja di dalamnya. Penilaian PMPRB meliputi penilaian pada komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, meliputi delapan area perubahan. Sedangkan komponen hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit, meliputi tiga hal yaitu kapasitas dan

akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta pelayanan publik.

2. Tahap Kedua adalah proses verifikasi PMPRB juga dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau tim yang ditugaskan oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).

Nilai indeks reformasi birokrasi tertinggi adalah 100 dengan prediket istimewa. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan target indeks reformasi birokrasi yang selalu meningkat setiap tahunnya agar bisa mencapai nilai/prediket tertinggi (istimewa) tersebut. Dengan mempertimbangkan nilai indeks reformasi birokrasi tahun 2016 sebesar 62,87, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan indeks reformasi birokrasi tercapai 75 (kategori baik/BB) di tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021. Untuk tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan 71. Penetapan target Indeks Reformasi Birokrasi mengacu pada target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2019 (65,63), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 5,37. Pencapaian tujuan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi tergambar pada tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2.1

	Target	Realisasi	Capaian
 <p>Indeks Reformasi Birokrasi</p>	71	66,79	94,07

Indikator kinerja indeks reformasi birokrasi target 71, terealisasi 66,79 dengan tingkat capaian sebesar 94,07% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja indeks reformasi birokrasi tahun 2020 diukur berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:B/321/M.RB.06/2019 tentang hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019. Indeks Reformasi Birokrasi 66,79 termasuk kategori B (Cukup Baik). Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disajikan pada tabel 3.11.

Tabel 3. 11 Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2019
I	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5	2	2,86
2	Penataan Peraturan PerUUan	5	2,09	2,40
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	1,66	1,74
4	Penataan Tatalaksana	5	2,95	3,01
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	12,23	11,61
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3,73	3,85
7	Penguatan Pengawasan	12	5,42	5,55
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	3,57	3,77
	Total Komponen Pengungkit (A)	60	33,65	34,79
II	Komponen Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	10,21	10,47
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6	4,08	4,35
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	6,14	5,83
4	Opini BPK	3	3	3
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	8,55	8,35
	Total Komponen Hasil (B)	40	31,98	32
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	65,63	66,79

Sumber data: KemenPAN dan RB

Indeks reformasi birokrasi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,16 dibandingkan dengan indeks reformasi birokrasi tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan misi 2 belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun 2020.

Dari hasil penilaian reformasi Birokrasi tahun 2020 diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi terhadap 8 komponen pengungkit menunjukkan 7 komponen mengalami kemajuan dan 1 komponen mengalami kemunduran. Komponen pengungkit yang mengalami kemunduran adalah Penataan Sistem Manajemen SDM. Hal ini disebabkan perubahan persyaratan penilaian yang belum dapat dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat.
2. Hasil evaluasi terhadap 5 komponen hasil menunjukkan 3 komponen mengalami kemajuan dan 2 komponen mengalami kemunduran (survei eksternal persepsi korupsi dan survei eksternal pelayanan publik).

Capaian indikator kinerja indeks reformasi birokrasi sebesar 94,07% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks reformasi birokrasi tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.12.

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi	66,79	65,63	94,07	92,44	75

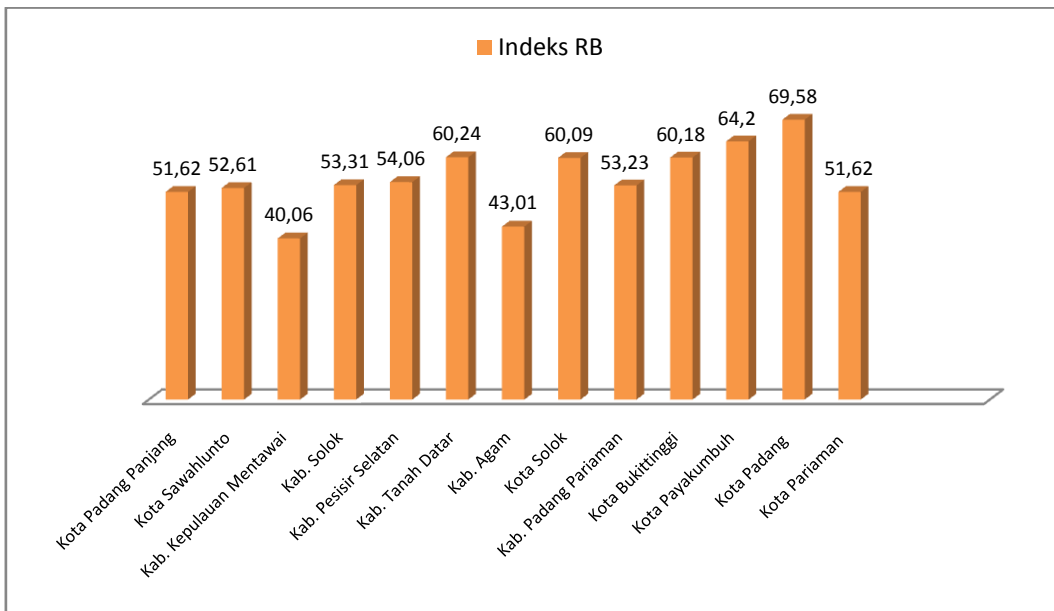
Indeks reformasi birokrasi tahun 2020 adalah 66,79, tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya <100%. Akan tetapi, dibandingkan dengan tahun 2019 indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan 1,16. Peningkatan 1,16 tersebut berasal dari peningkatan nilai pada 7 komponen pengungkit dan 3 komponen hasil. Peningkatan realisasi juga sejalan dengan peningkatan capaian kinerja indeks reformasi birokrasi tahun 2019-2020.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan perolehan indeks reformasi birokrasi tahun 2021 adalah 75 kategori BB (Baik) atau meningkat 8,21 dari

indeks reformasi birokrasi tahun 2020. Dibandingkan dengan peningkatan di tahun 2020, target tahun 2021 dinilai terlalu tinggi sehingga penetapan target tahun 2021 akan dikaji/disempurnakan kembali.

Implementasi reformasi birokrasi pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang dilihat dari Indeks reformasi birokrasi Kabupaten/Kota menunjukkan masih ada 6 Kabupaten/kota yang belum melaksanakan penilaian mandiri terhadap PMPRB yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten 50 kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Sijunjung. Dengan demikian, baru 13 kabupaten/kota (68,42%) yang dinilai implementasi reformasi birokrasinya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2020 (berdasarkan hasil evaluasi tahun 2019) disajikan pada grafik 9.

Grafik 9 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota se Sumatera Barat



Sumber data: Data diolah

Dari evaluasi reformasi birokrasi tahun 2019 terhadap 34 Provinsi di Indonesia diketahui bahwa 1 Provinsi yang memperoleh indeks reformasi birokrasi

predikat A, 4 Provinsi memperoleh indeks reformasi birokrasi predikat BB, 20 Provinsi memperoleh indeks reformasi birokrasi predikat B dan 9 Provinsi memperoleh indeks reformasi birokrasi predikat CC. Provinsi Sumatera Barat termasuk dari 20 Provinsi yang indeks reformasi birokrasinya baik (predikat B).

Capaian Indeks reformasi birokrasi sebesar 94,07% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Pencapaian ini didukung oleh upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Mereview Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2016-2021 sebagai acuan dalam merumuskan kerangka kerja Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2026.
2. Menyusun rencana aksi untuk 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
3. Memfasilitasi dan mengevaluasi rancangan produk hukum daerah
4. Melakukan evaluasi dan menyesuaikan kelembagaan dengan merevisi Peraturan Daerah dan Menyesuaikan Pergub tentang Rincian Tugas
5. Melakukan pendataan 62 jabatan struktural yang akan dialihkan ke jabatan fungsional
6. Menyusun Peta Proses Bisnis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 065-421-2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Membangun aplikasi untuk tambahan penghasilan pegawai yang akan terintegrasi dengan aplikasi kinerja dan absensi online.
8. Pemprov Sumbar sedang menyusun Standar Kompetensi Jabatan untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
9. Pemprov Sumbar dalam Proses penyusunan Dokumen *Human Capital Development Plan* (HCDP)

10. Menyempurnakan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
11. Menyusun dokumen rencana aksi pencapaian indikator kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
12. Mengembangkan kembali aplikasi e-SAKIP sesuai dengan kebutuhan. aplikasi SAKIP digunakan untuk memonitor/pengawasan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
13. Menyusun Peraturan Gubernur No 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
14. Menetapkan, Pembinaan, monev, evaluasi dan penilaian Unit Kerja yang ditetapkan sebagai pilot project ZI WBK/WBBM dan mengusulkan ke TPN Kemenpan RB.
15. Mengoptimalkan penerapan SPIP.
16. Komitmen pemerintah Sumbar agar ASN bekerja sesuai dengan kode etik kerja dengan adanya Pergub Nomor 22 tahun 2019.
17. Mengupayakan ASN memiliki perencanaan kerja individu yg jelas, dengan membuat perjanjian kerja dalam bentuk Perjanjian kinerja dan SKP.

Kelemahan/kendala yang dihadapi dalam penerapan reformasi birokrasi di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut;

1. Masih rendahnya komitmen pimpinan terhadap perlunya melaksanakan reformasi birokrasi.
2. Kesulitan merubah *mindset* aparatur yang masih ingin dilayani bukannya ingin melayani.
3. Belum maksimalnya penerapan manajemen kinerja
4. Masih rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran.

Untuk peningkatan implementasi reformasi birokrasi di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk:

1. Memaksimalkan koordinasi dengan unsur dari Bappeda, Inspektorat daerah dan OPD pengampu 8 area Perubahan Reformasi Birokrasi.
2. Memaksimalkan peran tim pokja dari masing-masing area perubahan.
3. Memperbaiki kualitas pelayanan publik.
4. Menggunakan aplikasi e-kinerja untuk mengukur kinerja masing-masing ASN berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai.
5. Memaksimalkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Menyusun anggaran berdasarkan kinerja yang ingin dicapai.

Untuk mencapai tujuan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi telah ditetapkan 3 sasaran strategis Reformasi Birokrasi. Hal ini sesuai dengan sasaran yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 3 sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran Strategis 2.1.1 **Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**



Birokrasi yang bersih ditandai dengan adanya kejujuran, keadilan, kewajaran, transparansi, dan profesionalisme dalam bekerja dan dalam pengadaan barang dan jasa. Sementara birokrasi yang akuntabel adalah birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* dengan memperhatikan pemanfaatan sumber daya

yang ada secara efisien dan profesional. Akuntabilitas kinerja merupakan garda depan menuju *good governance*. Akuntabilitas kinerja berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara dengan sebaik-baiknya. Perubahan *mindset* dan *culture-set* penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) dan inilah titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel sebagai sasaran pertama yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi. Untuk melihat apakah birokrasi yang bersih dan akuntabel sudah diterapkan di Provinsi Sumatera Barat, digunakan dua indikator yang dijadikan alat ukur yaitu opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dan Nilai evaluasi SAKIP untuk mengetahui penerapan akuntabilitas kinerja di daerah.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel disajikan pada tabel 3.13.

Tabel 3. 13 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.1

	Target	Realisasi	Capaian
 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
 Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)	BB (75,89)	97,29
	Rata-rata Capaian		98,65

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah sebesar 98,65% termasuk kategori

keberhasilan sangat baik. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah sebagai berikut:

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah merupakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disusun dengan menggunakan sistem tata kelola yang baik dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Laporan keuangan dikatakan wajar jika bebas dari salah saji material. Penilaian wajar atau tidaknya laporan keuangan diberikan oleh auditor independen dalam bentuk laporan audit. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor independen pemerintah memberikan penilaian atas kewajaran informasi yang disajikan dalam dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ada 4 jenis opini yang akan diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat dan Tidak Wajar. Opini WTP merupakan penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan yang menjamin bahwa informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Capaian opini WTP bagi Pemerintah Daerah sebagai bukti perwujudan keberhasilan atas tata kelola keuangan yang baik. Capaian opini WTP merupakan salah satu kriteria yang menunjukkan kinerja keuangan sebagai penentu kelayakan daerah dalam menerima dana insentif daerah.

Sejak tahun 2013, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memperoleh Opini WTP. Dikarenakan opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap instansi Pemerintah yang pengelolaannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka di tahun

2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan untuk tetap mempertahankan opini WTP di tahun 2020.

Opini BPK terhadap laporan keuangan ditargetkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), terealisasi WTP dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi opini BPK terhadap Laporan keuangan didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun 2020 Nomor LHP. No. 29. A/LHP/XVIII.PDG/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapat *Opini Wajar Tanpa Pengecualian*.

Sama halnya dengan Provinsi Sumatera Barat, 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat juga memperoleh opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi ini menunjukkan peningkatan karena untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018, masih ada 1 kabupaten/kota yang memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Capaian indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan sebesar 100% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.14.

Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	100%	WTP

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah WTP. Opini WTP ini sudah diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Capaian indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2019-2020 menunjukkan nilai yang sama yaitu 100% yang berarti realisasi tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Untuk tahun 2021, ditargetkan tetap mempertahankan opini WTP. Dengan mempertimbangkan realisasi dari tahun 2013-2020 dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, target tahun 2021 optimis dapat dicapai dengan strategi yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2020.

Perolehan Opini WTP tidak lepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Administrasi Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah dan semua OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempertahankan Opini BPK terhadap LKPD tahun 2019. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Secara konsisten melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja, kas daerah, pembiayaan dan dana perimbangan antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bendahara Umum Daerah, Bank Nagari dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. Secara konsisten melaksanakan rekonsiliasi angka aset tetap, aset lainnya, investasi jangka panjang dan hutang antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Meningkatkan pemahaman aparatur pengelola keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Update aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIPKD).
5. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi penyelesaian masalah aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
7. Melaksanakan pendampingan dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan pemenuhan data pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan baik.
8. Menyelesaikan tindaklanjut hasil pemeriksaaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah tahun sebelumnya.

Adapun faktor penghambat untuk mempertahankan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah adalah

- a. Peraturan perundang-undangan, sistem dan mekanisme tata kelola keuangan, yang meliputi penatausahaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD.
- b. Kurang maksimalnya koordinasi dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan laporan keuangan serta penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan aset daerah.
- c. Adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan lainnya pada tahun berjalan tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi.

- d. Masih adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan Laporan Keuangan dan penerapan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- e. Kendala dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan.

Upaya untuk mempertahankan opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat:

- a. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintahan.
- b. Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- c. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadinya kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
- d. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian intern pemerintah daerah
- e. Meningkatkan pengawasan pada hal-hal yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pelaksanaan audit yang terfokus pada pembinaan dan pendampingan.
- f. Menyelesaikan tindak lanjut dari BPK-RI dan menyikapi rekomendasi BPK yang tertuang dalam surat Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat TA 2019 agar kedepannya dapat

meminimalisir kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan sehingga opini BPK yaitu WTP di masa mendatang dapat dipertahankan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan keuangan adalah Rp. 23.510.745.250,-. Anggaran ini tersebar pada 12 program yaitu program implementasi penanganan pengaduan (1 kegiatan), program peningkatan fungsi pengawasan dan penegakkan hukum (11 kegiatan), program peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah (5 kegiatan), program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (5 kegiatan), program peningkatan kualitas pengelolaan keuangan (15 kegiatan), program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota (3 kegiatan) program peningkatan pendapatan daerah (6 kegiatan), program kerjasama pembangunan (5 kegiatan), program peningkatan manajemen pemerintah daerah (2 kegiatan), program pengembangan data dan informasi pembangunan (1 kegiatan), peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemda (8 kegiatan), program administrasi kewilayahan pemerintahan daerah (3 kegiatan). Pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.

Dari jumlah anggaran Rp. 23.510.745.250,- terealisasi Rp. 22.107.682.184,- atau 94,03%. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.403.063.066 (5,97%). Efisiensi tertinggi berasal dari pelaksanaan program implementasi penanganan pengaduan dan program peningkatan pendapatan daerah yang realisasi anggarannya <90%. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 94,03% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 5,97%.

2. Nilai Evaluasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Implementasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi komponen akuntabilitas dan nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nilai hasil evaluasi SAKIP tertinggi adalah kategori AA dengan rentang nilai (> 90 – 100). Sejak tahun 2016, Provinsi Sumatera Barat telah memperoleh nilai hasil SAKIP kategori sangat baik (BB). Sampai tahun 2020, nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih bertahan pada kategori BB dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya.

Nilai evaluasi SAKIP tertinggi adalah kategori AA dengan rentang nilai (> 90 – 100). Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan target nilai evaluasi SAKIP selalu meningkat setiap tahunnya sampai diperoleh nilai yang tertinggi. Dengan mempertimbangkan nilai evaluasi SAKIP tahun 2016 sebesar 71,72, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan nilai evaluasi SAKIP kategori A (80,01) di tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021. Untuk tahun 2020, nilai evaluasi SAKIP yang ditargetkan untuk tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah 80,01 (kategori A). Akan tetapi dengan mempertimbangkan nilai evaluasi tahun 2019 (75,89) dan peningkatan nilai

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019), target tahun 2020 ditetapkan masih BB dengan nilai 78.

Nilai evaluasi SAKIP tahun 2020 ditargetkan BB (78), terealisasi BB (75,89) dengan tingkat capaian 97,29% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi nilai evaluasi SAKIP tahun 2020 diukur berdasarkan nilai evaluasi SAKIP tahun 2019. Hal ini dikarenakan, sampai laporan ini selesai disusun, nilai evaluasi SAKIP tahun 2020 masih belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nilai evaluasi SAKIP tahun 2019 dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/187/M.AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019. Rincian nilai evaluasi SAKIP tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Rincian Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2020

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,95
2	Pengukuran Kinerja	25	17,73
3	Pelaporan Kinerja	15	11,70
4	Evaluasi Internal	10	7,66
5	Capaian Kinerja	20	13,85
Nilai Hasil Evaluasi		100	75,89
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Hasil evaluasi akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dengan nilai 75,89 (Prediket BB) didukung dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Nomor: 13/Insp-LHE/IV-2020 menunjukkan dari 50 OPD yang dievaluasi ada 4 PD yang memperoleh nilai A (8%), 25 PD memperoleh nilai BB (50%), 20 PD memperoleh nilai B (40%), 1 PD memperoleh nilai CC (2 %)

Untuk nilai evaluasi SAKIP 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat di tahun 2019 sebanyak 3 kabupaten/kota memperoleh nilai BB (15,79%), 12 Kabupaten/Kota memperoleh nilai B dan 4 kabupaten/kota masih bernilai CC. Ada 3 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang telah berhasil memperoleh nilai B di tahun 2019 yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung dan Kota Padang Panjang. Gambaran nilai evaluasi SAKIP kabupaten/kota se Sumatera Barat diuraikan pada tabel 3.16.

Tabel 3. 16 Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Prediket Nilai
1	Kota Payakumbuh	BB
2	Kota Padang	BB
3	Kota Bukittinggi	BB
4	Kota Padang Panjang	B
5	Kota Sawahlunto	B
6	Kabupaten Kepulauan Mentawai	B
7	Kabupaten Dharmasraya	B
8	Kabupaten Solok	B
9	Kabupaten Pesisir Selatan	B
10	Kabupaten Tanah Datar	B
11	Kabupaten Agam	B
12	Kota Solok	B
13	Kabupaten Padang Pariaman	B
14	Kabupaten Pasaman	B
15	Kabupaten Sijunjung	B
16	Kabupaten Pasaman Barat	CC
17	Kabupaten Solok Selatan	CC
18	Kabupaten Limapuluh Kota	CC
19	Kota Pariaman	CC

Sumber data: Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2019

Capaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP sebesar 97,29% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.17.

Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Nilai evaluasi SAKIP

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Nilai evaluasi SAKIP	BB (75,89)	BB (75,89)	97.29	97.29	A (80.01)

Dikarenakan realisasi yang digunakan di tahun 2020 adalah realisasi nilai evaluasi SAKIP 2019 maka realisasi dan capaian kinerja indikator ini tahun 2019-2020 tidak bisa dibandingkan.

Untuk tahun 2021, ditargetkan nilai evaluasi SAKIP A (80,01). Dengan mempertimbangkan realisasi 2019-2020, Provinsi Sumatera Barat harus meningkatkan nilai sebanyak 4,12 agar target tahun 2021 dapat tercapai. Nilai evaluasi SAKIP predikat A optimis dapat dicapai dengan meningkatkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengimplementasikan SAKIP lebih baik di Provinsi Sumatera Barat.

Dari 34 Provinsi di Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari 9 Provinsi yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja predikat BB. Pemerintah Provinsi di Indonesia dengan prediket nilai akuntabilitas kinerja AA, A dan BB tahun 2019 tergambar pada tabel 3.18.

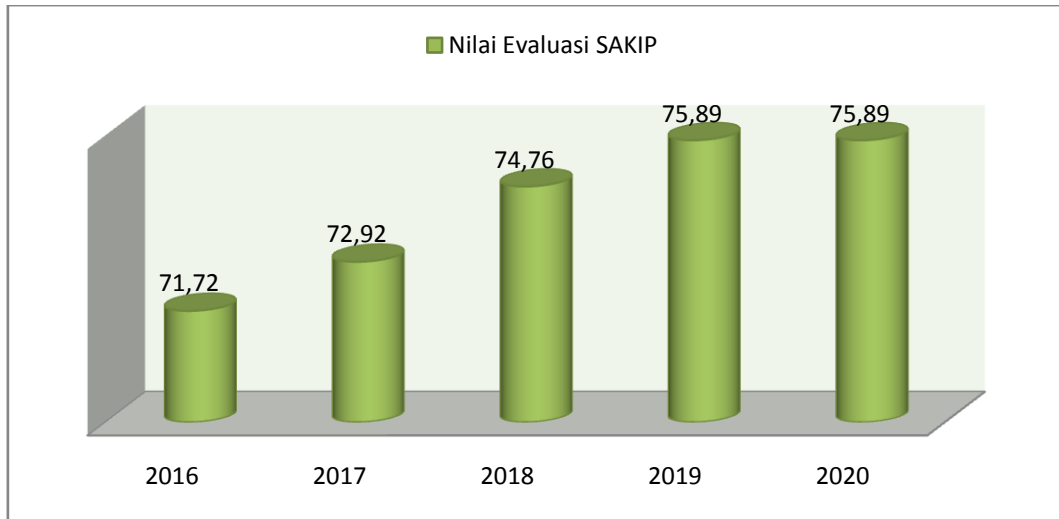
Tabel 3. 18 Pemerintah Provinsi di Indonesia dengan Prediket Nilai Akuntabilitas Kinerja AA, A dan BB tahun 2019

No	Provinsi	Prediket Nilai	No	Provinsi	Prediket Nilai
1	DI Yogyakarta	AA	8	DKI Jakarta	BB
2	Kalimantan Selatan	A	9	Nusa Tenggara Barat	BB
3	Jawa Timur	A	10	Kepulauan Bangka Belitung	BB
4	Jawa Barat	A	11	Kepulauan Riau	BB
5	Kalimantan Utara	BB	12	Sumatera Barat	BB
6	Bali	BB	13	Sumatera Selatan	BB
7	Kalimantan Timur	BB			

Sumber data: Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2019

Perkembangan nilai evaluasi SAKIP Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 disajikan pada grafik 10.

Grafik 10 Perkembangan nilai evaluasi SAKIP tahun 2016-2020



Sumber data: Data diolah

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk meningkatkan implementasi SAKIP secara berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain:

1. Melibatkan unsur dari Bappeda dan Inspektorat Daerah dalam mengawal implementasi SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2. Menyempurnakan dokumen perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan:
 - a. Melakukan pembahasan/verifikasi Cascading Kinerja dan dokumen Perencanaan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat (keterkaitan Tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran, penetapan target.
 - b. Memverifikasi keselarasan indikator kinerja yang ada di dokumen Perjanjian Kinerja dengan SKP
3. Menyusun dokumen rencana aksi pencapaian indikator kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

4. Monitoring terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini akan memudahkan OPD untuk menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun.
5. Mengembangkan kembali aplikasi e-SAKIP sesuai dengan kebutuhan. aplikasi SAKIP digunakan untuk memonitor/pengawasan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
6. Menyusun Peraturan Gubernur No 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hambatan yang masih dihadapi untuk meningkatkan implementasi SAKIP di tahun 2020 adalah

1. Cascading kinerja yang disusun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
2. Komitmen dan pemahaman pimpinan dalam hal menerapkan SAKIP masih belum merata.
3. Keterlibatan Bappeda dan Inspektorat dalam meningkatkan implementasi SAKIP masih belum maksimal.
4. Refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid 19 berdampak pada tidak terlaksananya bimtek/sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman aparatur pengelola SAKIP di tingkat OPD dan evaluator di Inspektorat tidak jadi dilaksanakan.

Untuk peningkatan implementasi SAKIP di tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan hal-hal berikut:

1. Memaksimalkan peran Bappeda, Inspektorat dan Biro Organisasi dalam mengawal implementasi SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. Merumuskan tujuan, sasaran yang berbasis outcome dan indikator kinerja yang SMART dalam dokumen Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat tahun yang akan datang.
3. Menyelaraskan tujuan dan sasaran Pemda dengan tujuan dan sasaran OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan kerangka berfikir logis (cascading kinerja).
4. Penyusunan anggaran berdasarkan pada kinerja yang ingin dicapai sesuai dengan cascading kinerja yang telah dirumuskan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP adalah Rp. 8.145.982.805,-. Anggaran ini tersebar pada 6 program yaitu program perencanaan pembangunan daerah (8 kegiatan), program koordinasi perencanaan pembangunan daerah (29 kegiatan), program peningkatan akuntabilitas kinerja provinsi dan SKPD provinsi Sumatera Barat (3 kegiatan), program pengelolaan otonomi daerah (11 kegiatan), program manajemen perubahan (2 kegiatan), program pengembangan data dan informasi pembangunan (3 kegiatan). Pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP.

Dari jumlah anggaran Rp. 8.145.982.805,-, terealisasi Rp. 7.932.142.079,- atau 97,37%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP terjadi efisien penggunaan anggaran sebesar 213.840.726 (2,63%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja yang tercapai 97,29% dengan realisasi anggaran sebesar 97,37% diketahui bahwa capaian indikator kinerja ini lebih rendah daripada realisasi anggarannya.





Sasaran Strategis 2.1.2 **Meningkatnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien**

Birokrasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu sasaran untuk mengimplementasikan misi pembangunan daerah yang kedua. Birokrasi yang efektif dan efisien ditandai dengan kondisi dimana birokrasi (pemerintahan) yang mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien harus dipercepat. Untuk itu dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memiliki kompetensi, profesional dan memiliki sikap pengabdian sangat dibutuhkan.

Selain SDM Aparatur, untuk mendukung birokrasi yang efektif dan efisien juga diperlukan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur. Hal ini dapat terwujud dengan menerapkan *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan adanya SPBE pengelolaan pemerintah semakin terbuka dan transparan, serta mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus bertatap muka langsung dengan pemberi layanan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian sasaran meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien digunakan 2 indikator yaitu indikator indeks profesionalitas ASN dan Indeks *e government*. Gambaran capaian kedua indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.19.

Tabel 3. 19 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.2

	Target	Realisasi	Capaian
 Indeks Profesionalitas ASN	54	53,75	99,54
 Indeks e-Government	2,9	3,1	106,9
Rata-rata Capaian			103,22

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien adalah sebesar 103,22% termasuk kategori keberhasilan memuaskan. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan efisien adalah sebagai berikut:

1. Indeks Profesionalitas ASN

Profesionalitas adalah kualitas, sikap, derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki suatu profesi untuk dapat melakukan tugas-tugas pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah. Untuk melihat apakah ASN yang dimiliki sudah dapat dikategorikan profesional, maka dilakukan pengukuran indeks profesionalitas dengan mempedomani Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Penetapan Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan indikator kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas

jabatan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019.

Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 ditargetkan 54. Penetapan target mengacu pada target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan mempertimbangkan indeks profesionalitas ASN tahun 2019 dan sampel perhitungan ASN yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Profesionalitas ASN ditargetkan lebih rendah 22,69.

Indeks Profesionalitas ASN target 54, terealisasi 53,75 dengan tingkat capaian 99,54% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Indikator Pengukuran	Data yang digunakan	Bobot (%)	Nilai
1	Kualifikasi	Data pendidikan formal terakhir	25	13,98
2	Kompetensi	Riwayat pengembangan kompetensi	40	11,88
3	Kinerja	Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Nilai Perilaku Kerja Pegawai (PKP)	30	22,90
4	Kedisiplinan	Data/informasi hukuman disiplin	5	4,99
TOTAL			100	53,75

Berdasarkan kategori nilai, Indeks Profesionalitas ASN 53,75 berada pada kategori sangat rendah (< 60). Dengan Indeks Profesionalitas ASN 53,75 berarti ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk kategori sangat tidak profesional.

Capaian indikator kinerja indeks profesionalitas ASN sebesar 99,54% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks profesionalitas ASN tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.20.

Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks profesionalitas ASN

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks profesionalitas ASN	53,75	76,69	99,54	109,56	74

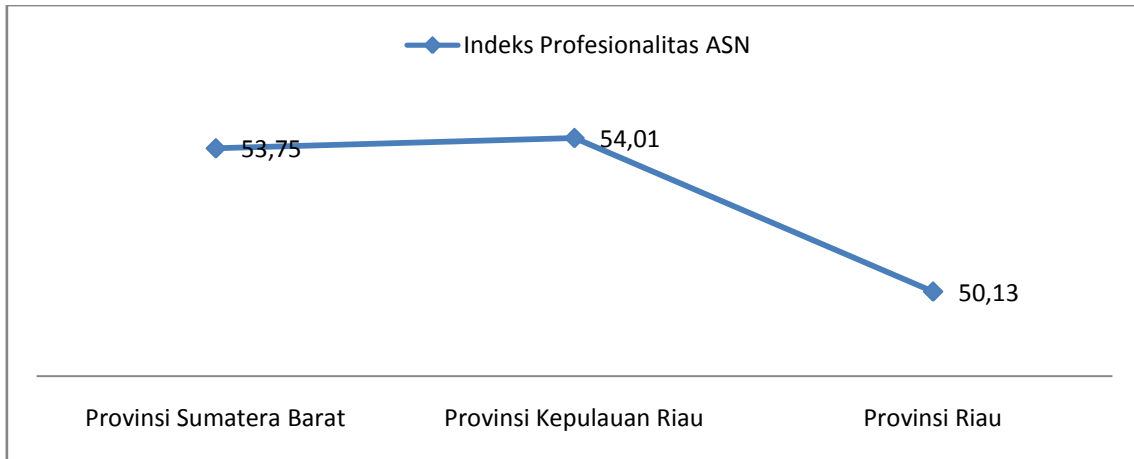
Realisasi indeks profesionalitas ASN tahun 2020 adalah 53,75 tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya <100%. Jika dibandingkan dengan indeks profesionalitas ASN tahun 2019, terjadi penurunan sebanyak 25,94. Pengukuran Indeks professional ASN tahun 2020 dilakukan pada 18.374 PNS (100%). Hal ini jauh meningkat dibandingkan pengukuran IP ASN Tahun 2019 dengan peserta 6.170 ASN sehingga diperoleh hasil indeks pengukuran ASN 76,69 kategori sedang. Untuk capaian kinerja tahun 2019-2020 juga menunjukkan tren yang negatif dengan penurunan 10,02%.

Untuk tahun 2021, Indeks profesionalitas ASN ditargetkan tercapai 74 atau meningkat 20,25 dari realisasi tahun 2020. Realisasi 53,75 menunjukkan pencapaian 72,64% dari target tahun 2021. Dikarenakan manajemen SDM aparatur merupakan area perubahan Reformasi Birokrasi yang sangat mempengaruhi indeks reformasi birokrasi maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan tetap mengupayakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut.

Indeks profesionalitas ASN Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan dengan indeks profesionalitas ASN Provinsi Riau dan lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah sampel yang jauh melebihi kedua

Provinsi tersebut. Perbandingan indeks profesionalitas ASN Provinsi Sumatera Barat dengan 2 provinsi lain digambarkan pada grafik 11.

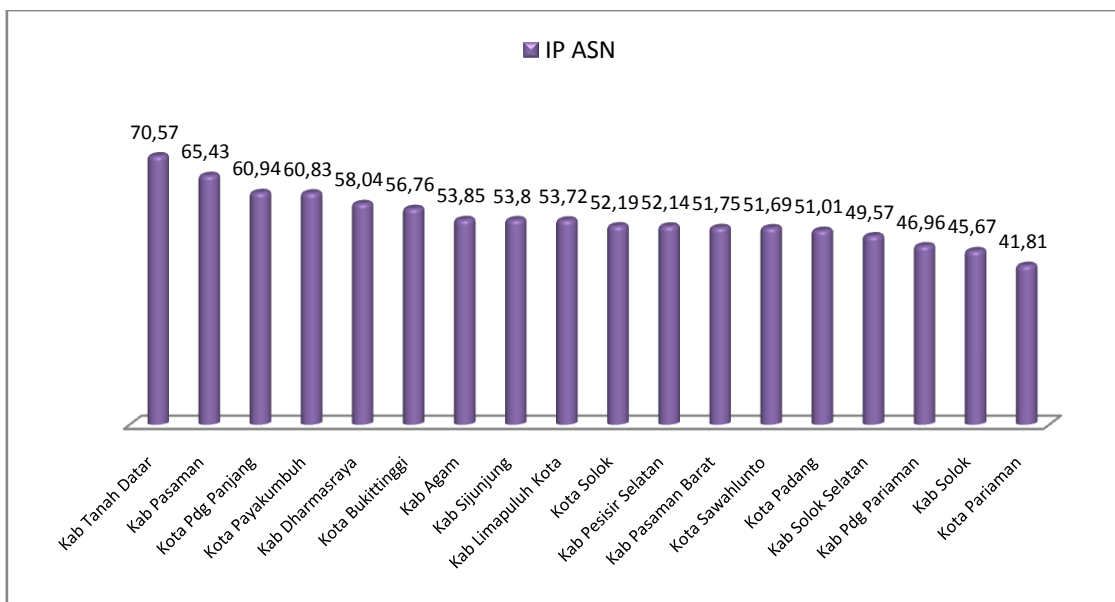
Grafik 11 Perbandingan indeks profesionalitas ASN



Sumber data: Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Untuk 19 Kabupaten/kota di Sumatera Barat, rata-rata indeks profesionalitas ASNnya masih berada pada kategori rendah dan sangat rendah dengan jumlah sampel yang bervariasi. Gambaran indeks profesionalitas ASN kabupaten/kota disajikan pada grafik 12.

Grafik 12 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten/Kota tahun 2020



Sumber data: Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Indeks Profesional ASN tidak ditentukan oleh banyaknya ASN yang berpartisipasi dalam pengukuran, tetapi ditentukan oleh kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin individu ASN itu sendiri. Untuk dapat menghasilkan ASN yang profesional, dan mampu meningkatkan indeks ASN maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Dalam merencanakan kebutuhan pegawai, pemerintah provinsi Sumatera Barat sudah memiliki memiliki proyeksi kebutuhan pegawai 2020-2024 dengan memperhatikan penghitungan dalam bentuk analisis jabatan.
2. Penerimaan pegawai dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN melalui website bkd.sumbar.prov.go.id.
3. Untuk mewujudkan pegawai berbasis kompetensi, sudah ada standar kompetensi jabatan eselon 2, tahun 2021 akan dikembangkan ke jabatan lainnya.
4. Dalam Promosi jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan secara terbuka.
5. Penggunaan absensi online pada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara melalui penambahan kegiatan sosialisasi/workshop penanganan kasus-kasus kepegawaian yang diharapkan dapat menekan jumlah Aparatur Sipil Negara yang bermasalah dengan disiplin.
7. Meningkatkan koordinasi terkait percepatan *updating* data SAPK ke BKN.

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN antara lain:

1. Dalam pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara data pegawai yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara berasal dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Kendalanya, terjadi

ketidaksesuaian data Pegawai Negeri antara SAPK yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara dengan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ketidaksesuaian data dikarenakan belum terhubungnya aplikasi SAPK dengan SIMPEG sehingga data pegawai yang berubah harus diupload ulang, dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan updating data ke SAPK sangat lama dikarenakan lambatnya jaringan.

2. Keterbatasan anggaran, sehingga pendidikan dan pelatihan yang direncanakan tidak jadi dilaksanakan yang mana jumlah pelatihan/bimtek merupakan salah satu indikator penghitungan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
3. Belum maksimalnya pendataan ASN yang telah mengikuti bimtek/pelatihan.
4. Kurangnya minat ASN mengikuti beberapa jenis diklat teknis dan manajerial dikarenakan pola karier ASN yang belum jelas.
5. Kurangnya informasi terkait pengembangan kompetensi aparatur.

Untuk meningkatkan profesionalitas ASN di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terkait penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
2. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pendataan ASN yang telah mengikuti Bimtek/Pelatihan.
3. Menyusun jenis-jenis pelatihan berdasarkan kebutuhan OPD dan sesuai dokumen Analisis Jabatan yang disusun.
4. Mengembangkan bentuk-bentuk pelatihan baru dan pelaksanaan pelatihan secara *e-learning* sebagai inovasi di bidang pendidikan dan pelatihan.
5. Mengoptimalkan penggunaan absensi online dan perhitungan kinerja ASN menggunakan aplikasi e-kinerja.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk mendukung pencapaian indeks profesionalitas ASN adalah Rp. 8.451.400.608,-. Anggaran ini tersebar pada 4 program yaitu program peningkatan manajemen SDM aparatur (34 kegiatan), program pendidikan kedinasan (4 kegiatan), program pembinaan dan pengembangan aparatur (6 kegiatan) dan program penataan kelembagaan daerah pemerintah daerah (4 kegiatan). Pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indeks profesionalitas ASN.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 8.451.400.608,-, terealisasi sebesar Rp. 7.841.961.555,- atau 92,79%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian indeks profesionalitas ASN terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 609.439.053 (7,21%). Efisiensi tertinggi berasal dari pelaksanaan program pendidikan kedinasan yang realisasi anggarannya < 90% yaitu sebesar 86,94%. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sebesar 99,54% dengan realisasi anggaran sebesar 92,79% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 6,75%.

2. Indeks *e-government*

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*. SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

Penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien,

dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Untuk mengetahui keberhasilan Pemerintah dalam menerapkan SPBE, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Indeks SPBE.

Untuk tahun 2020, Indeks *e-government*/SPBE ditargetkan 2,9. Penetapan target indeks *e-government* sebesar 2,9 mengacu pada target tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, target tahun 2020 ditetapkan meningkat 6,22.

Indeks *e-government*/SPBE target 2,9, terealisasi 3,1 dengan tingkat capaian 106,9% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja indeks *e-government*/SPBE tahun 2020 diukur berdasarkan hasil evaluasi SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indeks SPBE 3,1 termasuk dalam prediket SPBE “Baik” dengan rincian penilaian disajikan pada tabel 3.21.

Tabel 3. 21 Rincian Penilaian Indeks SPBE

No	Domain Penilaian Kebijakan	Nilai
1	Domain Kebijakan SPBE	3.00
	Kebijakan tata kelola SPBE	3,71
	Kebijakan Layanan SPBE	2,5
2	Domain Tata Kelola	3.00
	Kelembagaan	3,5
	Strategi dan Perencanaan	3
	TIK	2,67
3	Domain Layanan SPBE	3,18
	Administrasi Pemerintahan	3,29
	Pelayanan Publik	3

Sumber data: Kementerian PAN dan RB

Capaian indikator kinerja indeks *e-government*/SPBE sebesar 106,9% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks *e-government*/SPBE tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.22.

Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks e-government/SPBE

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks <i>e-government</i> /SPBE	3,1	2,78	106,9	99,29	3

Indeks *e-government*/SPBE tahun 2020 tercapai 3,1 meningkat 0,32 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Realisasi 2020 tercapai melebihi target yang telah ditetapkan sehingga capaiannya <100%. Tren capaian tahun 2019-2020 menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan 7,61%.

Target tahun 2021 sesuai dengan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sudah tercapai di tahun 2020. Hal ini dikarenakan realisasi tahun 2020 telah tercapai melebihi target tahun 2021. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyempurnakan kembali target tahun 2021.

Dalam meningkatkan penerapan SPBE, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan untuk:

1. Melakukan koordinasi dengan OPD untuk membuat regulasi terkait dengan kebijakan layanan SPBE
2. Pembentukan tim koordinasi SPBE Provinsi Sumatera Barat dan Penguatan lembaga teknis penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

3. Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) SPBE yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 59/2020 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Pengembangan 15 aplikasi dan 9 website selama tahun 2020

Hambatan dalam menerapkan SPBE antara lain:

1. Belum semua layanan SPBE mempunyai regulasi kebijakan terkait layanan SPBE yang digunakan.
2. Sarana dan prasarana TIK dan jaringan belum memadai
3. Belum maksimalnya pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Bertambahnya indikator baru terkait manajemen risiko dalam penyelenggaraan SPBE.
5. Beberapa aplikasi belum terintegrasi

Upaya yang akan di lakukan untuk meningkatkan penerapan SPBE di masa yang akan datang

1. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait adanya regulasi atau kebijakan yang mengatur tentang layanan SPBEnya masing-masing.
2. Meningkatkan infrastruktur jaringan TIK dan kapasitas *bandwith*
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan
4. Penambahan jumlah dan peningkatkan kapasitas SDM tenaga ahli IT/pengelola/penyelenggara *e-government*.
5. Meningkatkan jumlah aplikasi yang terintegrasi.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk mendukung peningkatan indeks *e-government* Rp. 19.557.051.718,-. Anggaran ini tersebar pada 11 program yaitu program kerjasama informasi dan

media massa (3 kegiatan), program fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi (1 kegiatan), program informasi dan komunikasi publik (2 kegiatan), program pengelolaan *e-government* pemerintahan daerah (9 kegiatan), program penyediaan data statistik sektoral (4 kegiatan), program pengamanan informasi pemerintah dan persandiaan (5 kegiatan), program penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (9 kegiatan), pembangunan materi hukum (4 kegiatan), program sarana dan informasi hukum (2 kegiatan), program peningkatan penataan peraturan perundang-undangan (4 kegiatan), program penataan ketatalaksanaan pemerintah daerah (3 kegiatan) dan program penerapan pemerintahan yang baik (16 kegiatan). Pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indikator kinerja indeks *e-government*/SPBE.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 19.557.051.718,-, terealisasi sebesar Rp. 17.827.626.859,- atau 91,16%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian peningkatan indeks *e-government* terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.729.424.859 (8,84%). Efisiensi tertinggi berasal dari pelaksanaan program yang realisasi anggarannya < 90% yaitu program pengelolaan *e-government* pemerintahan daerah, program pembangunan materi hukum, program peningkatan penataan peraturan perundang-undangan dan program penerapan pemerintahan yang baik. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja indeks *e-government* 106,9% dengan realisasi anggaran 91,16% diperoleh tingkat efisiensi 15,74%.



Sasaran Strategis 2.1.3


Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dituntut untuk menyediakan pelayanan terbaik dan berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, meningkatnya kualitas pelayanan publik ditetapkan sebagai sasaran ketiga yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan tujuan meningkatnya penerapan reformasi Birokrasi. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diberikan langsung oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3). Untuk tahun 2020, rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik ditargetkan 84,80 termasuk dalam kategori mutu pelayanan baik (B). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan dapat memberikan pelayanan minimal "Baik" kepada masyarakat. Indeks pelayanan kategori "Baik" berada pada interval 76,61-88,30. Penetapan target tahun 2020 indikator kinerja ini mengacu pada target tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan rata-rata survei kepuasan masyarakat di tahun 2019 (84,47). Jika dibandingkan dengan kondisi 2019, target tahun 2020 ditetapkan

meningkat 0,33 menjadi 84,80 dengan kategori yang sama yaitu “Baik”. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik disajikan pada tabel 3.23.

Tabel 3. 23 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.3

	Target	Realisasi	Capaian
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	84,80	90,14	106,30
Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik			

Rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik target 84,80, terealisasi 90,14 dengan tingkat capaian 106,30% termasuk kategori sangat memuaskan.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Unit Kerja Pelayanan Publik yang dikumpulkan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020, ada 8 Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagaimana diuraikan pada tabel 3.24.

Tabel 3. 24 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 8 Organisasi Perangkat Daerah

No	OPD yang Melaksanakan Survei	Skor
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81,72
2	Badan Kepegawaian Daerah	85,27
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83,51
4	RSUD Dr. M. Natsir Solok	91,89
5	RSUD Pariaman	94,89
6	RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi	92,01
7	RSJ. Prof Dr HB. Saanin Padang	93,84
8	Dinas Kesehatan	98,05
Rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat		90,14

Sumber data: Biro Organisasi Setda Prov Sumbar

Nilai survei kepuasan masyarakat 90,14 tergolong pada kategori mutu pelayanan publik Sangat Baik.

Capaian indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik sebesar 106,30% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

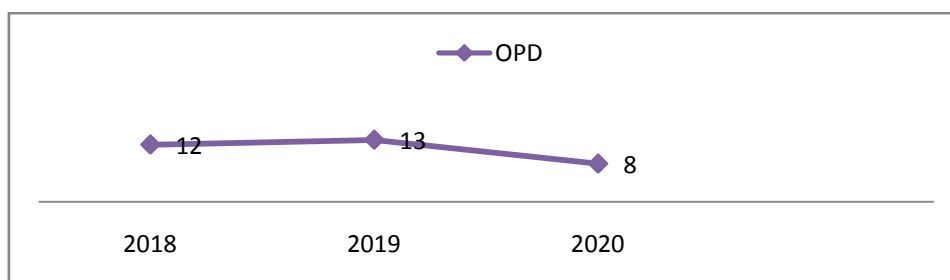
Perbandingan realisasi indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.25.

Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik	90,14	84,47	106,30	105,59	80

Realisasi indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik tahun 2020 adalah 90,14, tercapai melebihi target yang telah ditetapkan sehingga capaian indikator kinerja ini >100%. Realisasi di tahun 2019-2020 menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan 5,67. Begitupun dengan capaian kinerjanya tahun 2019-2020 yang juga menunjukkan tren yang positif. Akan tetapi, jumlah yang melaksanakan survei di tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh refocusing anggaran untuk penanganan covid 19. Perkembangan OPD yang melaksanakan survei tahun 2018-2020 disajikan pada grafik 13.

Grafik 13 OPD yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2020



Sumber Data: Biro Organisasi Setda Prov Sumbar

Untuk tahun 2021, rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik ditetapkan 80, termasuk pada kategori mutu pelayanan baik. Jika dilihat, realisasi tahun 2020 sudah tercapai melebihi target tahun 2021. Dikarenakan pelayanan publik yang berkualitas merupakan suatu kewajiban yang harus disediakan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan selalu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan minimal baik.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan hal-hal berikut ini:

1. Menciptakan inovasi terkait pelayanan publik. Inovasi yang diciptakan selama tahun 2020 ada sebanyak 10 inovasi.
2. Pembinaan terpadu penyelenggaraan pelayanan publik terhadap unit kerja penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Mengelola pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik (SP4N-LAPOR). Selama 2020, sebanyak 78 pengaduan dapat diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik.

Adapun faktor penghambat meningkatnya kualitas pelayanan publik antara lain:

1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang melaksanakan pelayanan masih belum memadai.
2. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang masih belum memadai dan representatif
3. Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19.

Untuk ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus berupaya mempertahankan kualitas pelayanan publik minimal “Baik” dengan cara:

1. Memaksimalkan penyelesaian pengaduan yang masuk ke aplikasi SP4N LAPOR
2. Memaksimalkan anggaran untuk pengembangan sarana prasarana terkait pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Memaksimalkan koordinasi dan pembinaan kepada unit kerja pelayanan publik.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah Rp. 89.300.642.033,-. Anggaran ini tersebar pada 13 program yaitu program pengembangan manajemen pelayanan publik (14 kegiatan), program peningkatan kualitas pelayanan publik (2 kegiatan), program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah (14 kegiatan), program penguatan inovasi daerah (4 kegiatan), program pengembangan data dan informasi (1 kegiatan), program peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah (3 kegiatan), program peningkatan pelayanan kedinasan (2 kegiatan), program penataan administrasi kependudukan (21 kegiatan), program peningkatan pelayanan publik (3 kegiatan), program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan (6 kegiatan), program pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan sistem kearsipan (7 kegiatan), program penelitian dan pengembangan IPTEK untuk menunjang pemerintahan daerah dan pembangunan (9 kegiatan) dan program peningkatan supremasi hukum dan perlindungan hukum (4 kegiatan). Pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 89.300.642.033,-, terealisasi sebesar Rp. 77.934.864.869,- atau 87,27%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 11.365.777.164,- (12,73%). Efisiensi tertinggi berasal dari pelaksanaan program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dan program peningkatan supremasi hukum dan perlindungan hukum yang realisasi anggarannya < 90%. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja meningkatnya kualitas pelayanan publik 106,30% dengan realisasi anggaran 87,27% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 19,03%.

Misi 3

MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI

Tujuan 3.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Hal ini dikarenakan SDM inilah yang akan menjadi penggerak pembangunan di segala aspek. SDM yang menjadi penggerak pembangunan adalah SDM yang berkualitas. Untuk itu, kualitas SDM perlu ditingkatkan agar peran SDM tersebut maksimal dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas SDM sebagai tujuan untuk mendukung pencapaian misi 3 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Kualitas SDM diukur

dengan menggunakan indikator indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*), Standar hidup layak (*decent standard*). Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu: sangat tinggi ($IPM \geq 80$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), sedang ($60 \leq IPM < 70$) dan rendah ($IPM < 60$). Penetapan indikator indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Untuk tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan 72,13. Penetapan target IPM sebesar 72,13 mengacu pada target tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Jika dibandingkan dengan realisasi IPM di tahun 2019 (71,73), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 0,4. Pencapaian tujuan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia tergambar pada tabel 3.26.

Tabel 3. 26 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3.1

	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	72,13	72,39	100,36

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia target 72,13, terealisasi 72,39 dengan tingkat capaian sebesar 100,36% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

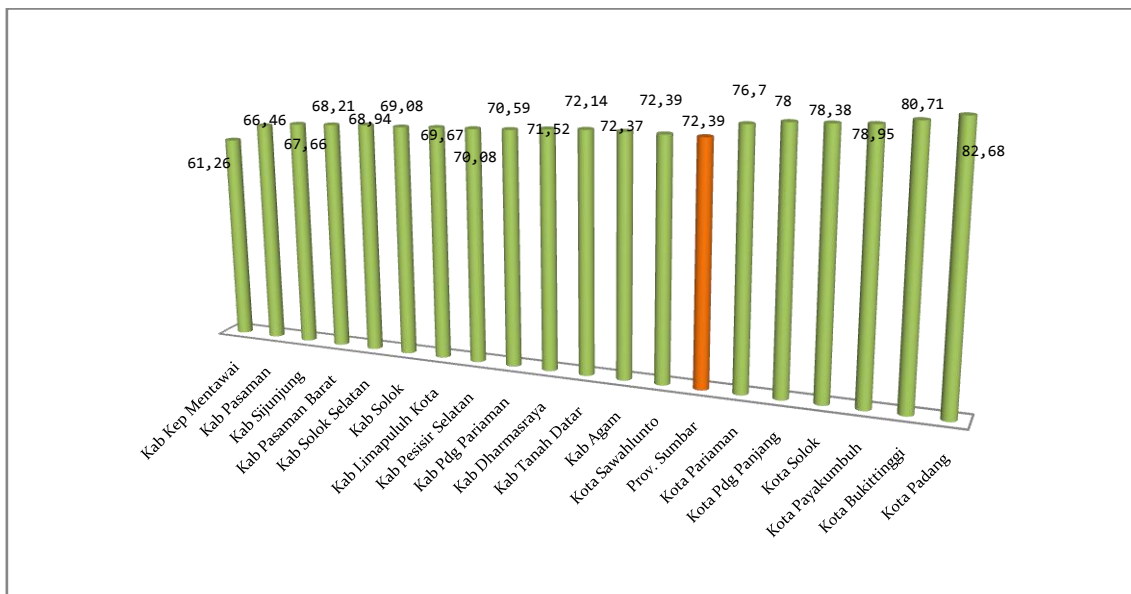
Realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor. 19/03/13/Th.XXIII tanggal 2 Maret 2020. Nilai IPM 72,39 berarti Provinsi

Sumatera Barat termasuk pada kelompok tinggi. Rincian Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan komponen IPM diuraikan sebagai berikut:

No	Komponen IPM	2020
1	Angka Harapan Hidup	69,31
2	Harapan Lama Sekolah	14,01
3	Rata-rata Lama Sekolah	8,92
4	Pengeluaran per Kapita	10,925
	IPM	72,39

IPM Provinsi Sumatera Barat sebesar 72,39 merupakan akumulasi IPM dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, IPM 12 Kabupaten/Kota berada di bawah IPM Provinsi Sumatera Barat dan 6 Kabupaten/Kota IPMnya lebih tinggi dari IPM Provinsi Sumatera Barat. Nilai IPM tertinggi berada di Kota Padang dan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. IPM 19 Kabupaten/Kota tersebut tergambar pada grafik 14.

Grafik 14 IPM 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia sebesar 100,36% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.27.

Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia

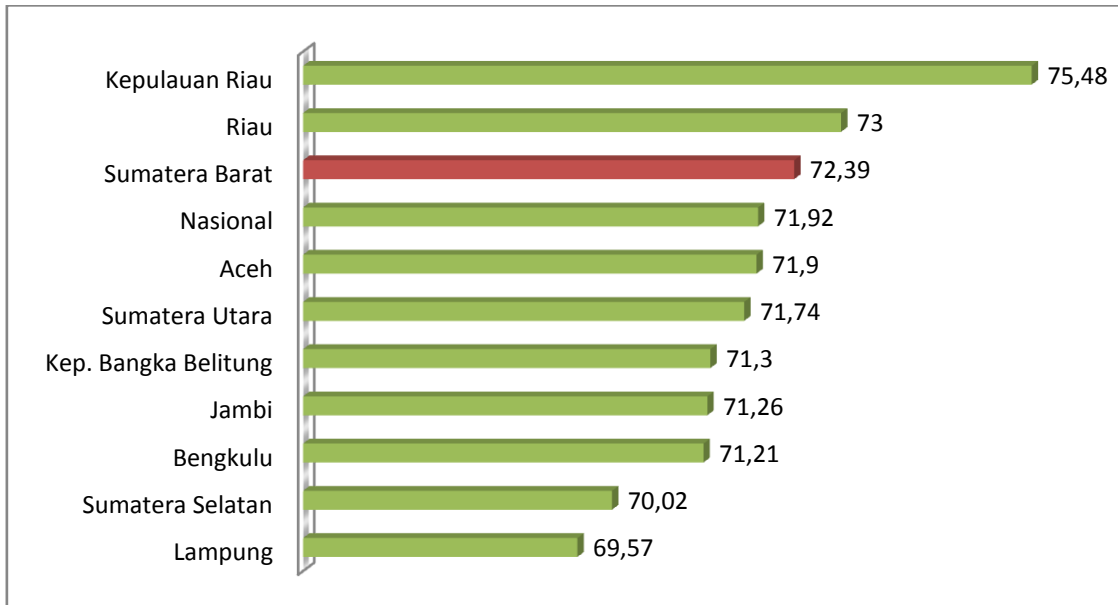
No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,39	71,73	100,36	100,04	72,56

Realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2020 adalah 72,39, tercapai di atas target yang ditetapkan sehingga capaian kerjanya >100%. Tren realisasi dari 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 0,66 di tahun 2020. Sejalan dengan realisasi, capaian indikator kinerja ini tahun 2019-2020 juga menunjukkan tren yang positif.

Untuk tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan 72,56 atau meningkat 0,17 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020. Realisasi tahun 2020 sebanyak 72,39 menunjukkan pencapaian sebesar 99,77% dari target 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan di tahun 2020, target 2021 optimis dapat dicapai.

Jika dibandingkan dengan Nasional, IPM Sumatera Barat tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Nasional dengan selisih sebesar 0,47. Dalam 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke 3 setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau. Jika dikelompokkan berdasarkan status IPM, Provinsi Sumatera Barat bersama 8 Provinsi lainnya di Pulau Sumatera termasuk dalam status Pembangunan Manusia "Tinggi". Perbandingan IPM Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera disajikan pada grafik 15.

Grafik 15 IPM Sumatera Barat, Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020



Sumber data: BRS No. 21/02/Th.XXIII, 17 Februari 2020

Capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 100,36% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Hal ini didukung oleh upaya sebagai berikut:

1. Mengupayakan peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Harapan Lama Sekolah penduduk Sumatera Barat tahun 2020 meningkat 0,06 di tahun 2020 dari 13,95 di tahun 2019. Sedangkan rata-rata lama sekolah meningkat 0,16 di tahun 2020. Peningkatan ini dicapai melalui penyaluran dana BOS untuk SLB Negeri, SMA negeri dan SMK Negeri. Selama tahun 2020 ada 376 sekolah, pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang dilaksanakan pada 179 sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana pada 167 sekolah, meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan, pemberian beasiswa kepada 802 orang siswa berprestasi dan kurang mampu

2. Mengupayakan peningkatan angka harapan hidup

Angka harapan hidup penduduk Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, angka harapan hidup

meningkat 0,30 menjadi 69,31. Peningkatan ini dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, percepatan pencegahan dan penanganan stunting, pelayanan imunisasi rutin kepada anak balita di semua fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dan mengiatkan program gerakan masyarakat sehat (Germas) secara berkelanjutan melalui berbagai media.

Dalam mencapai Indeks Pembangunan Manusia masih ditemukan kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
2. Kompetensi guru dan tenaga kesehatan yang masih belum sesuai dan maksimal.
3. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan
4. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan sehingga banyaknya lulusan yang menganggur.
5. Mahalnya biaya pendidikan sehingga masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.
6. Belum selarasnya program pembinaan pendidikan SMA dan SMK oleh Provinsi dengan program pembinaan pendidikan di kabupaten/kota.
7. Masih kurangnya akses digitalisasi pendidikan dan implementasi merdeka belajar.
8. Belum maksimalnya dukungan dana kegiatan APBD dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit
9. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Perilaku Hidup Sehat
10. Isu negatif mengenai halal/haramnya vaksin

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di masa yang akan datang perlu diupayakan hal-hal berikut ini:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
2. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kesehatan.
3. Mengoptimalkan penyampaian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga tepat sasaran.
4. Pemberian Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk membantu biaya bagi murid yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan sama seperti anak lainnya.
5. Pemerataan pendidikan di semua wilayah
6. Memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait pola hidup sehat.
7. Melakukan peningkatan penjaminan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.
8. Konsisten melaksanakan Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Dalam mencapai tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 sasaran strategis yaitu meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 2 sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran Strategis 3.1.1 Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar untuk kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang bermutu akan melahirkan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas juga. Sumber daya manusia yang berkualitas inilah yang akan menjadi modal pembangunan dan penggerak perekonomian pada suatu negara. Peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat sebagai sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat disajikan pada tabel 3.28.

Tabel 3. 28 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3.1.1

	Target	Realisasi	Capaian
 Harapan Lama Sekolah	14,86	14,01	94,28
 Rata-rata Lama Sekolah	8,85	8,92	100,79
Rata-rata Capaian Kinerja			97,54

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah sebesar 97,54% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan metode perhitungan untuk mengukur lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang sehingga diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Penetapan harapan lama sekolah diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Untuk tahun 2020, Harapan Lama Sekolah ditargetkan 14,86. Penetapan target Harapan Lama Sekolah sebesar 14,86 mengacu pada target tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Jika dibandingkan dengan realisasi Harapan Lama Sekolah di tahun 2019 (13,95), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 0,91.

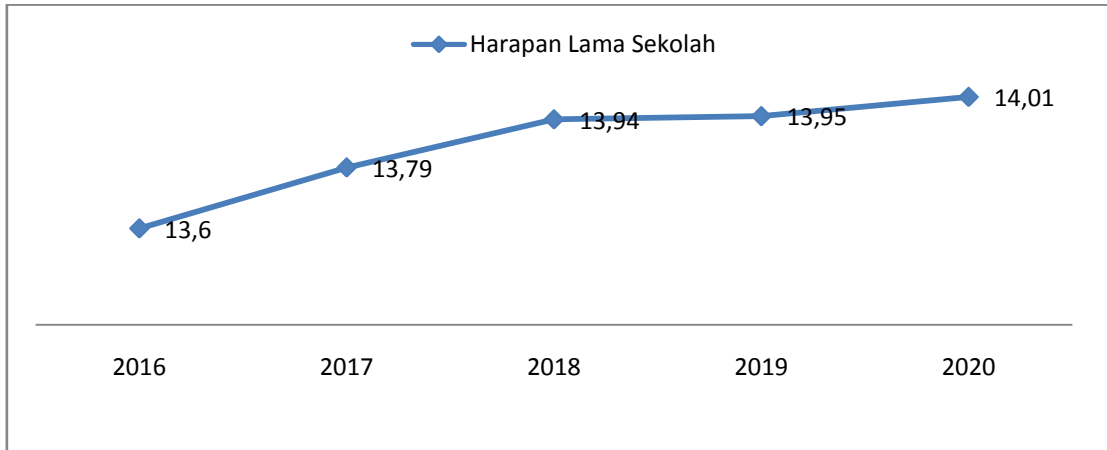
Harapan lama sekolah target 14,86, terealisasi 14,01 dengan tingkat capaian 94,28% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja harapan lama sekolah tahun 2020 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat melalui Berita Resmi Statistik Nomor. 19/03/13/Th.XXIII tanggal 2 Maret 2020. Harapan Lama Sekolah 14,01 tahun berarti anak-anak yang berusia 7 tahun di tahun 2019 memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan sampai lulus DII atau DIII.

Harapan Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0,1025 pertahun. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2017

sebesar 0,19 dan terendah terjadi di tahun 2018 sebesar 0,01. Harapan lama sekolah secara rinci disajikan pada grafik 16.

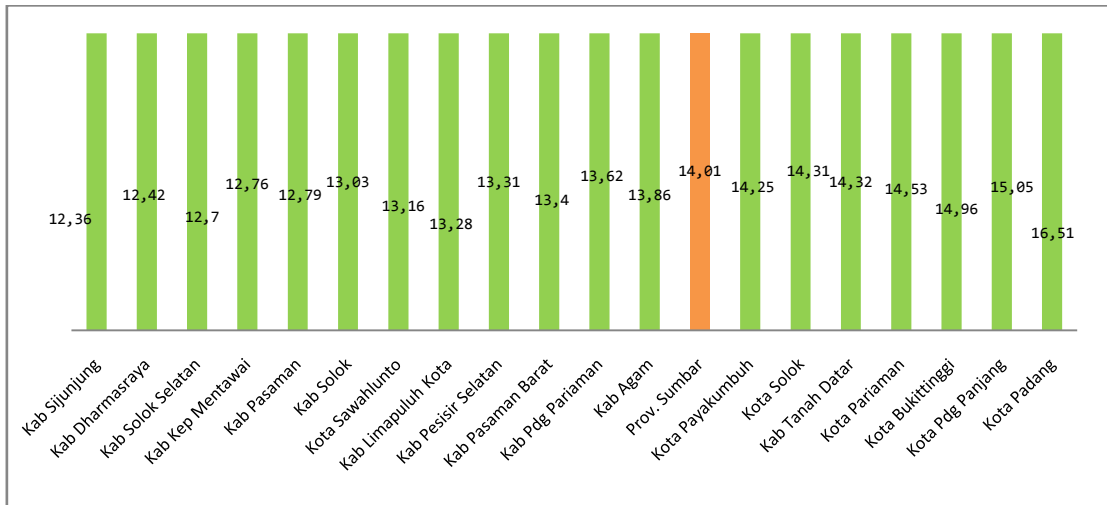
Grafik 16 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Peningkatan harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Barat juga tercermin dari peningkatan harapan lama sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota tersebut sebanyak 7 Kabupaten/Kota harapan lama sekolahnya lebih tinggi dibandingkan rata-rata lama sekolah Provinsi. Kota Padang menempati urutan pertama tertinggi dengan harapan lama sekolah 16,51 yang berarti anak-anak usia 7 tahun di tahun 2019 di Kota Padang memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka sampai D4/S1. Sementara itu harapan lama sekolah terendah adalah 12,36 yang berada di Kabupaten Sijunjung. Gambaran harapan lama sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020 disajikan pada grafik 17.

Grafik 17 Harapan Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Capaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah sebesar 94,28% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Harapan Lama Sekolah tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.29.

Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Harapan Lama Sekolah	14,01	13,95	94,28	95,35	15,09

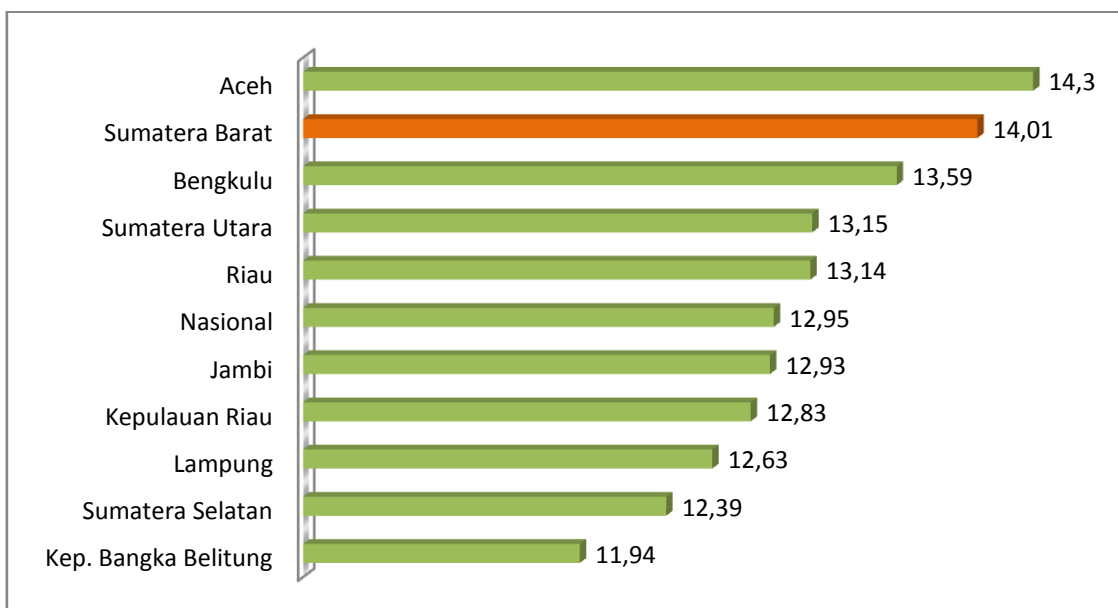
Realisasi indikator kinerja Harapan Lama Sekolah di tahun 2020 adalah 14,01, tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya <100%. Tren realisasi dari 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 0.66 di tahun 2020. Akan tetapi, untuk capaian kinerja menunjukkan tren negatif.

Untuk tahun 2021, Harapan Lama Sekolah ditargetkan 15,09 atau meningkat 1,08 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020. Realisasi tahun 2020

sebanyak 14,01 menunjukkan pencapaian sebesar 92,84% dari target 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan di tahun 2020, akan dilakukan upaya yang maksimal untuk meningkatkan harapan lama sekolah di tahun 2021.

Harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, 1,06 lebih tinggi dibandingkan dengan Harapan lama sekolah Nasional (12,95). Secara nasional, Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke 3 tertinggi setelah Provinsi DI Yogyakarta (15,58), Provinsi Aceh (14,30). Jika dibandingkan dengan 9 Provinsi lain yang berada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke 2 tertinggi setelah Provinsi Aceh (14.30). Harapan lama sekolah Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional digambarkan pada grafik 18.

Grafik 18 Harapan lama sekolah Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2020



Sumber data: BRS No. 21/02/Th.XXIII, 17 Februari 2020

2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dengan kegunaan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka rata-rata Lama Sekolah penduduk suatu wilayah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya dan juga diartikan semakin baiknya tingkat pengetahuan penduduk tersebut. Penetapan rata-rata lama sekolah diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Untuk tahun 2020, rata-rata Lama Sekolah ditargetkan 8,85. Penetapan target Harapan Lama Sekolah sebesar 8,85 mengacu pada target tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Jika dibandingkan dengan realisasi rata-rata Lama Sekolah di tahun 2019 (8,76), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 0,09.

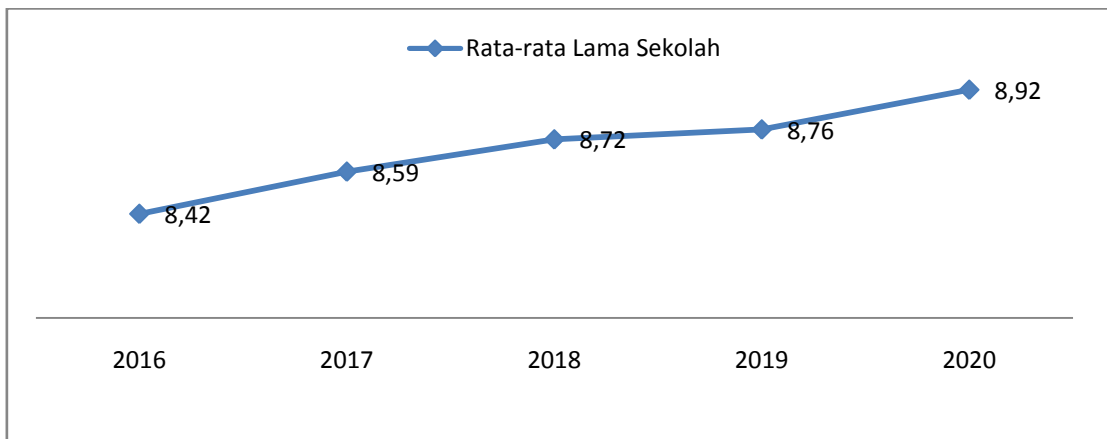
Rata-rata lama sekolah target 8,85, terealisasi 8,92 dengan tingkat capaian 100,79% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja rata-rata lama sekolah tahun 2020 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat melalui Berita Resmi Statistik Nomor. 19/03/13/Th.XXIII tanggal 2 Maret 2020. Rata-rata lama sekolah 8,92 tahun berarti penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,92 tahun atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II).

Perkembangan rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) terus mengalami peningkatan dengan rata-

rata peningkatan 0.125 pertahun. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar 0,17 dan terendah terjadi di tahun 2019 sebesar 0,04. Rata-rata lama sekolah secara rinci disajikan pada grafik 19.

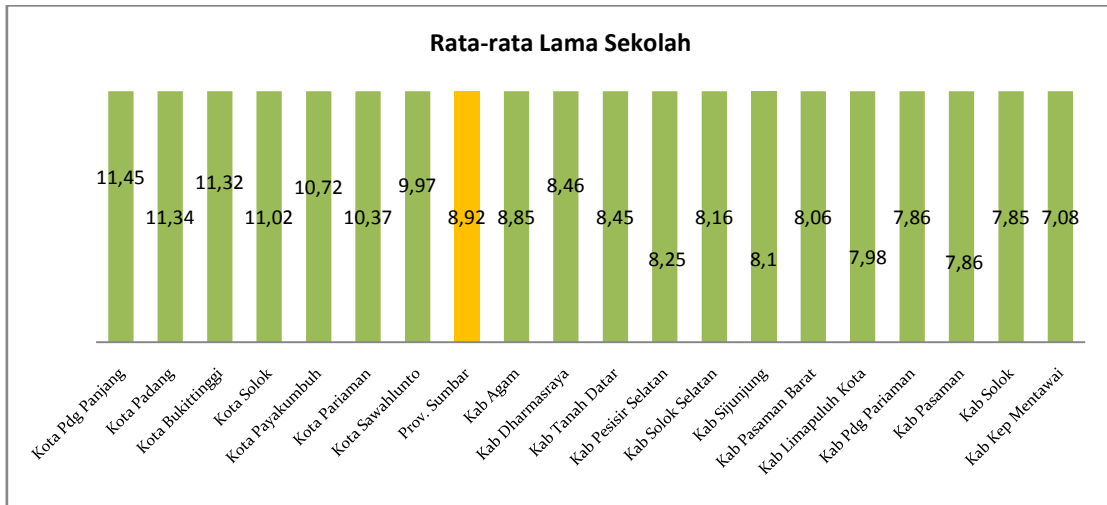
Grafik 19 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Peningkatan rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat juga tercermin dari peningkatan rata-rata lama sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota tersebut sebanyak 7 Kabupaten/Kota rata-rata lama sekolahnya lebih tinggi dibandingkan rata-rata lama sekolah Provinsi. Kota Padang Panjang menempati urutan pertama tertinggi dengan rata-rata lama sekolah 11,45 yang berarti rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Padang Panjang telah menyelesaikan pendidikan sampai kelas XI (SMA kelas II). Sementara itu rata-rata lama sekolah terendah adalah 7,08 yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Gambaran rata-rata lama sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020 disajikan pada grafik 20.

Grafik 20 Rata-rata Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Capaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah sebesar 100,79% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja rata-rata lama sekolah tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.30.

Tabel 3. 30 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja rata-rata Lama Sekolah

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Rata-rata Lama Sekolah	8,92	8,76	100,79	99,66	8,92

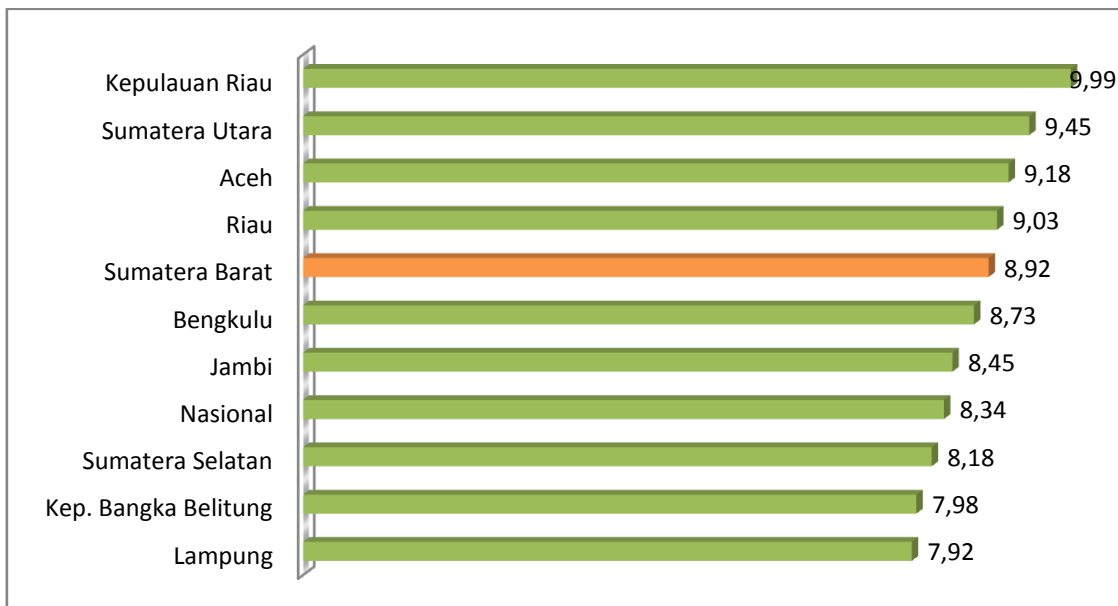
Realisasi indikator kinerja rata-rata lama sekolah di tahun 2020 adaah 8,92, tercapai di atas target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya >100%. Realisasi tahun 2019-2020 menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan sebesar 0,16 di tahun 2020. Sejalan dengan realisasi, capaian kinerja indikator rata-rata lama sekolah tahun 2019-2020 juga menunjukkan tren yang positif.

Untuk tahun 2021, rata-rata lama sekolah ditargetkan 8,92. Target tahun 2021 ini sama dengan realisasi tahun 2020. Hal ini berarti, target tahun 2021 sudah

tercapai di tahun 2020. Untuk itu, target tahun 2021 akan disempurnakan/dikaji kembali untuk disajikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Nasional (8,34), dengan selisih sebesar 0,58. Secara nasional, Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke 12 tertinggi. Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama tertinggi dengan rata-rata lama sekolah sebesar 11,06. Jika dibandingkan dengan 9 Provinsi lain yang berada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke 5 tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau (9,99), Provinsi Sumatera Utara (9,45), Provinsi Aceh (9,18), Provinsi Riau (9,03). Rata-rata lama sekolah Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional digambarkan pada grafik 21.

Grafik 21 Rata-rata lama sekolah Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2020



Sumber data: BRS No. 21/02/Th.XXIII, 17 Februari 2020

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat di tahun 2020 antara lain:

1. Penyaluran dana BOS untuk SLB Negeri, SMA negeri dan SMK Negeri. Selama tahun 2020 ada 376 sekolah yang diberikan dana BOS dengan rincian sebagai berikut:
 - Dana BOS SLB Negeri untuk 29 sekolah
 - Dana BOS SMA Negeri untuk 236 sekolah
 - Dana BOS SMK Negeri untuk 111 sekolah
2. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembangunan fasilitas gedung SMA pada 6 sekolah
 - Rehabilitasi gedung SMK pada 173 sekolah
 - Penyediaan sarana dan prasarana SMA pada 113 sekolah
 - Penyediaan sarana dan prasarana SMK pada 27 sekolah
 - Penyediaan sarana dan prasarana SLB pada 27 sekolah
3. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD)
4. Meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi
5. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan melalui kegiatan yang dapat menunjang dan memberdayakan kemampuan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) demi tercapainya target yang telah ditetapkan
6. Meningkatkan angka kelulusan sekolah melalui:
 - Pemberian beasiswa kepada 802 orang siswa berprestasi dan kurang mampu
 - Seleksi Pembekalan dan Pembinaan ADEM dan ADIT untuk 50 siswa daerah 3T yang bisa sekolah di sekolah-sekolah unggulan.
 - Menyediakan sekolah-sekolah yang siap untuk pelaksanaan ujian-ujian yang sesuai dengan standar yang ada dengan memverifikasi Tempat Ujian Kompetensi Keahlian SMK. Pada tahun 2020 sejumlah 214 SMK sudah terlaksana kegiatan ini.

Dalam meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat masih ditemukan kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas sarana fisik

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

2. Rendahnya kualitas guru

Masih ada guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

3. Rendahnya kesejahteraan guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal.

4. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan

5. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan sehingga banyaknya lulusan yang menganggur.

6. Mahalnya biaya pendidikan sehingga masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.
7. Belum selarasnya program pembinaan pendidikan SMA dan SMK oleh Provinsi dengan program pembinaan pendidikan di kabupaten/kota.
8. Masih kurangnya akses digitalisasi pendidikan dan implementasi merdeka belajar.

Untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat di masa yang akan datang perlu diupayakan hal-hal berikut ini:

1. Mengkaji lagi perubahan kurikulum belajar agar kurikulum tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik dan pendidik
2. Peningkatan mutu guru melalui penyeleksian guru pendidik sebelum mereka mengajar pada suatu sekolah dan pemberian penghargaan kepada guru/staf pengajar.
3. Mengoptimalkan penyampaian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga tepat sasaran.
4. Pemberian Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk membantu biaya bagi murid yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan sama seperti anak lainnya.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
6. Pemerataan pendidikan di semua wilayah

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah Rp. 622.506.278.363,-. Anggaran ini tersebar pada 6 program yaitu program peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan (1 kegiatan), program pendidikan khusus dan layanan khusus (4 kegiatan), program peningkatan tata kelola pelayanan pendidikan (7 kegiatan),

program peningkatan akses dan pemerataan pendidikan menengah (8 kegiatan), program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan menengah (30 kegiatan) dan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan (19 kegiatan). Pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 622.506.278.363,- terealisasi sebesar Rp. 596.726.912.756 atau 95,86%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 25.779.365.607 (4,14%). Efisiensi tertinggi berasal dari pelaksanaan program peningkatan tata kelola pelayanan pendidikan dan program peningkatan akses dan pemerataan pendidikan menengah yang realisasi anggarannya < 90%. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat 97,54% dengan realisasi anggaran sebesar 95,86% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,68%.



Sasaran Strategis 3.1.2


Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan menjadi salah satu modal yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini menjadikan kesehatan sebagai salah satu komponen yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Perbaikan mutu kesehatan akan berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang berarti juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kondisi kesehatan bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sama halnya dengan pendidikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sumatera Barat. Tolok ukur/indikator kinerja yang digunakan untuk

mengukur meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup tahun n diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Untuk tahun 2020, angka harapan hidup ditargetkan 69,38. Penetapan target angka harapan hidup sebesar 69,38 mengacu pada target tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Jika dibandingkan dengan realisasi angka harapan hidup di tahun 2019 (69,01), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 0,37. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tergambar pada tabel 3.31.

Tabel 3. 31 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.2

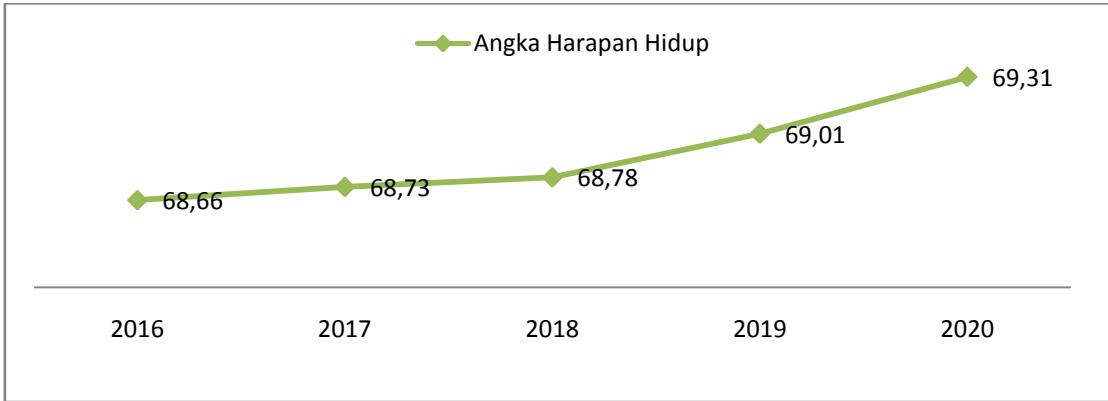
	Target	Realisasi	Capaian
 Angka Harapan Hidup	69,38	69,31	99,90

Indikator kinerja angka harapan hidup target 69,38, terealisasi 69,31 dengan tingkat capaian sebesar 99,90% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja angka harapan hidup tahun 2020 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat melalui Berita Resmi Statistik Nomor. 19/03/13/Th.XXIII tanggal 2 Maret 2020. Angka harapan hidup 69,31 berarti bayi yang lahir pada tahun 2019 memiliki harapan untuk hidup hingga usia 69,31 tahun.

Perkembangan angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0,1625 pertahun sebagaimana diuraikan pada grafik 22.

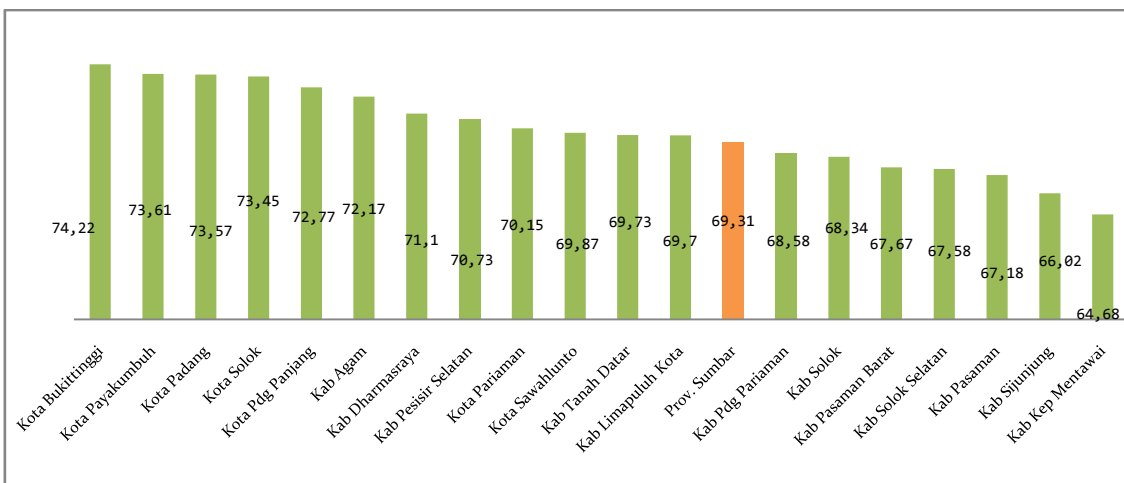
Grafik 22 Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat yang terus mengalami peningkatan juga tercermin dari peningkatan angka harapan hidup 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat. Dari 19 kabupaten/kota sebanyak 12 kabupaten/kota mempunyai angka harapan hidup di atas angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat. Angka harapan hidup di Kota Bukittinggi menempati urutan pertama tertinggi yaitu sebesar 74,22. Hal ini berarti, bayi yang lahir pada tahun 2019 di Kota Bukittinggi memiliki harapan untuk hidup hingga usia 74,22 tahun. Angka harapan hidup terendah adalah 64,68 yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Angka harapan hidup 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tergambar pada grafik 23.

Grafik 23 Angka Harapan Hidup 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Capaian indikator kinerja Angka harapan hidup sebesar 99,90% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi indikator kinerja angka harapan hidup tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.32.

Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Angka harapan hidup

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Angka Harapan Hidup	69,31	69,01	99,90	99,70	69,54

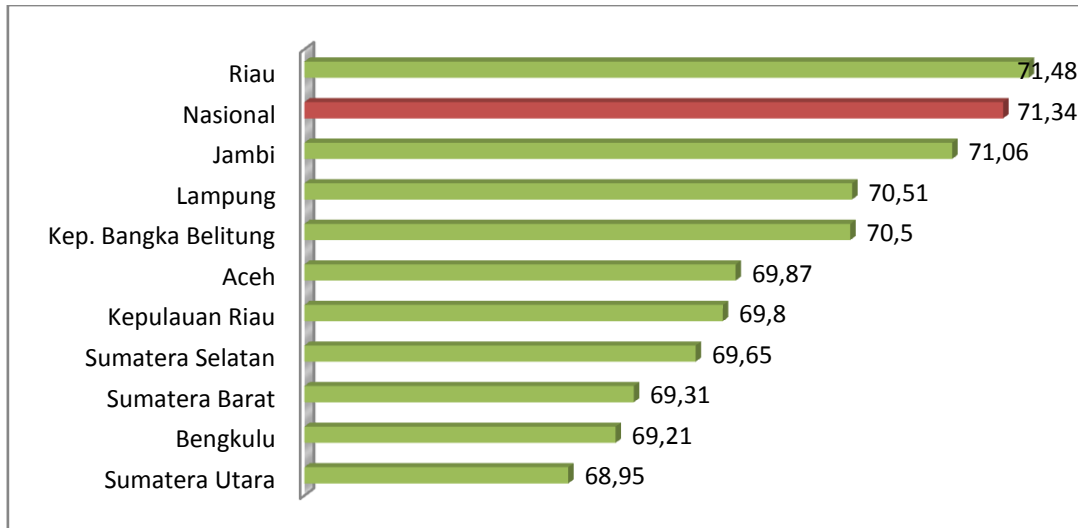
Realisasi angka harapan hidup tahun 2020 adalah 69,31, tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya <100%. Realisasi angka harapan hidup tahun 2019–2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebanyak 0,3 di tahun 2020. Sama halnya dengan realisasi, capaian kinerja tahun 2019-2020 juga menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan 0,2%.

Untuk tahun 2021, angka harapan hidup ditargetkan 69,54 atau meningkat 0,23 dari realisasi tahun 2020. Realisasi angka harapan hidup sebesar 69,31 menunjukkan pencapaian 99,67% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2020, target angka harapan hidup tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Angka harapan hidup Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 69,31 lebih rendah 2,17 dibandingkan dengan angka harapan hidup nasional. Jika dibandingkan dengan 9 Provinsi lain di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke 8. Provinsi Riau menempati urutan pertama tertinggi dengan angka harapan hidup sebesar 71,48 dan Provinsi Sumatera Utara yang terendah

dengan angka harapan hidup 68,95. Uraian angka harapan hidup Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional disajikan dalam grafik 24.

Grafik 24 Angka Harapan hidup Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2020



Sumber data: BRS No. 21/02/Th.XXIII, 17 Februari 2020

Pencapaian angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dipengaruhi juga oleh kondisi berikut ini:

1. Jumlah kematian ibu

Gambaran kematian ibu di Sumatera Barat setiap tahun diperoleh dari laporan rutin dari Kabupaten/kota. Jumlah kematian ibu di Sumatera Barat di tahun 2020 adalah sebanyak 123 orang. Jumlah ini berasal dari akumulasi jumlah kematian ibu di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 tahun (2018-2020), jumlah kematian ibu di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2020 dengan peningkatan sebanyak 7 orang dibandingkan kematian ibu tahun 2019. Jumlah kematian ibu dari tahun 2018-2020 disajikan pada tabel 3.33.

Tabel 3. 33 Jumlah kematian ibu tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

No	Nama Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
1	Kepulauan Mentawai	5	3	6
2	Pesisir Selatan	12	8	9
3	Solok	10	14	12
4	Sijunjung	5	6	7
5	Tanah Datar	11	5	6
6	Padang Pariaman	2	6	3
7	Agam	12	3	9
8	Lima Puluh Kota	2	11	6
9	Pasaman	7	10	4
10	Solok Selatan	8	4	6
11	Dharmasraya	4	6	2
12	Pasaman Barat	13	8	18
13	Padang	17	16	21
14	Kota Solok	0	1	1
15	Sawalunto	0	3	2
16	Padang Panjang	0	0	4
17	Bukittinggi	1	2	6
18	Payakumbuh	1	2	1
19	Pariaman	0	4	0
Sumatera Barat		111	116	123

Sumber data: Dinas Kesehatan Prov. Sumbar

2. Jumlah kematian neonatal

Kematian neonatal adalah kasus kematian bayi lahir hidup yang terjadi pada usia 0 – 28 hari kehidupannya. Jumlah kematian neonatal di Provinsi Sumatera Barat merupakan akumulasi dari jumlah kematian neonatal se Sumatera Barat berdasarkan laporan rutin dari Kabupaten/Kota. Dalam kurun waktu 2018-2020, jumlah kematian neonatal berfluktuatif yaitu meningkat di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020. Jumlah kematian neonatal dari tahun 2018-2020 disajikan pada tabel 3.34.

Tabel 3. 34 Jumlah kematian neonatal tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

No	Kabupaten / Kota	2018	2019	2020
1	Kepulauan Mentawai	3	18	25
2	Pesisir Selatan	82	72	48
3	Solok	40	41	50
4	Sijunjung	30	33	32
5	Tanah Datar	31	39	37
6	Padang Pariaman	15	24	17
7	Agam	49	48	52

No	Kabupaten / Kota	2018	2019	2020
8	Lima Puluh Kota	42	37	40
9	Pasaman	26	20	30
10	Solok Selatan	9	7	10
11	Dharmasraya	41	36	30
12	Pasaman Barat	57	84	70
13	Padang	69	79	64
14	Kota Solok	5	4	6
15	Sawalunto	9	11	11
16	Padang Panjang	8	5	3
17	Bukittinggi	2	3	5
18	Payakumbuh	12	7	19
19	Pariaman	23	21	6
	Sumatera Barat	553	589	555

Sumber data: Dinas Kesehatan Prov. Sumbar

3. Jumlah kematian bayi

Kematian bayi adalah kasus kematian bayi lahir hidup yang terjadi pada usia 0 – 11 bulan hari kehidupannya. Jumlah kematian bayi Provinsi Sumatera Barat merupakan akumulasi kematian bayi dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dalam kurun waktu 3 tahun (2018-2020) jumlah kematian bayi berfluktuatif meningkat di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020. Jumlah kematian bayi dari tahun 2018-2020 disajikan pada tabel 3.35.

Tabel 3. 35 Jumlah kematian bayi tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

No	Kabupaten / Kota	2018	2019	2020
1	Kepulauan Mentawai	6	39	29
2	Pesisir Selatan	94	78	58
3	Solok	63	60	26
4	Sijunjung	70	58	47
5	Tanah Datar	37	48	54
6	Padang Pariaman	18	30	20
7	Agam	70	75	64
8	Lima Puluh Kota	61	60	46
9	Pasaman	36	31	33
10	Solok Selatan	14	10	23
11	Dharmasraya	58	52	37
12	Pasaman Barat	74	94	82
13	Padang	91	106	72
14	Kota Solok	8	7	6
15	Sawalunto	15	14	17
16	Padang Panjang	13	7	4
17	Bukittinggi	2	10	4

No	Kabupaten / Kota	2018	2019	2020
18	Payakumbuh	16	9	14
19	Pariaman	25	17	0
	Sumatera Barat	771	805	636

4. Prevalensi stunting

Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya. Berdasarkan aplikasi Sigizi terpadu e-PPGBM penimbangan bulan agustus 2020 umur 0-59 bulan, prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) di Sumatera Barat tahun 2020 adalah 14,3%. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 13,17% dibandingkan dengan tahun 2019.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi.
Akreditasi menilai kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap standar pelayanan. Fasilitas kesehatan yang ditingkatkan adalah puskesmas dan rumah sakit. Pada tahun 2020, 271 Puskesmas sudah terakreditasi. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 115 dibandingkan dengan kondisi 2019 (131 puskesmas). Untuk rumah sakit yang terakreditasi di tahun 2020 masih sebanyak 4 rumah sakit, jumlah yang sama dengan tahun 2019.
2. Tetap melaksanakan pelayanan kesehatan di masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana di atur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru.
3. Pembentukan Tim Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Provinsi Sumatera Barat tahun 2020

4. Penetapan 4 kabupaten/kota di Sumatera Barat sebagai lokus *stunting* Prioritas Nasional pada tahun 2018-2020 yang melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Pelayanan imunisasi rutin kepada anak balita di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6. Meningkatkan jaminan kesehatan terhadap masyarakat. Tahun 2020, sebanyak 81,95% masyarakat Sumatera Barat telah memiliki jaminan kesehatan. Angka ini meningkat 1,19% dari kondisi tahun 2019 (80,76%).
7. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui supervisi fasilitatif.
8. Mengiatkan program Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) secara berkelanjutan melalui berbagai media.

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masih ditemukan kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Kompetensi tenaga kesehatan yang belum maksimal.
2. Belum maksimalnya dukungan dana kegiatan APBD dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
3. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pola hidup sehat.
4. Isu negatif mengenai halal/haramnya vaksin yang masih beredar di kalangan masyarakat.
5. Pandemi covid 19 berdampak pada ketakutan masyarakat untuk mengunjungi fasilitas kesehatan.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di masa yang akan datang perlu diupayakan hal-hal berikut ini:

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan.
2. Mempertahankan pengalokasian anggaran 10% untuk meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan.
3. Memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait pola hidup sehat.
4. Melakukan peningkatan penjaminan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.
5. Konsisten melaksanakan Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah Rp. 532.430.769.927,-. Anggaran ini tersebar pada 27 program yaitu program obat dan pembekalan kesehatan (5 kegiatan), program upaya kesehatan masyarakat (19 kegiatan), program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (9 kegiatan), program perbaikan gizi masyarakat (5 kegiatan), program pengembangan lingkungan sehat (4 kegiatan), program pencegahan dan penanggulangan penyakit (menular/tidak menular) (9 kegiatan), program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/RS. paru/ RS. mata (24 kegiatan), program peningkatan sumber daya kesehatan (1 kegiatan), program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/RS. paru/ RS. mata (1 kegiatan), program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan (1 kegiatan), program pelayanan kesehatan penduduk miskin (1 kegiatan), program peningkatan pelayanan BLUD (6 kegiatan), program peningkatan kualitas hidup perempuan (4 kegiatan), program peningkatan kualitas keluarga (1 kegiatan),

program peningkatan sistem data gender dan anak (2 kegiatan), program peningkatan perlindungan perempuan (3 kegiatan), program peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak (3 kegiatan), program peningkatan perlindungan khusus anak (6 kegiatan), program diversifikasi pangan (2 kegiatan), program peningkatan ketahanan pangan (27 kegiatan), program keluarga berencana (3 kegiatan), program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga (2 kegiatan), program peningkatan pengendalian penduduk (3 kegiatan), program peningkatan peran serta kepemudaan (2 kegiatan), program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga (3 kegiatan), program pengembangan organisasi pemuda dan manajemen olahraga (3 kegiatan) dan program peningkatan penyadaran kepemudaan (2 kegiatan). Pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 532.430.769.927,- terealisasi sebesar Rp. 457.992.819.458,- atau 86,02%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 74.437.950.469,- (13,98%). Efisiensi tersebut berasal dari pelaksanaan 9 program yang realisasi anggarannya <90%. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 99,90% dengan realisasi anggaran sebesar 86,02% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 13,88%.

Misi 4

MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan 4.1 Meningkatkan Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi serta Daya Saing Daerah

Pembangunan daerah perlu memperhatikan potensi daerah. Salah satunya dengan menelaah PDRB untuk melihat adanya potensi basis dan non basis dalam rangka mengoptimalkan hasil pembangunan sehingga mendapatkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. Jika pemerintah menginginkan daerahnya berdaya saing, maka program pembangunannya harus berangkat dari pengembangan potensi ekonomi unggulannya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah sebagai tujuan untuk mendukung terwujudnya misi 4 RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Tujuan tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Penetapan indikator tersebut diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n. Pencapaian tujuan meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah diuraikan pada tabel 3.36.

Tabel 3. 36 Realisasi indikator kinerja tujuan 4.1

Indikator Kinerja	2020	2019
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,60	5,05
Indeks Gini	0,301	0.307

Berdasarkan tabel 3.36 dapat diketahui:

1. Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,6%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 6,65%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan sektor utama perekonomian Sumatera Barat yaitu sektor LU Perdagangan besar-eceran (-1,14%) dan LU Transportasi dan Pergudangan (-16,10%). Sedangkan sektor LU Pertanian, kehutanan dan perikanan terjadi perlambatan pertumbuhan sebesar 1,19%.
2. Realisasi indeks gini tahun 2020 adalah sebesar 0,301. Jika dibandingkan dengan indeks gini tahun 2019, indeks gini tahun 2020 menurun sebesar 0,006. Kondisi ini menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan di tahun 2020 semakin menurun dibandingkan dengan kondisi 2019 dengan penurunan sebesar 0,006.

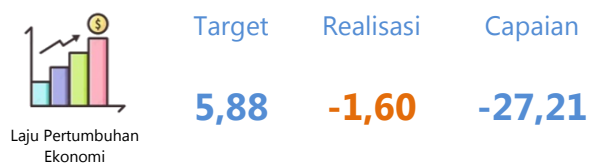
Berdasarkan realisasi laju pertumbuhan ekonomi dan rasio gini yang dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan misi 4 belum tercapai dengan maksimal. Selain dua indikator tersebut, kondisi perekonomian Sumatera Barat di tahun 2020, juga terlihat dari:

1. Menurunnya pendapatan per kapita masyarakat Sumatera Barat dari Rp 45,29 juta di tahun 2019 menjadi Rp. 44,03 juta di tahun 2020. Terjadinya penurunan sebesar Rp 1,26 juta sangat berhubungan erat dengan penurunan Laju PDRB Sumatera Barat yang berkontraksi sebesar 1,6%.

2. Tidak tercapainya pertumbuhan investasi yang telah ditetapkan sebesar 3,83%, namun mengalami kontraksi sebesar 8,71% pada tahun 2020 ini sehingga terjadi penurunan sebesar 22,47% dibandingkan tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan sebesar 13,76%. Penurunan pertumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh penurunan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 20,06%, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tumbuh namun melambat sebesar 2,63%. Penurunan pertumbuhan ini terjadi seiring dengan faktor *wait and see* dari para investor khususnya Investor Asing di tengah perekonomian domestik maupun global yang belum pasti seiring dengan pandemi COVID-19 yang masih terjadi.
3. Angka kemiskinan Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 6,56%, meningkat 0,27% dibandingkan tahun 2019 sebesar 6,29%.
4. Angka pengangguran Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 6,88%, meningkat 1,55% dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,33%.
5. Meningkatnya nilai ekspor Sumatera Barat tahun 2020 sebesar US\$ 1531,84 juta, naik US\$ 192,81 dibandingkan tahun 2020.

Uraian pencapaian masing-masing indikator kinerja tujuan dijelaskan sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi



Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,88%. Penetapan target laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,88% mengacu pada target tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Target ini meningkat 0,83% dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 (5,05%).

Ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 tumbuh melambat sebesar 1,60%, masih sangat jauh mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 5,88% dengan tingkat capaian kinerja negatif 27,21 %, termasuk kategori keberhasilan kurang baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 12/02/13/Th.XXIV, 5 Februari 2021. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang mengalami kontraksi sebesar 1,60%, jauh menurun dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,05%. Perlambatan yang terjadi utamanya disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19, dimana kontraksi terbesar dialami pada triwulan II tahun 2020 sebesar -4,90% (yoy) sejak PSBB mulai ditetapkan, dan mulai membaik pada tw III walaupun masih mengalami kontraksi sebesar -2,87% (yoy) sejak adaptasi kebiasaan baru yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Memasuki triwulan IV ekonomi Sumatera Barat terus membaik walaupun masih mengalami kontraksi sebesar 1,60%, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional yang terus berjalan.

Dari sisi lapangan usaha (LU), terbatasnya pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari perlambatan pertumbuhan pada tiga sektor penopang utama, yaitu sektor-sektor perdagangan besar-eceran, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor industri pengolahan. Keadaan ini digambarkan pada tabel 3.37.

Tabel 3. 37 PDRB Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha atas Dasar harga konstan 2010 Tahun 2018-2020

Lapangan Usaha		Nilai PDRB berdasarkan Harga Konstan 2010			Pertumbuhan PDRB		
		2018	2019	2020	2018 thd 2017	2019 thd 2018	2020 thd 2019
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	36,65	37,61	54,20	3,56	2,62	1,19
2	Pertambangan dan Penggalian	6,71	7,12	10,34	5,84	6,11	-1,31
3	Industri Pengolahan	16,45	16,13	20,92	-0,54	-1,95	-0,54
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,18	0,25	5,88	0,00	-6,81
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,16	0,17	0,22	0,00	6,25	-1,28
6	Konstruksi	15,07	16,34	24,66	7,03	8,43	-2,92
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	25,99	27,89	38,16	7,04	7,31	-1,14
8	Transportasi dan Pergudangan	19,97	20,92	25,28	6,45	4,76	-16,10
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,83	1,98	2,99	8,28	8,20	-15,95
10	Informasi dan Komunikasi	11,73	12,76	15,58	8,61	8,78	9,76
11	Jasa keuangan dan asuransi	4,67	4,77	7,35	1,08	2,14	1,34
12	Real Estate	3,17	3,38	5,00	4,62	6,62	0,22
13	Jasa Perusahaan	0,72	0,77	1,07	4,35	6,94	-3,98
14	Adm Pemerintahan, pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	9,17	9,83	16,24	5,89	7,20	-0,69
15	Jasa Pendidikan	6,37	6,88	11,39	7,06	8,01	5,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,31	2,49	3,93	7,44	7,79	8,83
17	Jasa Lainnya	2,88	3,1	4,55	7,87	7,64	-10,10
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		164,03	172,32	169,46	5,16	5,05	-1,60

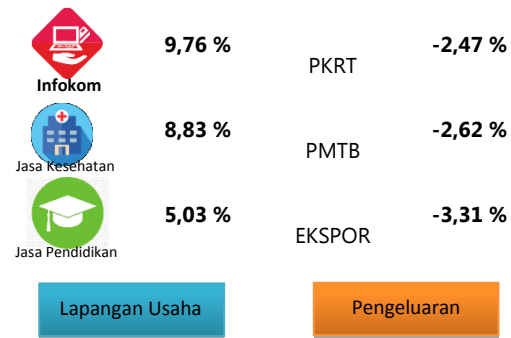
Sumber data: Berita Resmi Statistik Nomor 12/02/13/Th.XXIV, 5 Februari 2021

Berdasarkan tabel 3.37 terdapat tiga lapangan usaha dengan kontraksi terdalam antara lain lapangan usaha penyediaan, transportasi dan pergudangan terkontraksi 16,10%, Akomodasi dan makan minum yang terkontraksi sebesar 15,95%, dan jasa lainnya yang terkontraksi sebesar 10,10%. Sementara itu, kinerja lapangan usaha yang terkait penanganan pandemi COVID-19 tetap tumbuh baik, yaitu LU Informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 9,76% dipengaruhi oleh peningkatan pemasangan internet di rumah masyarakat, serta

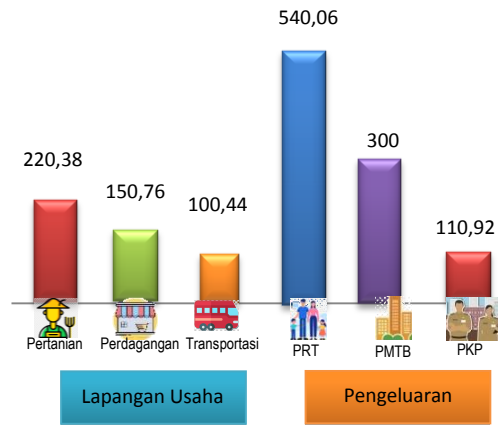
LU jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh sebesar 8,83% seiring dengan penanganan COVID-19 yang dilakukan.

Selain dari lapangan usaha, dari sisi pengeluaran kontribusi PDRB terbesar berada pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, ekspor luar negeri dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Pertumbuhan semua pengeluaran di tahun 2020 mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan tahun 2019, namun walaupun masih kontraksi, pada triwulan III dan IV tahun 2020 perbaikan ekonomi terjadi pada mayoritas komponen pengeluaran. Perbaikan didorong utamanya oleh konsumsi pemerintah 35,51% (q-to-q), diikuti oleh ekspor LN sebesar 30,04% (q-to-q), dan pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) sebesar 3,92% (q-to-q). PMTB mengalami perbaikan seiring dengan meningkatnya realisasi PMDN dan realisasi belanja modal yang lebih optimal pasca PSBB pada triwulan II. Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah juga mengalami perbaikan seiring dengan belanja yang lebih optimal serta realisasi program pemulihan ekonomi pemerintah pusat dan daerah, dan perbaikan pada ekspor LN seiring dengan semakin pulihnya akses perdagangan antar negara dan membaiknya permintaan untuk komoditas unggulan Sumatera Barat yaitu CPO dan karet. Disisi lain konsumsi Rumah Tangga sedikit mengalami penurunan karena rumah tangga cenderung menahan konsumsinya di tengah pandemi yang masih berlangsung.

Pertumbuhan PDRB 2020 c-to-c tertinggi (%)



Kontribusi PDRB 2020 tertinggi (%)



Capaian indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi sebesar -27,21% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.38.

Tabel 3. 38 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja laju pertumbuhan ekonomi

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,6	5,05	-27,21	86,62	6,54

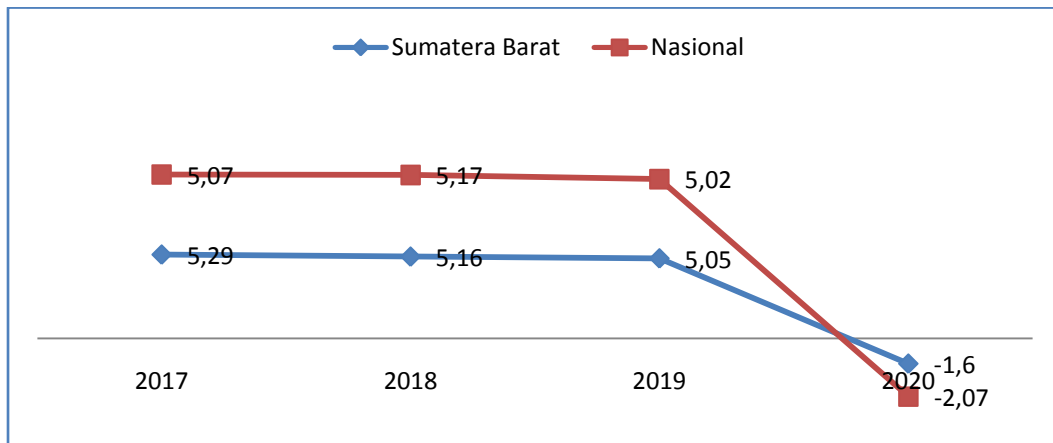
Realisasi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 adalah -1,6%, belum mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya <100%. Jika dibandingkan dengan kondisi 2019, laju pertumbuhan ekonomi menurun cukup tinggi. Begitupun dengan capaian indikator kinerja ini yang juga menunjukkan penurunan.

Untuk tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,54%, artinya dari kondisi 2020 ini Sumatera Barat harus mengejar peningkatan sebesar 8,14%. Melihat angka yang sangat tinggi untuk mengejar ketertinggalan

akibat kontraksi yang dialami, perlu adanya perubahan dalam proyeksi target angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021 karena pertumbuhan ekonomi 2021 masih dibayang-bayangi oleh dampak pandemi COVID-19. Namun optimis kondisi akan semakin membaik walaupun lebih lambat, tapi perlahan akan menguat di tahun-tahun berikutnya seiring dengan longgarnya pembatasan sosial sebagai dampak pelaksanaan vaksin COVID-19 nanti.

Tahun 2020 Sumatera Barat menjadi Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah keempat di Sumatera setelah Provinsi Kepulauan Riau (-3,80%), Bangka Belitung (-2.30%) dan Lampung (-1,67%) dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi Sumatera yang sebesar -1,19 (yoy) namun masih berada di atas pertumbuhan nasional yang sebesar -2,07 % (yoy). Gambaran laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2020 disajikan pada grafik 25.

Grafik 25 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2020 (%)



Sumber data: Berita Resmi Statistik No.13/02/ThXXIV, 5 Februari 2021

2. Indeks Gini



Indeks Gini

Target	Realisasi	Capaian
0,328	0,301	108,23%

Indeks gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Semakin kecil angka indeks gini maka akan semakin baik, karena mengindikasikan bahwa pemerataan distribusi ekonomi penduduk di suatu wilayah yang semakin baik atau semakin minimnya ketimpangan ekonomi penduduk suatu wilayah. Nilai indeks gini berkisar antar 0 dan 1. Semakin tinggi/mendekati 1, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi dan sebaliknya. Selain itu, penurunan ketimpangan juga dapat mengindikasikan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial.

Tahun 2020, indeks/rasio gini ditargetkan 0,328. Penetapan target indeks/rasio gini mengacu pada target tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Target ini meningkat 0,021 dari indeks gini tahun 2019 (0,307%).

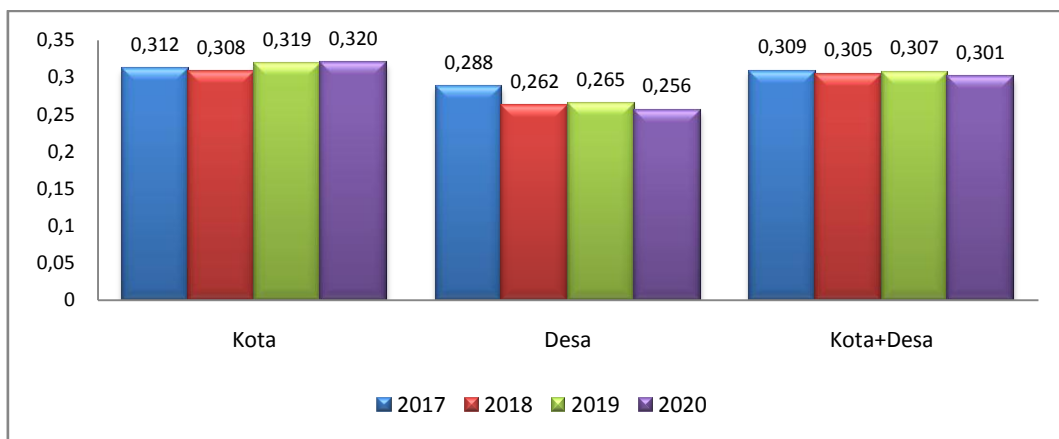
Realisasi tahun 2020 mencapai 0,301 dengan tingkat capaian kinerja 108,23%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indeks/rasio gini diukur berdasarkan data tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat September 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat melalui Berita Resmi Statistik Nomor 14/02/13/ThXXIV, 15 Februari 2021.

Pada tahun 2020, indikator ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi Sumatera Barat makin membaik. Hal tersebut tergambar dari menurunnya indeks gini Provinsi Sumatera Barat dari 0,307 pada tahun 2019 menjadi 0,301 pada tahun 2020. Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks/rasio gini di

daerah perkotaan selalu lebih besar dari pada daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan area perkotaan lebih tinggi dibanding area perdesaan. Pada September 2020 indeks/rasio gini perkotaan adalah 0,320 dan naik 0,001 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (0,319). Pada wilayah perdesaan nilai indeks/rasio gini September 2020 menunjukkan angka 0,256 turun sebesar 0,009 dari September 2019 (0,265). Indeks/rasio gini perkotaan dan perdesaan Sumatera Barat selama empat tahun terakhir sebagaimana tergambar pada grafik 26.

Grafik 26 Tren Indeks/Rasio Gini Sumatera Barat September 2018-2020



Sumber data : Berita Resmi Statistik No.14/02/13/ThXXIV, 15 Februari 2021

Capaian indikator kinerja indeks/rasio gini sebesar 108,23% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang kedua.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks/rasio gini tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.39.

Tabel 3. 39 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks/rasio gini

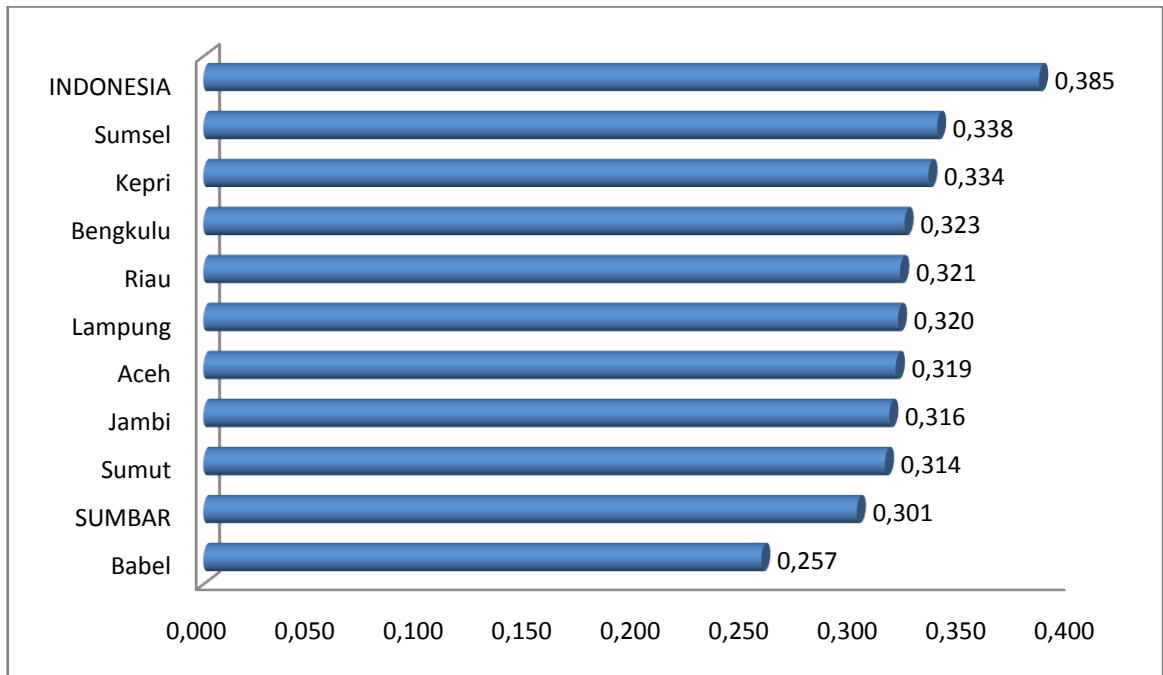
No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks/rasio gini	0,301	0,307	108,23	106,40	0.327

Indeks/rasio gini di tahun 2020 adalah 0.301, tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya >100%. Kondisi ini menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan di tahun 2020 semakin menurun dibandingkan dengan kondisi 2019 dengan penurunan sebesar 0,006. Capaian kinerja indikator ini tahun 2019-2020 menunjukkan angka >100% dan mengalami peningkatan sebesar 1,83 di tahun 2020.

Indeks/rasio gini tahun 2021 ditargetkan tercapai 0,327. Realisasi 2020 menunjukkan ketercapaian yang melebihi target tahun 2021 ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan selalu berupaya untuk menurunkan indeks/rasio gini setiap tahunnya. Oleh karena itu, target tahun 2021 akan disempurnakan/dikaji kembali penetapannya.

Nilai ketimpangan ekonomi di Sumatera Barat relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nilai Provinsi se Sumatera (0,314) dan keseluruhan Indonesia (0,385). Angka indeks/rasio gini Sumatera Barat masih terbilang cukup baik, yaitu berada pada urutan terendah ke-2 di Sumatera setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (0,257) dan ke-4 di nasional setelah Kep. Babel (0,257), Maluku Utara (0,290) dan Kalimantan Utara (0,300), sebagaimana disajikan pada grafik 27.

Grafik 27 Rasio gini Sumatera Barat dibandingkan Provinsi Lain di Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2020



Sumber data : Berita Resmi Statistik No.17/02/ThXXIV, 15 Februari 2021

Untuk mencapai tujuan meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah, telah ditetapkan 4 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut :



Sasaran Strategis 4.1.1 **Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat**

Pendapatan masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan daerah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita. Karena data Total personal income/pendapatan per kapita total sebuah daerah jarang sekali ada, sehingga PDRB per kapita lebih

sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur pendapatan masyarakat. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya Jumlah Pendapatan masyarakat disajikan pada tabel 3.40.

Tabel 3. 40 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4.1.1

	Target	Realisasi	Capaian
 Pendapatan per Kapita	48,19 (Juta Rupiah)	44,03 (Juta Rupiah)	91,37%

Tahun 2020, PDRB perkapita ditargetkan tercapai 48,19 juta rupiah. Penetapan target PDRB perkapita mengacu pada target tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Target ini meningkat 2,9 juta rupiah dari PDRB perkapita tahun 2019 (45,29 juta rupiah).

PDRB perkapita target 48,19 juta rupiah, terealisasi 44,03 juta rupiah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 91,37% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 12/02/13/Th.XXIV, 5 Februari 2021. Perhitungannya adalah dengan membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang digunakan untuk membagi adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2020 yaitu 5,5 juta jiwa. Total PDRB Sumatera Barat pada tahun 2020 berdasarkan harga berlaku adalah sebesar 242,12 triliun rupiah. Realisasi indikator kinerja PDRB perkapita dihitung sebagai berikut :

$$\text{PDRB per Kapita (juta rupiah)} = \frac{242,12 \text{ triliun triliun}}{5,5 \text{ juta jiwa}} = \text{Rp } 44,03 \text{ juta}$$

Ket: Total PDRB Tahun 2020 = Rp. 242,12 Triliun
 Jumlah Penduduk pertengahan tahun 2020= 5,5 juta jiwa

Capaian indikator kinerja PDRB perkapita sebesar 91,37% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja PDRB perkapita tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.40.

Tabel 3. 41 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja PDRB perkapita

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	PDRB per kapita	44,03 juta	45,29 juta	91,37	99,67	48,91 juta

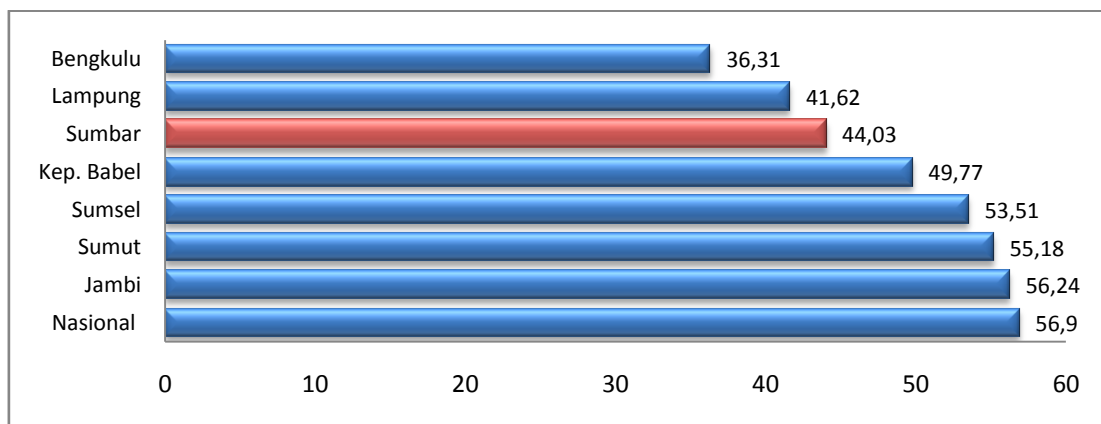
Realisasi PDRB perkapita tahun 2020 adalah 44,03 juta, tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian indikator kinerja ini <100%. PDRB perkapita tahun 2020 menurun 1,26 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2019. Sama halnya dengan realisasi, capaian indikator kinerja PDRB per kapita tahun 2019-2020 juga menunjukkan tren negatif dengan penurunan sebesar 8,3%.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah di tahun 2021 sebesar 48,91 juta rupiah, dibutuhkan pencapaian sebesar 4,88 juta rupiah lagi selama setahun ke depan. Seiring dengan Pertumbuhan PDRB, peningkatan pendapatan per kapita tahun 2021 juga masih dibayang-bayangi oleh dampak pandemi COVID-19. Namun optimis kondisi akan semakin membaik walaupun lebih lambat.

Jika dibandingkan dengan PDRB perkapita nasional sebesar 56,9 juta rupiah, PDRB perkapita Sumatera Barat masih berada jauh di bawah angka Nasional dengan selisih sebesar 12,87 juta rupiah. Terhadap 9 Provinsi lain di Pulau Sumatera (kecuali Kepri, Riau, dan Aceh karena belum ada data publikasi), PDRB

per Kapita Sumatera Barat berada pada urutan kelima setelah Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung. PDRB perkapita tertinggi dari 7 Provinsi di pulau Sumatera adalah Jambi kemudian diikuti oleh Sumatera Utara. Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional disajikan pada grafik 28.

Grafik 28 PDRB perkapita Menurut Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2020 (Juta Rupiah)



Sumber data : BRS per provinsi dan Nasional, tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2020

Dalam meningkatkan Pendapatan per kapita masyarakat Sumatera Barat tahun 2020 seiring dengan meningkatkan faktor-faktor pendukung pertumbuhan PDRB, namun masih banyak hambatan yang dihadapi, antara lain pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial-ekonomi seiring dengan pandemi COVID-19 yang meluas pada triwulan II 2020 mengakibatkan, diantaranya:

- a. Penurunan kinerja Lapangan Usaha yang menjadi penopang utama perekonomian masyarakat Sumatera Barat, yaitu transportasi dan pergudangan serta perdagangan besar dan eceran diakibatkan berkurangnya wisatawan dan mobilitas masyarakat. Kemudian melambatnya pertumbuhan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

- b. Melambatnya ekspor jasa, khususnya pariwisata, konsumsi non makanan dan investasi dengan sektor yang paling terdampak terjadi di sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Kontruksi.
- c. Lapangan Usaha pertambangan dan penggalian serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang melambat signifikan sejalan dengan kinerja ekspor yang melambat. Fluktuasi harga CPO dan Karet dunia menjadi faktor utama penekan kinerja LU industri pengolahan.
- d. Pengeluaran Rumah Tangga (PRT) tertahan disebabkan oleh berkurangnya pendapatan masyarakat seiring dengan kebijakan pembatasan kegiatan yang diterapkan, tutupnya sebagian kegiatan usaha dan turunnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Sumatera Barat.
- e. Pada lapangan usaha industri pengolahan, sebagian besar skala usaha industri di Sumatera Barat masih berskala industri kecil, sebagian besar hasil usaha masih digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan relatif kecil digunakan untuk pemupukan modal usaha. Kemudian, masih kurangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan produksi sektor industri dibandingkan sektor usaha lainnya.
- f. Pada lapangan usaha perdagangan, masih belum optimalnya fasilitasi bagi pedagang dan pelaku ekonomi kreatif untuk berekspresi dalam mendukung penguatan pariwisata di Sumatera Barat, masih kurangnya kesadaran pedagang pasar dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar, sehingga mengurangi kenyamanan dalam berbelanja di pasar tradisional, serta masih kurangnya keberpihakan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri.

Untuk menumbuhkan kembali ekonomi Sumatera Barat agar pendapatan masyarakat kembali meningkat, telah dilakukan beberapa upaya antara lain:

1. Membuka kembali aktivitas perekonomian pasca penerapan PSBB pada triwulan II tahun 2020, baik pusat perbelanjaan, perhotelan, restoran, tempat wisata dan rekreasi, dengan mematuhi aturan protokol kesehatan demi pencegahan penyebaran COVID-19.
2. Memberikan bantuan pemberdayaan bagi UMKM yang terdampak COVID-19, dengan cara optimalisasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), lembaga Sosial, hingga program sosial dari berbagai lembaga Zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang ada disumbar.
3. Mempertahankan proyek investasi besar yang ada di Sumbar yang saat ini masih berjalan seperti ruas tol trans Sumatera, Stadion Utama dan beberapa lainnya. Proyek tersebut cukup menopang laju pertumbuhan ekonomi di Sumbar sebab dana yang digelontorkan pemerintah cukup besar.
4. Mengedukasi dan mengembangkan digitalisasi UKM secara optimal. Salah satunya strategi penjualan melalui platform digital, seperti media sosial atau *e-commerce*. Pasalnya, banyak pelaku UKM yang masih kesulitan untuk menjual produk dikarenakan terbiasa berjualan langsung kepada konsumen.

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berupaya untuk mengarahkan penggunaan produk UKM daerah sehingga akan berdampak pada pertumbuhan sektor UKM di Sumatera Barat dan mengoptimalkan produksi hasil produk unggulan Provinsi Sumatera Barat.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pendapatan masyarakat adalah Rp. 75.133.221.029,-. Anggaran ini tersebar pada 32 program yaitu program pengamanan sumber daya hewani (9 kegiatan), program pengolahan dan pemasaran hasil (5 kegiatan), program peningkatan sarana dan prasarana (1 kegiatan), program pengembangan kawasan sentra

produksi dan agribisnis (1 kegiatan), program peningkatan produksi dan produktifitas (14 kegiatan), program peningkatan kapasitas kelembagaan dan sdm (6 kegiatan), program peningkatan perlindungan konsumen (3 kegiatan), program pengembangan perdagangan dalam negeri (4 kegiatan), program pengembangan industri kecil dan menengah (5 kegiatan), program peningkatan kualitas produk industri (5 kegiatan), program pemberdayaan penyuluhan (2 kegiatan), program pengolahan dan pemasaran hasil (4 kegiatan), program peningkatan sarana dan prasarana (11 kegiatan), program pengembangan kawasan sentra produksi dan agribisnis (7 kegiatan), program peningkatan produksi dan produktifitas (22 kegiatan), program peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM (17 kegiatan), program pengembangan pemasaran pariwisata (6 kegiatan), program pengembangan ekonomi kreatif (4 kegiatan), program pengembangan kelembagaan, SDM pariwisata dan ekonomi kreatif (6 kegiatan), program pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata (3 kegiatan), program pengolahan dan pemasaran hasil (12 kegiatan), program pengembangan ekonomi maritim (12 kegiatan), program rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan (17 kegiatan), program peningkatan sarana dan prasarana (2 kegiatan), program pengembangan kawasan sentra produksi dan agribisnis (1 kegiatan), peningkatan produksi dan produktifitas (9 kegiatan), program peningkatan kapasitas kelembagaan dan sdm (16 kegiatan), program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi (9 kegiatan), program peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi (12 kegiatan), program peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM (12 kegiatan), program peningkatan SDM pertanian (13 kegiatan), dan program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pertanian (1 kegiatan) dan Peningkatan SDM Pertanian (1 kegiatan). Pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya pendapatan masyarakat.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 75.133.221.029,-, terealisasi sebesar Rp. 67.343.486.581,28 atau 89,63%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya pendapatan masyarakat terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 7.789.734.448,- (10,37%). Efisiensi tertinggi berasal dari pelaksanaan program pengembangan ekonomi maritim, program rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, program peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi, program peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM dan program peningkatan sarana dan prasarana yang realisasi anggarannya <90%. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya jumlah pendapatan masyarakat 91,37% dengan realisasi anggaran sebesar 89,63% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,74%.



Sasaran Strategis 4.1.2 **Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah**

Guna mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah yang merupakan misi keempat RPJMD 2016-2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di daerah yang berperan sebagai ujung tombak agar mampu bertindak lebih kreatif untuk meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan daya saing untuk menarik investasi dari dalam maupun luar negeri. Investasi menjadi kunci dalam upaya penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan. Investasi menjadi semacam *window of opportunity* bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengelolaan potensi ekonomi melalui pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dan kerja sama mutualistik antara investor dengan pengusaha lokal. Untuk itu, pemerintah daerah memiliki peran yang strategis dalam upaya

menarik investasi. Untuk mengukur keberhasilan pencapaiannya digunakan indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi yang disajikan pada tabel 3.42.

Tabel 3. 42 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4.1.2

	Target	Realisasi	Capaian
 Persentase Pertumbuhan Investasi	3,83%	-8,71%	-227,42%

Target persentase pertumbuhan investasi tahun 2020 ditetapkan sebesar 3,83%. Penetapan target mengacu pada target tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Nilai investasi berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN).

Pertumbuhan investasi Sumatera Barat tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 8,71% dengan tingkat capaian kinerja -227,42% termasuk kategori kurang baik.

Realisasi persentase pertumbuhan investasi diukur berdasarkan data investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nilai Investasi tahun 2020 terdiri dari PMA sebesar \$125.589,40 ribu atau Rp.1.808.487.360.000- (Kurs Rp. 14.400/USD) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 3.106.178.700.000,- dengan nilai total investasi sebesar Rp. 4.914.666.060.000,-. Formula perhitungan persentase pertumbuhan investasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pertumbuhan Investasi} = \frac{\text{Rp. 4.914.666.060.000} - \text{Rp. 5.383.345.300.000}}{\text{Rp. 5.383.345.300.000}} \times 100 = - 8,71 \%$$

Ket : Realisasi Investasi Tahun 2020 = Rp. 4.914.666.060.000,-
Realisasi Investasi Tahun 2019 = Rp. 5.383.354.300.000,-

Berdasarkan sektor usaha, realisasi PMA dan PMDN tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.43.

Tabel 3. 43 Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2020 berdasarkan sektor usaha

No	Sektor usaha menurut Perka No.17 Tahun 2015 BKPM RI	Penanaman Modal Asing (PMA)		Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	
		Ribu USD	%	Rupiah (juta)	%
I.	SEKTOR PRIMER	19.073,50	15,19	937.621,60	30,19
1	Tanaman Pangan dan perkebunan	4.999,90	3,98	856.232,70	27,57
2	Peternakan	-	-	7.050,00	0,23
3	Kehutanan	-	-	7.949,20	0,26
4	Perikanan	-	-	970,00	0,03
5	Pertambangan	14.073,60	11,21	65.419,70	2,11
II.	SEKTOR SEKUNDER	90.374,70	71,96	278.017,70	8,95
1	Industri Makanan	76.715,60	61,08	242.330,80	7,80
2	Industri Tekstil	-	-	1.200,00	0,04
3	Industri Barang dari kulit dan alas kaki	-	-	72,10	0,00
4	Industri kayu	-	-	6.893,30	0,22
5	Industri Kertas dan Percetakan	-	-	-	-
6	Industri Kimia dan Farmasi	12.208,80	9,72	14.400,50	0,46
7	Industri Karet dan Plastik	1.450,30	1,15	3.664,10	0,12
8	Industri Mineral non Logam	-	-	9.456,90	0,30
9	Industri Logam, Mesin dan Elektronika	-	-	-	-
10	Industri instrumen kedokteran, Presisi, Optik dan jam	-	-	-	-
11	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya	-	-	-	-
12	Industri lainnya	-	-	-	-
III.	SEKTOR TERSIER	16.141,20	12,85	1.890.539,40	60,86
1	Listrik, Gas dan Air	14.826,40	11,81	117.065,90	3,77
2	Konstruksi	-	-	1.227.438,50	39,52
3	Perdagangan dan reparasi	23,40	0,02	45.957,40	1,48
4	Hotel dan restoran	618,80	0,49	329.942,40	10,62
5	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	87,20	0,07	89.998,50	2,90
6	Perumahan, Kawasan industri dan perkantoran	160,20	0,13	50.690,50	1,63
7	Jasa lainnya	425,20	0,34	29.446,50	0,95
TOTAL		125.589,40	10,00	3.106.178,70	100,00

Ket : 1 US\$ = Rp.14.400, Total PMA = Rp.1.808.487.360.000,-

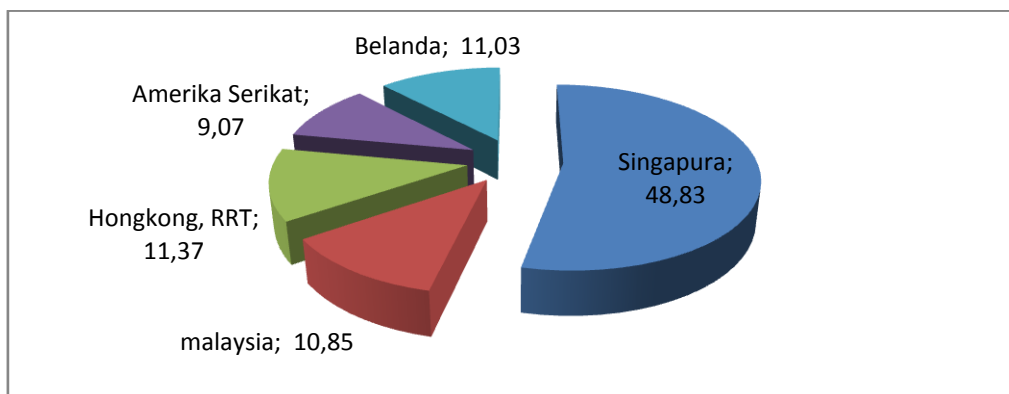
Sumber: Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2020

Dari tabel 3.43, diperoleh informasi bahwa:

1. Tiga besar sektor usaha yang mendominasi realisasi investasi PMA tahun 2020 yaitu industri makanan sebesar USD 76.715,60 ribu (61,08%), sektor usaha listrik, gas dan air sebesar USD 14.826,40 ribu (11,81%), dan sektor usaha pertambangan sebesar USD 14.073,60 ribu (11,21%).
2. Tiga besar sektor usaha yang mendominasi realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha tahun 2020 yaitu sektor usaha kontraksi sebesar Rp 1.227.438,50 juta (39,52%), sektor usaha tanaman pangan dan perkebunan sebesar Rp 856.232,70 juta (27,57%) dan sektor usaha hotel dan restoran sebesar Rp 329.942,40 (10,62%).

Selain berdasarkan sektor usaha, realisasi PMA juga dilihat berdasarkan negara penyumbang. Negara penyumbang terbesar Penanaman Modal Asing tahun 2020 adalah negara Singapura dengan nilai investasi sebesar 48,83% dari total PMA (USD 61.330,70 ribu), kemudian disusul oleh negara Hongkong, RRT dengan nilai investasi sebesar 11,37% (USD 14.283,60 ribu), negara Belanda sebesar 11,03% (USD 13.847,30 ribu), Negara Malaysia sebesar 10,85% (USD 13.627 ribu) dan negara Amerika Serikat sebesar 9,07% (USD 11.387,10 ribu). Informasi tersebut digambarkan pada grafik 29.

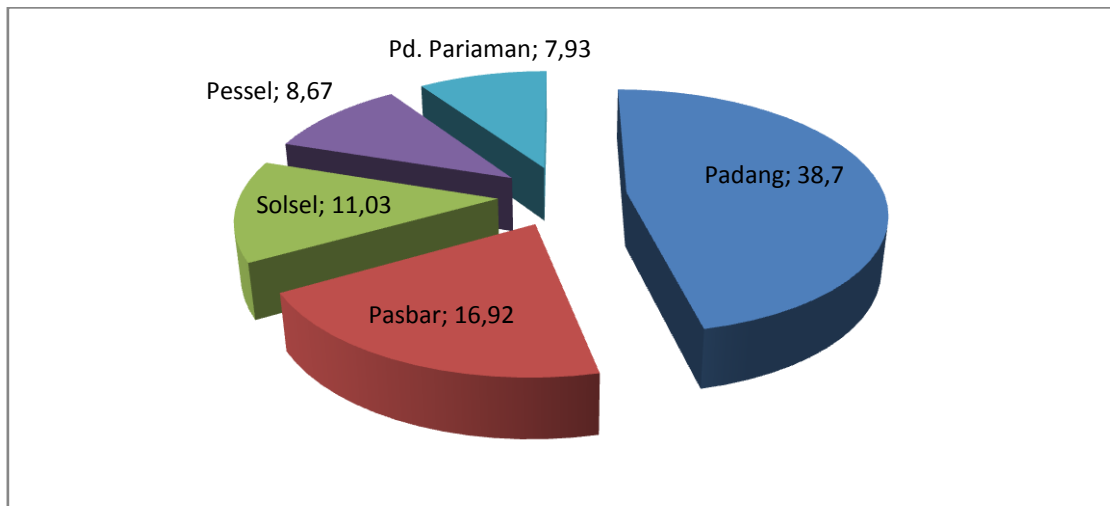
Grafik 29 Negara Penyumbang PMA Terbesar Tahun 2020



Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2020

Kabupaten/Kota penerima investasi Penanaman Modal Asing terbesar adalah Kota Padang dengan nilai investasi yang diterima sebesar 38,70% (USD 48.609,00 ribu), kemudian Kabupaten Pasaman Barat sebesar 16,92% (USD 21.249,70 ribu), Kabupaten Solok Selatan sebesar 11,03% (USD 13.847,30 ribu), Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 8,67% (USD 10.892,10 ribu) dan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 7,93% (USD 9.956,80 ribu). Informasi tersebut digambarkan pada grafik 30.

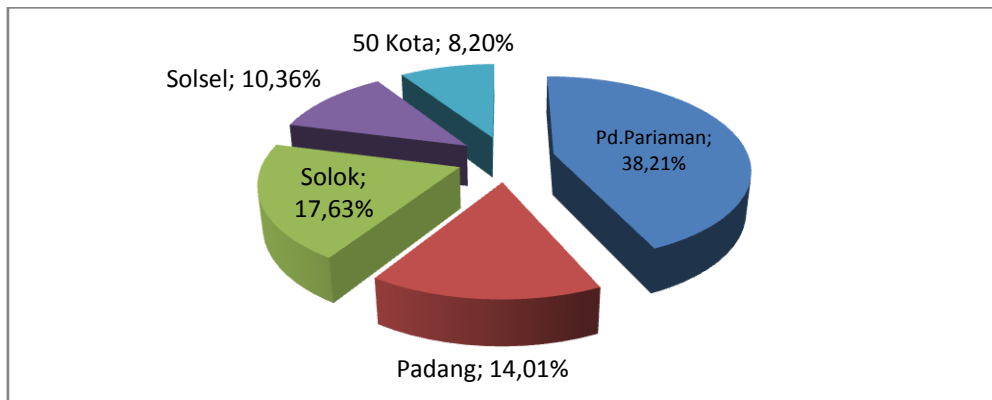
Grafik 30 Kabupaten/Kota Penerima PMA Terbesar Tahun 2020



Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2020

Berbeda dengan PMA, daerah yang menerima PMDN terbesar adalah Kabupaten Padang Pariaman dengan penerimaan investasi sebesar 38,21% (Rp. 1.186.922,70 juta), kemudian Kabupaten Solok sebesar 17,63% (Rp.547.494,40 juta), Kota Padang sebesar 14,01% (Rp.435.150,20 juta), Kabupaten Solok Selatan sebesar 10,36% (Rp. 321.876,40 juta) dan Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 8,20% (Rp.254.827,50 juta). Informasi tersebut digambarkan pada grafik 31.

Grafik 31 Kabupaten/Kota Penerima PMDN terbesar Tahun 2020



Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2020

Capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi sebesar -227,42% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.44.

Tabel 3. 44 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Persentase pertumbuhan investasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Persentase Pertumbuhan Investasi	-8,71	13,76	-227,42	342,29	3,03

Realisasi pertumbuhan investasi tahun 2020 adalah -8,71, belum mencapai target yang ditetapkan sehingga capaiannya <100%. Pertumbuhan investasi tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dan 2018 menunjukkan tren negatif. Pertumbuhan investasi tahun 2020 menurun 22,47% dibandingkan tahun 2019. Begitupun dengan capaian kinerja selama 2 tahun terakhir juga menunjukkan tren menurun. Keadaan pertumbuhan investasi Sumatera Barat tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 8,71% dan capaian kinerja yang menurun hingga -227,42% ini tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang masih terjadi.

Berdasarkan keadaan tersebut, untuk target pertumbuhan investasi tahun 2021 yang sudah ditetapkan sebesar 3,03% tentu berangkat dari angka dasar tahun 2020. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang besar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai target tahun 2021. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap optimis pertumbuhan investasi akan meningkat, namun sedikit melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena keadaan pandemi COVID-19 yang belum mereda.

Adapun usaha yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 untuk mendorong nilai investasi terus meningkat dan meminimalisir hambatan yang dihadapi diantaranya adalah:

1. Melakukan koordinasi ke Kementerian terkait sehubungan dengan harga beli energi listrik oleh PLN berdasarkan ketetapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2015 yaitu sebesar 9,30 cent USD atau sekitar Rp. 1.246,-.
2. Membuka Layanan Pendampingan dan Konsultasi Pengisian Laporan kegiatan Penanaman Modal (LaKon LKPM) kepada Perusahaan Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengisian Laporan untuk memaksimalkan perusahaan yang menyampaikan LKPM.
3. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Nagari untuk menyusun produk hukum dan aturan teknis yang mengatur pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman.
4. Mendorong Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan revisi RTRW yang terbuka terhadap investasi.
5. Mempercepat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan perizinan.

6. Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis WEB lewat pendampingan dalam menggunakan aplikasi.
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggaraan pelayanan peizinan.

Dalam meningkatkan investasi tahun 2020 masih ditemukan hambatan-hambatan, diantaranya:

1. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan sikap investor menjadi *wait and see*. Realisasi proyek tertunda terutama yang berasal dari APBD dan APBN turut menahan investasi pada tahun 2020. Belanja modal yang sebagian sudah dialihkan untuk penanganan COVID-19 juga menyebabkan investasi pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2019.
2. Banyaknya perusahaan bidang usaha ketenagalistrikan yang belum merealisasikan investasinya karena belum adanya kesepakatan harga pembelian dari perusahaan Listrik Negara (PLN), sedangkan nilai rencana investasinya cukup besar.
3. Rendahnya harga beli energi listrik oleh PLN, yaitu sebesar 7 cent USD atau sekitar Rp. 938,-, dimana harga ini lebih rendah dari ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2015 yaitu sebesar 9,30 cent USD atau sekitar Rp. 1.246,-.
4. Beberapa perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga menyebabkan belum maksimalnya perusahaan yang menyampaikan LKPM.
5. Belum *clear and clean* tanah lokasi untuk berinvestasi, disebabkan tanah di Sumatera Barat umumnya Tanah Ulayat.

6. RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota yang belum ramah dengan investasi.
7. Potensi-potensi wisata di berbagai daerah di Sumatera Barat yang belum dikelola dengan baik, termasuk dari segi infrastruktur pendukung dan kesiapan masyarakat.
8. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
9. Keterbatasan pengetahuan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis WEB.
10. Keterbatasan kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggara pelayanan perizinan.

Dalam meningkatkan Investasi perlu usaha panjang dan berkelanjutan oleh semua pihak yang terkait mulai dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat dan para pemangku kepentingan. Berbagai upaya di masa yang akan datang yang perlu ditingkatkan agar investasi Sumatera Barat terus meningkat adalah:

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan investor, baik dalam hal kepengurusan di ranah birokrasi hingga dalam merealisasikan dan mengaplikasikan investasi.
2. Memaksimalkan pengelolaan potensi-potensi daerah yang telah ada seperti; potensi panas bumi atau *geothermal* yang kaya di Sumatera Barat, sektor pariwisata, perkebunan, perikanan dan sektor lainnya.
3. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat sehingga menghasilkan produk-produk yang berkualitas sehingga mendorong investor untuk masuk ke UMKM.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan investasi di Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 2.329.079.135,-. Anggaran ini

tersebar pada 2 program yaitu program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi (12 kegiatan) dan program peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu (7 kegiatan) yang sudah efektif mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan investasi.


Dari jumlah anggaran sebesar Rp. Rp. 2.329.079.135,-, terealisasi sebesar Rp 2.313.251.679,- atau 99,32%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran strategis tersebut terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 15.827.456 (0,68%). Dalam hal capaian kinerja pertumbuhan investasi yang tumbuh negatif sebesar 227,42 % lebih disebabkan oleh faktor kejadian luar biasa pandemi COVID-19 yang memang dihadapi oleh Dunia.



Sasaran Strategis 4.1.3 **Meningkatnya Nilai Ekspor**

Ekspor merupakan salah satu faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Ditengah pandemi COVID-19 yang terjadi, ekspor Sumatera Barat tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan target nilai ekspor selalu meningkat setiap tahunnya agar target pada tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021 sebesar 2056,89 juta USD bisa tercapai. Target ekspor tahun 2020 ditetapkan sebesar US\$ 1.365,81 juta. Angka target ini ditetapkan mengacu pada target tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Jika dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2019, target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar US\$26,78 juta. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian nilai ekspor disajikan pada tabel 3.45.

Tabel 3. 45 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4.1.3

	Target	Realisasi	Capaian
	1365,81	1531,84	112,16%
	Juta USD	Juta USD	

Indikator kinerja nilai ekspor tahun 2020 terealisasi sebesar US\$1.531,84 juta, dengan tingkat capaian kinerja 112,16%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Berbeda dari beberapa tahun terakhir dimana pertumbuhan ekspor selalu mengalami kontraksi, nilai ekspor tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 14,39% atau US\$ 192,81 juta dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

Data realisasi nilai ekspor Sumatera Barat tahun 2020 ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat yang dimuat dalam Berita Resmi Statistik No. 11/02/13/Th.XXIV, 1 Februari 2021 tentang perkembangan ekspor dan impor Sumatera Barat Desember 2020.

Berdasarkan data BPS Sumatera Barat, nilai terbesar ekspor Sumatera Barat adalah kelompok non migas. Data selengkapnya tergambar pada tabel 3.46.

Tabel 3. 46 Ekspor Non Migas Sumatera Barat Berdasarkan Beberapa Golongan Barang Tahun 2016-2020

No	Golongan Barang	Nilai FOB (Juta US\$)					Peran terhadap nilai ekspor 2019 (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Lemak & minyak Hewan/Nabati	1177,10	1.416,44	1.139,83	967,45	1.213,58	79,22
2	Karet dan Barang dari Karet	358,90	443,48	290,43	229,98	163,75	10,69
3	Bahan-bahan Nabati	-	24,00	23,64	31,85	51,06	3,33
4	Garam, Belerang, Kapur	-	41,26	65,01	71,40	50,22	2,16
5	Berbagai produk kimia	-	38,06	29,90	18,20	33,10	3,28
6	Buah-buahan	7,80	3,11	0,14	1,00	0,48	1,28
7	Ikan dan Udang	-	0,25	0,26	0,47	0,13	0,01
8	Lak, Getah dan Damar	-	0,03	0,16	0,11	-	0,03
9	Daging dan Olahan	-	0,11	0,16	0,14	-	-

No	Golongan Barang	Nilai FOB (Juta US\$)					Peran terhadap nilai ekspor 2019 (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Ikan						
10	Perangkat Musik	-	0,51	-	-	-	0,00
	Total 10 Gol Barang lainnya	1543,80	1.967,25	1.549,54	1.320,61	1.304,09	100,00
	Lainnya	164,30	79,02	49,07	18,42	-	0,00
	Total Ekspor	1708,10	2.046,27	1.598,61	1.339,03	1.531,84	100,00
	% Perubahan	(2,28)	19,77	(22,05)	(25,44)	14,39	

Sumber data : BRS No. 11/02/13/Th.XXIV, 1 Februari 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa peranan golongan barang yang terbesar terhadap total ekspor Sumatera Barat tahun 2020 adalah golongan lemak & minyak hewan/nabati sebesar US\$1.213,58 juta (79,22%), diikuti golongan karet dan barang dari karet sebesar US\$ 163,75juta (10,69%) dan bahan-bahan nabati sebesar US\$51,06 juta (3,33%).

Berdasarkan negara tujuan ekspor, India masih bertahan sebagai negara tujuan utama ekspor Sumatera Barat. India memiliki pangsa pasar sebesar 22,53% (US\$ 345,20 juta) dari ekspor total Sumatera Barat, terutama untuk komoditas CPO. Kemudian disusul oleh Negara Amerika Serikat (US) sebesar 16,93% (US\$ 259,39 juta), Bangladesh sebesar 10,54% (US\$ 161,50 juta), China sebesar 9,65% (US\$ 147,90 juta) dan Pakistan sebesar 8,25% (US\$ 126,41 juta). Ekspor Sumatera Barat berdasarkan negara tujuan disajikan pada tabel 3.47.

Tabel 3. 47 Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Negara Tujuan	Nilai Ekspor 2020	Peran Terhadap total 2020 (%)
1	India	345,20	22,53
2	Pakistan	126,41	8,25
3	US	259,39	16,93
4	Bangladesh	161,50	10,54
5	Spanyol	97,17	6,34
6	China	147,90	9,65
7	Tanzania	19,17	1,25
8	Iraq	46,95	3,07
9	Jepang	39,29	2,56
10	Korea	28,26	1,84

No	Negara Tujuan	Nilai Ekspor 2020	Peran Terhadap total 2020 (%)
	Total 10 Negara Tujuan	1271,23	82,99
	Lainnya	260,61	17,01
	Total Ekspor	1531,84	100,00

Sumber data: Berita Resmi Statistik No. 11/02/13/Th.XXIV, 1 Februari 2021

Capaian indikator kinerja nilai ekspor sebesar 112,16% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja nilai ekspor tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.48.

Tabel 3. 48 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja nilai ekspor

No	Indikator Kinerja	Realisasi (juta US\$)		% Capaian Kinerja		Target (juta US\$)
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Nilai ekspor	1531,84	1339,03	112,16	68,06	2056,89

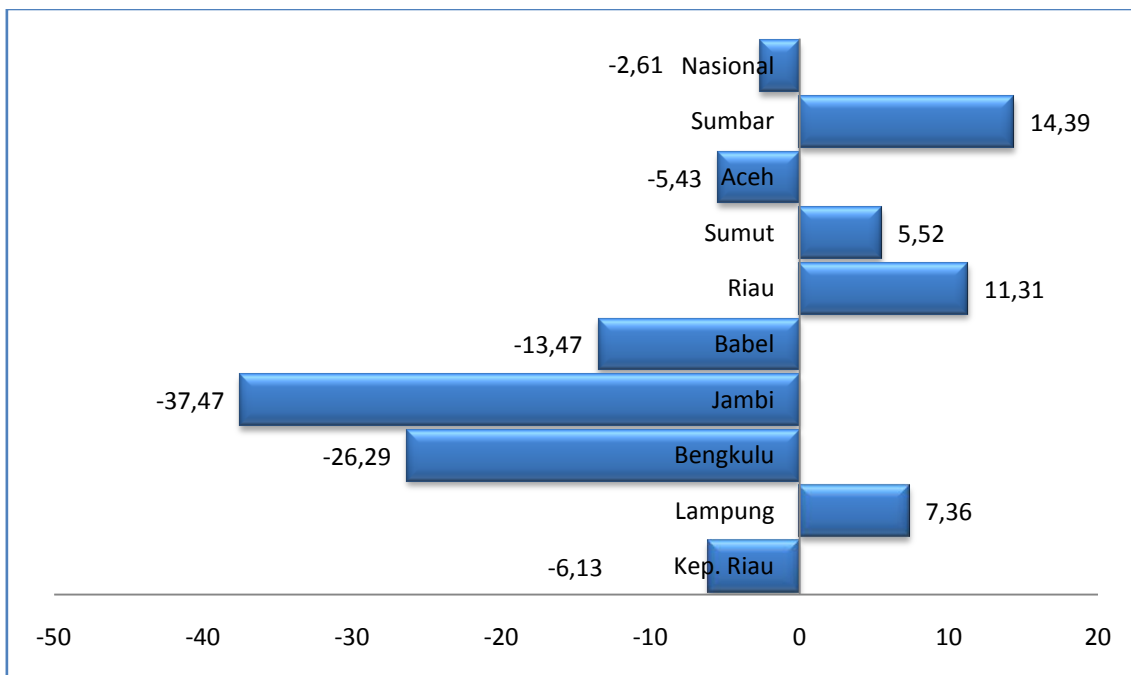
Realisasi nilai ekspor tahun 2020 adalah US\$ 1531,84 juta, tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian indikator kinerja ini >100%. Realisasi nilai ekspor tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar US\$ 192,81 juta (14,39%). Begitupun dengan capaian kinerja tahun 2020, meningkat 44,1% dibanding capaian tahun 2019.

Untuk tahun 2021, nilai ekspor ditargetkan tercapai US\$ 2056,89 juta. Jika dibandingkan dengan nilai ekspor di tahun 2020, target tahun 2021 meningkat US\$ 525,05 juta. Dengan melihat capaian di tahun 2020 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis bisa mencapai target tersebut.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, peningkatan nilai ekspor non migas Tahun 2020 dibandingkan periode yang sama Tahun 2019 (c-to-c), Sumatera Barat berada pada posisi pertama sebesar 14,39%, kemudian

disusul oleh Provinsi Riau sebesar 11,31%. sedangkan angka penurunan nilai ekspor terendah dialami oleh Provinsi Jambi yang berkontraksi sebesar 34,47%. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor nasional, Pertumbuhan ekspor Sumatera Barat jauh berada di atas pertumbuhan angka Nasional yang mengalami kontraksi sebesar 2,61%, . Data selengkapnya tergambar pada grafik 32.

Grafik 32 Perbandingan Peningkatan Nilai Ekspor di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan Provinsi Lain di Sumatera dan Nasional Tahun 2020



Sumber data : BRS per provinsi dan Nasional, tentang peningkatan nilai ekspor Tahun 2020

Peningkatan nilai ekspor Sumatera Barat Tahun 2020 yang semakin membaik didorong oleh beberapa faktor:

1. Terjadinya kenaikan harga sawit dunia sehingga ekspor CPO meningkat, selain itu untuk memenuhi permintaan menjelang perayaan Deepawali di India sehingga terjadi peningkatan permintaan CPO.
2. Ekspor non migas meningkat seiring dengan peningkatan nilai dan volume komoditas utama seperti CPO, Karet, dan sari bahan samak dan celup.

3. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama Sumatera Barat mengalami peningkatan seperti Amerika Serikat.

Pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya peningkatan nilai ekspor, diantaranya adalah:

1. Mayoritas produk ekspor komoditas Sumatera Barat masih bertumpu pada *Primary Product* dan teknologi yang digunakan tidak terlalu canggih sehingga nilai tambah yang rendah.
2. Daya saing produk yang dihasilkan masih relatif rendah baik dari sisi kemasan, standar dan mutu produk (GMP, halal, SNI) dan Sertifikasi komoditi ekspor potensial (sertifikat kesesuaian mutu).
3. Kapasitas produksi yang dihasilkan oleh pelaku usaha Sumatera Barat masih terbatas.
4. Negara tujuan ekspor sebagian besar masih terpaut ke negara tujuan tradisional.
5. Terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda dunia sehingga berpengaruh terhadap permintaan luar negeri.
6. Masuknya pasokan karet dengan kualitas yang lebih baik dari Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Selain itu, letak geografis 4 negara ini berada lebih dekat dengan negara pengguna, seperti Tiongkok, Jepang dan Korea sehingga biaya distribusinya lebih murah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan selama tahun 2020 dalam rangka meningkatkan nilai ekspor adalah:

1. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha ekspor tentang prosedur perdagangan luar negeri melalui bimbingan teknis dan temu usaha. Upaya ini didukung melalui kegiatan:
 - Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)

- Temu Usaha dan Sosialisasi Pengembangan Produk Komoditi Ekspor.
2. Meningkatkan standar dan mutu produk ekspor, melalui peningkatan pengawasan terhadap komoditi ekspor, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengujian produk ekspor dan peningkatan kompetensi SDM Labor penguji dengan kegiatan-kegiatan antara lain:
 - Pengawasan Mutu Komoditi
 - Pengujian Mutu Barang Ekspor
 - Reakreditasi Laboratorium Penguji dan Kalibrasi
 - Fasilitasi Diklat bagi Aparatur Perdagangan Luar Negeri
 3. Melakukan diversifikasi pasar produk potensial ekspor Sumatera Barat ke negara-negara non konvensional, melalui kegiatan-kegiatan promosi (pameran/misi dagang) untuk memperkenalkan produk-produk potensial Sumatera Barat ke negara tersebut.

Untuk kedepannya, dalam meningkatkan nilai ekspor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan hal-hal berikut:

1. Mengoptimalkan pengawasan mutu dan kualitas produk yang diekspor
2. Menambah produk yang diekspor dan negara tujuan ekspor
3. Mengoptimalkan pemenuhan jumlah komoditi yang diekspor.
4. Meningkatkan promosi produk unggulan Sumatera Barat.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya nilai ekspor adalah sebesar Rp. 575.288.131,-. Anggaran tersebut terdiri dari 1 program yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri (4 kegiatan). Pelaksanaan program/kegiatan belum sepenuhnya menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatkan nilai ekspor non migas daerah. Untuk itu,

kegiatan yang diusulkan di tahun yang akan datang akan lebih disinkronkan dengan program dan sasaran yang ingin dicapai.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 575.288.131,- dan terealisasi Rp. 559.297.832,- atau 97,22%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 15.990.299,-(2,78%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya nilai ekspor sebesar 112,16% dengan realisasi anggarannya sebesar 97,22% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 14,94%.



Sasaran Strategis 4.1.4

Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran



Kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu masalah sosial yang bisa ditimbulkan dari berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan pendidikan. Kemiskinan dan pengangguran tersebut akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah menuju kesejahteraan, seperti daya beli rendah, kebutuhan gizi standar, rentan penyakit menular, kriminalitas dan rumah tidak layak huni.

Pandemi virus corona Covid-19 yang terjadi mulai akhir 2019 memukul semua sektor, tak terkecuali ekonomi masyarakat. Akibatnya banyak masyarakat di Sumatera Barat yang kini kehilangan pekerjaan. Dampaknya tentu membuat angka kemiskinan menjadi bertambah dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkannya.

Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih besar agar kondisi ekonomi Sumatera Barat dapat berangsur membaik. Jika kelompok masyarakat miskin dan pengangguran dapat diatasi, maka tujuan Sumatera Barat bebas dari kemiskinan dalam arti sesungguhnya dapat diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai

untuk mewujudkan tujuan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah. Pencapaian sasaran strategis menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran tergambar pada tabel 3.49.

Tabel 3. 49 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4.1.4

	Target	Realisasi	Capaian
 Tingkat Kemiskinan	5,83	6,56	87,48 %
 Tingkat Pengangguran	5,82	6,88	81,79 %
Rata-rata capaian			84,64 %

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran adalah sebesar 84,64% termasuk kategori keberhasilan Baik. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Artinya, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin digunakan garis kemiskinan (September 2020) Rp. 547.240,- (kapita/bulan). Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 17.540 di tahun 2020 (yoy). Garis Kemiskinan ditentukan oleh dua

komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Tingkat kemiskinan pada tahun 2020 ditargetkan akan tercapai 5,83. Penetapan target ini mengacu pada target tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di 2019, target tahun 2020 ini ditetapkan menurun 0,46.

Tingkat kemiskinan target 5,83 terealisasi 6,56 dengan tingkat capaian 87,48% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi ini diukur berdasarkan data tingkat kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 13/02/13/ThXXIV tanggal 15 Februari 2021. Terkait dengan tingkat kemiskinan 6,56 dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 (September 2020) mencapai 364,79 ribu jiwa meningkat 21,7 ribu jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 (September 2019).
2. Berdasarkan daerah asal, penduduk miskin dari desa lebih banyak dari perkotaan. Penduduk miskin daerah Perkotaan mencapai 141,31 ribu jiwa (38,74%) dan dari desa mencapai 223,47 ribu jiwa (61,26%).
3. Pada tahun 2020, Garis Kemiskinan pada daerah perkotaan meningkat 2,57% dan pada daerah perdesaan meningkat 3,76% (September 2019-September 2020) sebagaimana disajikan pada tabel 3.50.

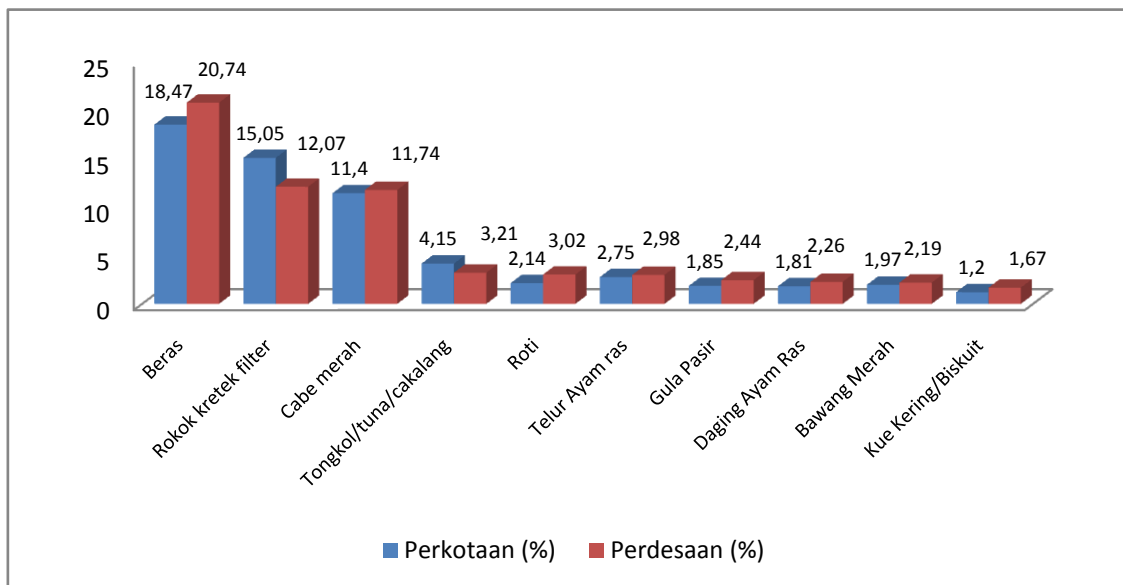
Tabel 3. 50 Garis Kemiskinan Tahun 2019-2020

Daerah	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
		Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan	September 2019	402.124	149.242	551.366
	September 2020	413.073	152.458	565.531
Perdesaan	September 2019	401.904	108.552	510.457
	September 2020	416.419	113.254	529.673
Total	September 2019	402.003	127.697	529.700
	September 2020	414.949	132.291	547.240

Sumber data: BRS Nomor 13/02/13/ThXXIV tanggal 15 Februari 2021.

4. Komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Beras memberi sumbangan terbesar dalam komponen komoditi penyusun GK, sebesar 18,47% di perkotaan dan 20,74% di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar ke dua terhadap GK di perdesaan (12,07%) dan di perkotaan (15,05%). Posisi ke tiga komoditi dengan kontribusi terbesar baik di perkotaan dan perdesaan adalah cabe merah yaitu 11,40% dan 11,74%. Daftar komoditi makanan yang berkontribusi terhadap garis kemiskinan disajikan pada grafik 33.

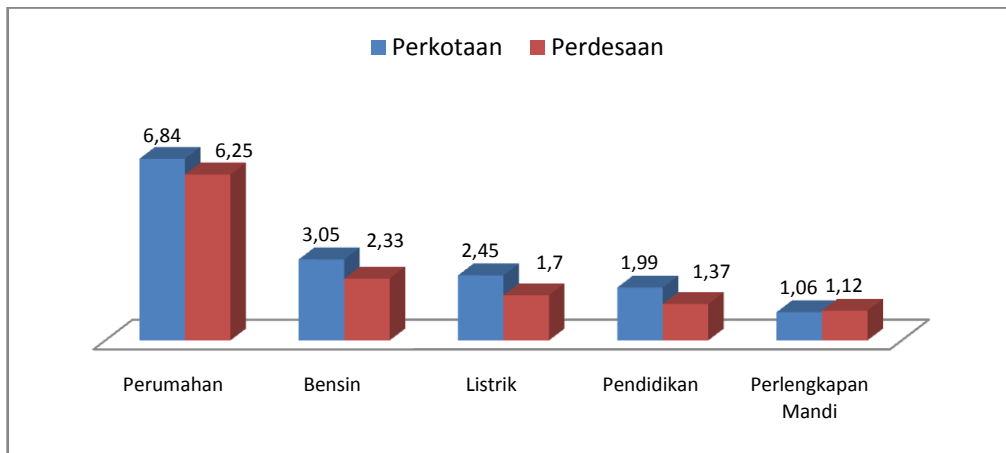
Grafik 33 Daftar Komoditi Makanan Yang Berkontribusi Terhadap Garis Kemiskinan



Sumber Data: BRS Nomor 13/02/13/ThXXIV tanggal 15 Februari 2021.

5. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK perkotaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan serta perlengkapan mandi. Komoditi yang sama juga menjadi penyumbang terbesar pada GK perdesaan yaitu perumahan, bensin, listrik, pendidikan serta perlengkapan mandi. Daftar komoditi bukan makanan yang berkontribusi terhadap garis kemiskinan disajikan pada grafik 34.

Grafik 34 Daftar Komoditi Non Makanan Yang Berkontribusi Terhadap Garis Kemiskinan



Sumber Data: BRS Nomor 13/02/13/ThXXIV tanggal 15 Februari 2021.

Capaian indikator kinerja tingkat kemiskinan sebesar 87,48% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang kedua.

Perbandingan realisasi indikator kinerja tingkat kemiskinan tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.51.

Tabel 3. 51 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja tingkat kemiskinan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Tingkat Kemiskinan	6,56	6,29	87,48	97,72	5,09

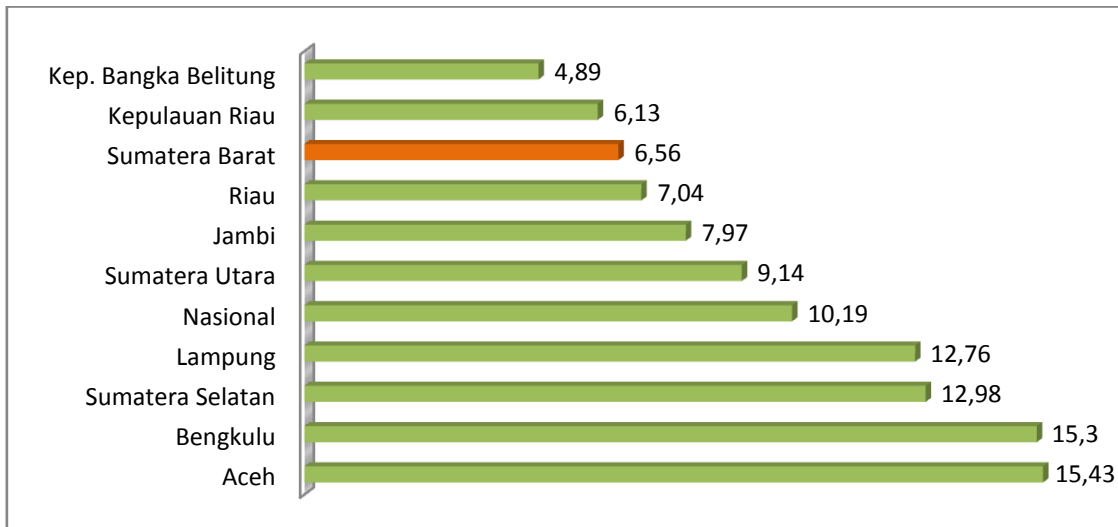
Realisasi indikator kinerja tingkat kemiskinan tahun 2020 adalah 6,56, tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian indikator kinerja tingkat

pengangguran <100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, tingkat kemiskinan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,27. Hal ini menunjukkan bertambahnya jumlah penduduk miskin di tahun 2020. Capaian kinerja tahun 2019-2020 menunjukkan penurunan sebesar 10,24%.

Jika dibandingkan dengan target 2021 sebesar 5,09, diperlukan upaya maksimal untuk mengejar target 1,47 lagi agar target tahun terakhir RPJMD tersebut tercapai. Jika melihat tren beberapa tahun terakhir yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan, kecuali kondisi tahun 2020 yang dipengaruhi oleh kejadian Luar Biasa pandemi COVID-19, target tahun 2021 optimis dapat dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan upaya yang optimal bersama pihak terkait untuk menurunkan tingkat pengangguran.

Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat 3,63 lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara Nasional dan berada di urutan ke tiga terendah dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Provinsi Bangka Belitung (4,89%), Provinsi Kepulauan Riau (6,13%). Gambaran perbandingan tingkat kemiskinan dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik 35.

Grafik 35 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020



Sumber data: BRS No. 16/02/Th.XXIII, 15 Februari 2021

Keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak dan usaha dari Pemerintah. Dalam menurunkan tingkat kemiskinan, masih banyak hambatan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Pandemi Covid-19 memberi dampak pada seluruh lapisan masyarakat terutama kelompok berpendapatan rendah. Guncangan penawaran dan permintaan yang terjadi menyebabkan penurunan kegiatan produktif, pengurangan pendapatan dan akhirnya penekanan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berdampak pada penurunan rata-rata pengeluaran per kapita di tingkat rumah tangga. Secara bertahap keluarga kehilangan penghasilan dan berpengaruh pada daya beli atau konsumsi Rumah Tangga.
- b. Banyak penduduk yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau tidak bekerja sementara sejak kebijakan PSBB mulai diterapkan pada triwulan II tahun 2020 dan anjuran untuk tetap dirumah. Penduduk yang bekerja di sektor informal lebih terdampak dan rentan menjadi miskin, akibat kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Akibatnya, banyak masyarakat kota bergerak kembali ke desa.

- c. Pembatasan sosial telah mengubah perilaku dalam berbagai kegiatan, seperti pengurangan pertemuan, pesta, perjalanan, dan memilih berbelanja secara daring/Online. Akibatnya, usaha jasa penyewaan gedung, pemesanan catering, percetakan, pelayanan transportasi hotel dan lainnya menjadi kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan.

Guna mengatasi peningkatan angka kemiskinan, telah dilakukan beberapa upaya antara lain:

- a. Mendorong meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
- b. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, usaha perdagangan dan industri kecil/menengah.
- c. Meningkatkan sektor pariwisata yang sudah sangat terpuruk akibat pandemi Covid-19.
- d. Melakukan kolaborasi dengan stakeholder lainnya seperti BAZNAS daerah dan juga LAZ daerah untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan penduduk kemiskinan di wilayahnya dengan mengkombinasikan program-program social dari pemerintah daerah dengan program-program pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang ada pada lembaga zakat.
- e. Melaksanakan program pemulihan ekonomi pada triwulan IV Tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dimana sasarannya langsung kepada masyarakat berupa :
 - stimulus kepada para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19;
 - meningkatkan Nilai Tukar Petani dengan peningkatan sarana penangkapan bagi para nelayan perairan umum, restocking ikan di perairan umum dan sarana pengolahan hasil kelautan dan perikanan; pengelolaan jasa lingkungan hutan sosial; peningkatan produksi pertanian

Adapun upaya yang akan dilaksanakan pada masa mendatang guna menurunkan tingkat kemiskinan Sumatera Barat diantaranya adalah:

1. melaksanakan program kendali cepat jangka pendek berupa bantuan jaringan pengamanan sosial, berupa pangan dan keringanan terhadap kebutuhan mendasar non pangan lainnya. Kebijakan ini dilakukan secara berkala, dengan sasaran semakin berkurang secara bertahap.
2. Program jangka menengah juga diberikan berupa stimulus insentif pada UMKM dalam bentuk keringanan pajak, penurunan suku bunga pinjaman, penundaan tempo bayar, dan insentif permodalan.
3. Jangka panjang, dengan memberikan keringanan mengakses permodalan, infrastruktur penunjang, dan penciptaan iklim pasar yang kondusif.
4. Agar program mencapai sasaran yang tepat berdasarkan kelompoknya dan dilakukan secara efektif dan efisien, maka diperlukan pemutakhiran (*update*) data kependudukan untuk mendapatkan orang, jumlah dan wilayah sasaran yang sesuai.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tingkat kemiskinan adalah Rp. 69.253.004.302,-. Anggaran ini tersebar pada 16 program yaitu program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (1 kegiatan), program pembinaan anak terlantar (10 kegiatan), program pembinaan para penyandang disabilitas dan eks trauma (6 kegiatan), program pembinaan panti lanjut usia terlantar (5 kegiatan), program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, wanita tuna susila, dan penyakit sosial lainnya) (4 kegiatan), program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (2 kegiatan), program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya (5 kegiatan), program penanganan

korban bencana alam dan bencana sosial (1 kegiatan), program pemberdayaan fakir miskin (5 kegiatan), program koordinasi bidang kesejahteraan sosial (4 kegiatan), program pengembangan teknologi tepat guna (2 kegiatan), program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/nagari (10 kegiatan), program peningkatan kesempatan kerja dan diversifikasi usaha (1 kegiatan), program penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat (5 kegiatan), program penguatan kelembagaan pemerintahan nagari (2 kegiatan), dan program penanggulangan kemiskinan (1 kegiatan). Pelaksanaan program/kegiatan tersebut mendukung pencapaian indikator kinerja tingkat kemiskinan walaupun hasil yang diharapkan masih belum tercapai.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 69.253.004.302,-, terealisasi sebesar Rp. 62.369.932.228,- atau 90,46%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.883.072.074,-(9,94%). Efisiensi tertinggi berasal dari pelaksanaan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari yang realisasi anggarannya <90%. Jika dibandingkan, capaian indikator kinerja tingkat kemiskinan lebih rendah dari realisasi anggaran.

2. Tingkat pengangguran

Untuk tahun 2020, tingkat pengangguran ditargetkan 5,82%, berada 0,49 di atas tingkat pengangguran tahun 2019 (5,33%). Dengan mempertimbangkan tingkat pengangguran tahun 2019 dan faktor lain yang bisa mempengaruhi tingkat pengangguran, penetapan target mengacu pada target tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Indikator kinerja tingkat pengangguran tahun 2020 terealisasi sebesar 6,88% dengan tingkat capaian sebesar 81,79% termasuk kategori keberhasilan baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data tingkat pengangguran yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 60/11/13/Th XXIII tanggal 5 November 2020. Tingkat pengangguran diukur dengan membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja pada periode Agustus tahun 2020 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{190.610}{2.772.130} \times 100\% = 6,88$$

Ket: Jumlah pengangguran = 190.610 orang (Agustus 2020)
 Jumlah angkatan kerja = 2.772.130 orang (Agustus 2020)

Sampai Agustus 2020, jumlah angkatan kerja di Sumatera Barat sebanyak 2.772.130 orang, meningkat 173.120 orang dari periode yang sama tahun 2019. Komponen pembentukan angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan yang menganggur. Jumlah penduduk yang bekerja 2.581.520 orang, sedangkan yang menganggur sebanyak 190.610 orang. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, jumlah penduduk yang bekerja tahun 2020 bertambah sebanyak 120.970 orang, sedangkan penduduk yang menganggur juga bertambah 52.15 ribu orang. Kondisi tersebut mendorong tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2020 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2019, seiring dengan mewabahnya COVID-19 pada akhir triwulan I 2020 dan pemberlakuan PSBB pada triwulan II 2020 yang mengakibatkan beberapa pemberi kerja melakukan pemutusan hubungan kerja.

Walaupun tingkat pengangguran semakin bertambah pada tahun 2020 ini, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah Angkatan kerja. TPAK pada Agustus 2020 tercatat sebesar 69,01%, naik 1,5 dibanding periode yang sama tahun 2019. Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan

(supply) tenaga kerja. Tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Sumatera Barat tahun 2019-2020 tergambar pada tabel 3.52.

Tabel 3. 52 Tingkat pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2019-2020

Status Ketenagakerjaan	Agustus 2019 (Ribu orang)	Agustus 2020 (Ribu orang)	Perubahan 1 Tahun (Agust 2020-Agust 2019)	
			Ribu (Orang)	%
Penduduk Usia Kerja	3849,82	4016,78	166,96	4,34
1. Angkatan Kerja	2599,01	2772,13	173,12	6,66
Bekerja	2460,55	2581,52	120,97	4,92
Pengangguran	138,46	190,61	52,15	37,66
2. Bukan Angkatan Kerja	1250,80	1244,64	-6,16	-0,49
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,33	6,88		1,55
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,51	69,01		1,5

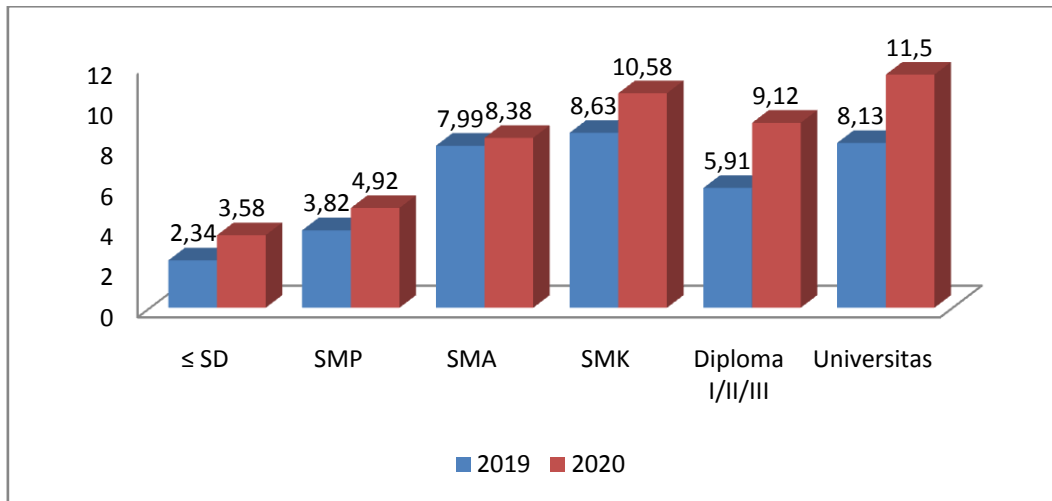
Sumber data : BPS Sumbar "BRS No.60/11/13/ThXXIII, 5 November 2020

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2020, tingkat pengangguran untuk tamatan universitas paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 11,50, kemudian disusul oleh tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 10,58%. Hal ini menunjukkan, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan universitas dan SMK. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, hal ini dapat dilihat dari tingkat pengangguran SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu 3,58%.

Jika dilihat penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2020 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) sebanyak 1,34 juta orang (51,92%). Sedangkan penduduk bekerja berpendidikan menengah (SMA sederajat) sebanyak 835,66 ribu orang (32,37%). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 405,52 ribu orang (15,71%), mencakup 96,67 ribu orang berpendidikan Diploma dan 308,85 ribu orang berpendidikan

Universitas. Gambaran TPT berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada grafik 36.

Grafik 36 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan



Sumber data : BPS Sumbar "BRS No.60/11/13/ThXXIII, 5 November 2020

Dilihat dari kabupaten/kota di Sumatera Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota lebih tinggi dibandingkan dengan TPT di Kabupaten. Dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi berada pada Kota Padang yaitu sebesar 13,64%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 meningkat 4,90%. Kemudian TPT tertinggi kedua disusul oleh Kota Solok sebesar 8,35%, meningkat 1,29% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian disusul oleh Kota Sawahlunto sebesar 8,20% Kabupaten Padang Pariaman sebesar 8,13%, Kota Bukittinggi sebesar 7,51%. Berikut penyajian rinci tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tabel 3.53.

Tabel 3. 53 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan (%)
Kabupaten			
Kepulauan Mentawai	2,92	3,98	1,06
Pesisir Selatan	5,84	7,00	1,16
Solok	4,65	4,65	0
Sijunjung	3,68	5,30	1,62
Tanah Datar	3,14	4,79	1,65
Padang Pariaman	5,97	8,13	2,16
Aqam	4,72	4,61	-0,11
Lima Puluh Kota	2,28	3,03	0,75
Pasaman	5,21	5,04	-0,17
Solok Selatan	4,91	5,62	0,71
Dharmasraya	5,08	5,31	0,23
Pasaman Barat	4,64	4,69	0,05
Kota			
Padang	8,76	13,64	4,88
Kota Solok	7,09	8,35	1,26
Sawahlunto	6,82	8,20	1,38
Padang Panjang	4,35	7,22	2,87
Bukittinggi	6,14	7,51	1,37
Pavakumbuh	4,11	6,68	2,57
Pariaman	5,42	5,73	0,31
Sumatera Barat	5,33	6,88	1,55

Sumber data : BRS No. 60/11/13/ th XXIII, 05 November 2020

Pandemi COVID-19 tidak hanya memberi dampak terhadap penduduk yang menganggur tapi juga pada penduduk usia kerja lainnya, sehingga penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 komponen yang tergambar pada tabel 3.54.

Tabel 3. 54 Dampak COVID-19 terhadap penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020

Komponen	Jenis Kelamin (Ribu Orang)		Daerah Tempat Tinggal (Ribu Orang)		Total (Ribu orang)
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
a) Pengangguran ² karena COVID-19	18,88	16,57	23,20	12,26	35,46
b) Bukan Angkatan Kerja (BAK) ³ karena COVID-19	3,14	10,78	6,69	7,23	13,92
c) Sementara tidak bekerja Karena COVID-19	15,70	12,07	17,29	10,47	27,76
d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19	262,60	191,81	207,16	187,25	454,41

Komponen	Jenis Kelamin (Ribu Orang)		Daerah Tempat Tinggal (Ribu Orang)		Total (Ribu orang)
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
Total	300,32	231,24	314,34	217,21	531,56
Penduduk Usia Kerja (PUK)	1986,08	2030,69	1948,78	2068,00	4016,78
Persentase terhadap PUK	15,12	11,39	16,13	10,50	13,23

Keterangan :

1. Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS2015
2. Pengangguran karena COVID-19 adalah pengangguran yang berhenti bekerja karena COVID-19 selama bulan Februari-Agustus 2020
3. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena COVID-19 selama bulan Februari-Agustus 2020

Berdasarkan tabel 3.51, Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi COVID-19 bagi mereka yang berhenti bekerja. Penduduk usia kerja Sumatera Barat pada Agustus 2020 mencapai 4,02 juta orang, terdapat 531,56 ribu orang yang terdampak Covid-19 atau sebesar 13,23%. Menurut jenis kelamin, jumlah laki-laki lebih besar terdampak Covid-19 dibandingkan perempuan. Sementara penduduk usia kerja di perkotaan jauh lebih terdampak dibandingkan penduduk di perdesaan.

Capaian indikator kinerja tingkat pengangguran sebesar 81,79% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang kedua*.

Perbandingan realisasi indikator kinerja tingkat pengangguran tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.55.

Tabel 3. 55 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja tingkat pengangguran

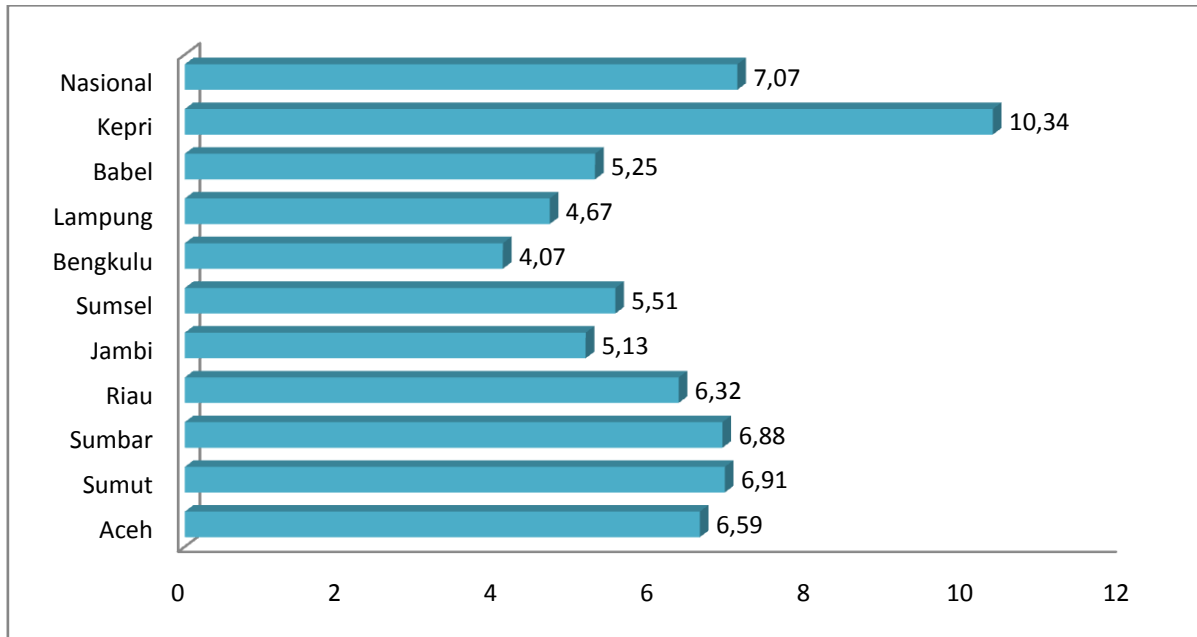
No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Tingkat Pengangguran	6,88	5,33	81,79	111,61	5,6

Realisasi indikator kinerja tingkat pengangguran tahun 2020 adalah 6,88, tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian indikator kinerja tingkat pengangguran <100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, tingkat pengangguran tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,55%. Untuk capaian kinerja tahun 2019-2020 menunjukkan penurunan sebesar 29,82.

Jika dibandingkan dengan target 2021 sebesar 5,6%, perlu mengejar target 1,28 lagi agar target tahun terakhir RPJMD tersebut tercapai. Jika melihat tren beberapa tahun terakhir yang menunjukkan penurunan angka pengangguran, kecuali kondisi tahun 2020 yang dipengaruhi oleh kejadian luar biasa pandemi COVID-19, target tahun 2021 optimis dapat dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan upaya yang optimal bersama pihak terkait untuk menurunkan tingkat pengangguran.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, Tingkat Pengangguran Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ketiga tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai TPT 10,34% dan Provinsi Sumatera Utara dengan Nilai TPT 6,91%. Sedangkan TPT terendah berada di Provinsi Bengkulu yaitu 4,07%. Kemudian jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Nasional sebesar 7,07%, angka TPT Sumatera Barat masih berada 0,19% di bawah angka Nasional. Kondisi ini digambarkan pada grafik 37.

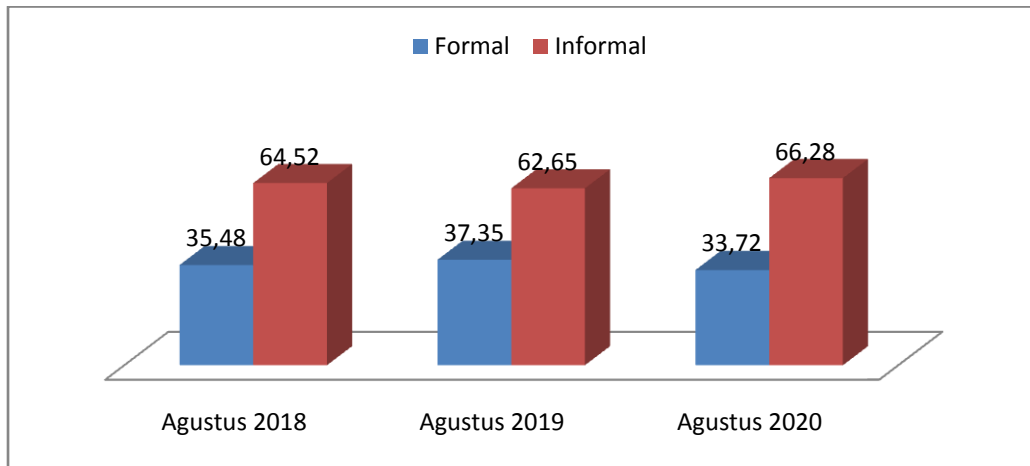
**Grafik 37 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional
Agustus 2020**



Sumber : BRS Indonesia No.86/11/Th.XXIII, 5 November 2020

Status pekerjaan di Sumatera Barat sebagian besar masih bersifat informal. Pekerja formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan kategori buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya termasuk pekerja informal. Dengan demikian pada posisi Agustus 2020, pangsa pekerja formal di Sumatera Barat hanya mencapai 870,50 ribu orang (33,72%), sedangkan sebanyak 1,71 juta orang (66,28%) bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, pekerja informal cenderung mengalami kenaikan sebanyak 168.400 orang atau 3,63 dari tahun sebelumnya. Peningkatan pekerja informal pada Agustus 2020 didorong oleh peningkatan status pekerja keluarga/tidak dibayar yang meningkat dibandingkan posisi Agustus 2019. Tambahan angkatan kerja setiap tahunnya belum disertai dengan penambahan ketersediaan lapangan kerja baru sehingga menyebabkan banyaknya tenaga kerja di sektor informal sebagaimana disajikan pada grafik 38.

Grafik 38 Persentase penduduk bekerja menurut kegiatan Formal/Informal Agustus 2018 - Agustus 2020



Dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat selama tahun 2020 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya-upaya berikut ini:

1. Meningkatkan SDM Masyarakat dan Pencari Kerja dengan melakukan pelatihan keterampilan dan pembinaan yang sesuai dengan pasar kerja di dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 11.056 orang tenaga kerja yang dilatih pada Balai Latihan Kerja (BLK) dan telah lulus dengan menyandang sertifikat kompetensi.
2. Meningkatkan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi, sebagai lembaga yang melatih para angkatan kerja agar siap menghadapi dunia kerja. Di Sumatera Barat hingga tahun 2020, dari 120 LPK yang sudah ada, sebanyak 98 LPK sudah terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
3. Meningkatkan serapan tenaga kerja yang kompeten melalui kegiatan pemagangan. Kegiatan pemagangan ini dilakukan pada perusahaan baik yang ada di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Luar Provinsi bahkan luar Negeri. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga telah melakukan kerja sama dengan pemerintah Luar Negeri dalam rangka peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pada tahun 2020,

jumlah tenaga kerja lulusan magang dalam negeri secara mandiri sebanyak 520 orang, dan tenaga kerja lulusan magang ke luar negeri (Jepang) sebanyak 296 orang.

4. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja dalam upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya tenaga kerja sektor formal dan masih tingginya tingkat pengangguran di Sumatera Barat diantaranya:

1. Tambahan angkatan kerja setiap tahunnya belum disertai dengan penambahan ketersediaan lapangan kerja baru sehingga menyebabkan banyaknya tenaga kerja sektor informal. Penyerapan tenaga kerja sektor informal pada Agustus 2020 mencapai 66,28%, sedangkan tenaga kerja sektor formal hanya 33,72%.
2. Masih rendahnya jumlah perusahaan/industri dan peluang kerja di Sumatera Barat.
3. Masih rendahnya kompetensi SDM pencari kerja di Sumatera Barat yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja/industri.

Beberapa strategi yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menurunkan pengangguran Sumatera Barat kedepannya:

1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja di Sumatera Barat agar memiliki daya saing di rumah sendiri dalam menghadapi ancaman masuknya tenaga kerja luar daerah maupun tenaga kerja asing, serta diharapkan memiliki kemampuan untuk memasuki pasar kerja global.
2. Meningkatkan kerjasama dan komitmen pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam menggiatkan pariwisata. Hal tersebut terindikasi menjadi

faktor pendorong meningkatnya peran dan kinerja sektor jasa, terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

3. Perbaiki tingkat pendidikan masyarakat (angkatan kerja). Hal ini diyakini juga akan mendorong peralihan penyerapan tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder/tersier.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dari industri olahan Komoditas Utama Sumatera Barat untuk meningkatkan harga komoditas, agar terjadi kenaikan permintaan dunia (ekspor), sehingga diharapkan bisa memperbaiki kinerja dan kebutuhan tenaga kerja pada lapangan usaha tersebut.

Untuk mendukung penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, tersedia pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp 3.815.079.612,-. Anggaran ini tersebar pada 6 program yaitu program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja dan diverifikasi usaha, program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, program perlindungan tenaga kerja dan sistem pengawasan tenaga kerja, dan program percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal. Pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah efektif mendukung penurunan tingkat pengangguran.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 3.815.079.612,-, terealisasi sebesar Rp 3.643.974.314,- atau 95,52%. Efisiensi tertinggi berasal dari pelaksanaan program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan yang realisasi anggarannya < 90% yaitu sebesar 87,05%. Jika dibandingkan antara capaian kinerja sebesar 81,79 % dengan capaian realisasi anggaran sebesar 95,52%, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 4,48%.

Misi 5
MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tujuan 5.1 Meningkatkan Fungsi Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Infrastruktur merupakan salah satu penggerak pertumbuhan perekonomian, peningkatan daya saing dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Agar terwujud pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, infrastruktur perlu dibangun, dipelihara dan dikembangkan dengan tepat. Infrastruktur terkait pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah antara lain jalan, jembatan, jaringan listrik, daerah irigasi dan perumahan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah sebagai tujuan 1 yang harus diwujudkan untuk mencapai misi 5 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Ketercapaian tujuan ini diukur dengan menggunakan 2 indikator yaitu jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap dan rasio elektrifikasi. Realisasi indikator kinerja tersebut tahun 2019 dan 2020 disajikan pada tabel 3.56.

Tabel 3. 56 Realisasi indikator kinerja tujuan 5.1

Indikator Kinerja	2020	2019
Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	44	40
Rasio Elektrifikasi	99,33	95,82

Berdasarkan tabel 3.56 dapat diketahui:

1. Realisasi Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap tahun 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 4 ruas jalan
2. Realisasi rasio elektrifikasi tahun 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 3,51%. Peningkatan rasio elektrifikasi ini menunjukkan semakin banyak rumah tangga yang menggunakan energi listrik. Tahun 2020 terjadi peningkatan RT yang menggunakan energi listrik sebanyak 85.026 RT

Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk mengukur tujuan 5.1 dapat disimpulkan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik. Dalam mencapai tujuan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 4 sasaran strategis yaitu meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah, meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan, meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air dan meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 4 sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran Strategis 5.1.1 **Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas** **Wilayah**


Pengembangan ekonomi dan wilayah salah satunya dipengaruhi oleh konektivitas dan aksesibilitas daerah tersebut. Untuk mencapai konektivitas dan aksesibilitas tersebut dibutuhkan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, jaringan dan transportasi. Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi mantap akan meningkatkan konektivitas antar daerah sehingga jarak tempuh antar wilayah akan semakin cepat/lebih singkat, menurunkan nilai Biaya Operasi Kendaraan (BOK) dan meningkatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

Dikarenakan konektivitas dan aksesibilitas wilayah berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan "meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah" sebagai sasaran pertama yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut adalah jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan semua ruas jalan provinsi yaitu sebanyak 58 ruas jalan berada dalam kondisi mantap $\geq 72\%$. Akan tetapi, banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut salah satunya ketersediaan anggaran maka pada tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021, ditetapkan target 40 ruas jalan provinsi berada dalam kondisi mantap $\geq 72\%$. Untuk tahun 2020, indikator kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap ditargetkan 38 ruas jalan. Penetapan target indikator ini mengacu pada dokumen perencanaan strategis dengan

mempertimbangkan realisasi di tahun 2019 dan kondisi jalan Provinsi secara keseluruhan. Pencapaian sasaran strategis 5.1.1. disajikan pada tabel 3.57.

Tabel 3. 57 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.1

	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	38	44	115,79

Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap target 38 ruas jalan, terealisasi 44 ruas jalan dengan tingkat capaian 115,79% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja ini diukur dari jumlah ruas jalan di Provinsi Sumatera Barat dengan kondisi jalan mantap sebanyak $\geq 72\%$ berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (hasil *final report* survey IRMS (*Integrated Road Management System*)). Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 600-903.1-2015 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsi dan statusnya diketahui bahwa total panjang jalan provinsi Sumatera Barat adalah 1525,20 km (58 ruas jalan). Pada tahun 2020 sebanyak 44 jumlah ruas jalan dari 58 jumlah ruas jalan yang tersebar pada 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat terkoneksi dengan kondisi jalan mantap $\geq 72\%$. Ruas jalan Provinsi tahun 2020 dalam kondisi mantap $\geq 72\%$ diuraikan pada tabel 3.58.

Tabel 3. 58 Ruas jalan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

NO	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS SURVEY (KM)	PANJANG RUAS (Km)	KEMANTAPAN			
					MANTAP		TIDAK MANTAP	
					KM	%	KM	%
1	P007	Simancung - Tj. Ampalu	10,6	11,08	8,57	77,36	2,51	22.64
2	P008	Tj. Ampalu-Sijunjung	19,8	20	15,35	76,77	4,65	23.23
3	P010	Simp. Sikabau -Simp. Koto Baru	29,48	29	25,46	87,79	3,54	12.21
4	P011	Simp. Koto Baru -Tj. Simalidu	12,1	11,9	9,24	77,69	2,66	22.31
5	P012	Simp. Koto Baru -Junction	5,17	5,4	5,19	96,13	0,21	3.87
6	P018	Indera Pura-Muara Sakai	7	7,3	7,09	97,14	0,21	2.86
7	P025	Manggopoh-Padang Luar	68,14	69,43	57,41	82,68	12,02	17.32
8	P028	Sicincin-Kurai Taji	16,63	16,44	15,45	93,98	0,99	6.02
9	P031	Panti -Simpang Empat	73,9	74,23	62,78	84,57	11,45	15.43
10	P033	Simpang Empat -Sasak	20	20	18,8	94	1,2	6.00
11	P034	Air Balam-Air Bangis	12,89	12,6	12,6	100	-	0.00
12	P035	Kubu Kerambil-Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang)	18,6	18,5	15,52	83,87	2,98	16.13
13	P036	Baso-Bts. Batusangkar (Balai Selasa)	28,6	28,79	27,98	97,20	0,81	2.80
14	P037	Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino	13,71	10,4	8,28	79,57	2,12	20.43
15	P038	Guguk Cino-Sawahlunto (Lapangan Segitiga)	30,12	30,6	24,5	80,08	6,1	19.92
16	P039	Guguk Cinoi -Sitangkai	14,5	15,12	11,99	79,31	3,13	20.69
17	P040	Sitangkai -Tj. Ampalu	17,28	17,28	13,08	75,69	4,2	24.31
18	P044	Bts. Kota Payakumbuh-Sitangkai	46,04	50,61	39,62	78,28	10,99	21.72
19	P054	Junction -Abai siat	12,38	12,6	12,6	100	-	0.00
20	P055	Sijunjung -Tanah Badantung	4,14	4,4	3,41	77,39	0,99	22.61
21	P056.1	Simp. Padang Aro-Lubuk Malako	19,24	20	16,67	83,37	3,33	16.63
22	P056.2	Lubuk Malako-Abai Sangir	16	17	13,18	77,50	3,83	22.50
23	P068	Padang Sawah-Kumpulan	36,1	36,5	31,65	86,70	4,85	13.30
24	P069.2	Bts. Payakumbuh - Suliki-Koto Tinggi	42,15	46,85	44,18	94,31	2,67	5.69
25	P070	Batusangkar-Ombilin	16,48	18,51	14,91	80,58	3,6	19.42
26	P071	Solok-Alahan Panjang		47,8	42	87,87	5,8	12.13

NO	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS SURVEY (KM)	PANJANG RUAS (Km)	KEMANTAPAN			
					MANTAP		TIDAK MANTAP	
					KM	%	KM	%
27	P072	Lubuk Basung-Sungai Limau	28,88	30,9	29,62	95,84	1,28	
28	P073	Pasar Baru-Alahan Panjang		49,4	35,6	72,06	13,8	27.94
29	P075	Simp. Duku (Ketaping)-Pariaman	22,25	20,5	19,95	97,30	0,55	2.70
30	P078	Simpang Koto Mambang - Balingka	37,6	39,4	38,98	98,94	0,42	
31	P080	Matur-Palembayan	21,34	20,7	18,63	89,99	2,07	10.01
32	P081	Palembayan-Palupuh (Simp. Patai)	12,2	13,3	11,56	86,89	1,74	13.11
33	P083	Teluk Kabung - Mandeh-Tarusan		44,1	44,1	100	-	0.00
34	P084	Lingkar Selatan (Payakumbuh)	13,94	14,17	12,75	89,96	1,42	10.04
35	P085	Simpang Padang Karambia -Tj. Bungo (TPA Regional)	2	2,05	2,05	100	-	0.00
36	P088	Padang Koto Gadang-Palembayan	30,58	31	27,76	89,54	3,24	10.46
37	P090	Palupuh - Pua gadih -Koto Tinggi	27,29	25	18,59	74,34	6,41	25.66
38	P091	Simpang Napar - Bukit Bual-Tanjung	14,69	23	20,18	87,75	2,82	12.25
39	P092	Sp. Ganting Payo -Batas Tanah Datar – Sumani	29,97	28,4	27,26	96	1,14	4.00
40	P094	Pintu Angin-Labuah Saiyo	5,59	5,5	5,5	100	-	0.00
41	P095	Rao-Rokan (Batas Riau)	32,66	33	28,55	86,53	4,45	13.47
42	P098	Teluk Bayur-Nipah-Purus	10,4	12	9	75	3	25.00
43	P100	Batu Batembak-Pelabuhan Panasahan	1	1,2	1,2	100	-	0.00
44	P103	Simp. SP II-Kantor Camat	4,31	5,1	4,63	90,71	0,47	9.29

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian indikator kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap sebesar 115,79% diukur dengan menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi indikator kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.59.

Tabel 3. 59 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	44	40	115,79	108,11	40

Realisasi indikator kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap tahun 2020 adalah 44, tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaiannya >100%. Jumlah ruas jalan yang tersebar pada 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat terkoneksi dengan kondisi jalan mantap $\geq 72\%$ tahun 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan persentase peningkatan sebesar 10% atau 4 ruas jalan mantap $\geq 72\%$. Capaian indikator kinerja ini tahun 2019-2020 juga menunjukkan tren yang positif.

Untuk tahun 2021, jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap ditargetkan 40 ruas jalan. Target ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Dikarenakan banyak faktor yang akan mempengaruhi kondisi ruas jalan antar daerah, maka penetapan target tahun 2021 akan dikaji/disempurnakan kembali.

Dalam meningkatkan jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap, di tahun 2020 Pemerintah melaksanakan hal-hal berikut ini:

1. Pengalokasian anggaran sebesar 7,69% APBD 2020 untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Barat.

2. Pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 3,644 Km
3. Pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan sepanjang 1.241,99 Km
4. Dibentuknya Unit Layanan Gangguan yang siap 24 jam untuk mengatasi bencana alam seperti banjir/longsor yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota.
5. Pengawasan dan kontrol yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

Selain upaya yang telah dilakukan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 masih menemukan hambatan/kendala sebagai berikut:

1. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 di Sumatera Barat.
2. Keterbatasan jumlah peralatan (alat berat) untuk mendukung pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
3. Kondisi alam (perbukitan dan jurang) yang sangat mempengaruhi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
4. Overload dari kendaraan yang menggunakan jalan.

Upaya untuk meningkatkan ruas jalan yang terkoneksi jalan mantap di masa yang akan datang antara lain:

1. Tetap memperhatikan kebutuhan dana jalan di wilayah agar tetap bisa mempertahankan umur rencana jalan dalam kondisi mantap.
2. Mencari alternatif pengembangan terkoneksi agar ada jalur alternatif untuk mencapai daerah yang terkoneksi, apabila ada terjadi jalan terganggu akibat longsor atau banjir.
3. Mengalokasikan dana secara konsisten agar jalan terkoneksi terjaga kondisinya.
4. Pengadaan peralatan (alat berat) yang memadai.

5. Dibuat peraturan terkait *overload* (beban berlebih) kendaraan dan kerjasama dengan Dinas Perhubungan dan stakeholder terkait.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah Rp. 338.235.383.051,-. Anggaran ini tersebar pada 13 program yaitu program pembangunan jalan dan jembatan provinsi (49 kegiatan), program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan (72 kegiatan), program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan (3 kegiatan), program penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota (13 kegiatan), program peningkatan dan pengembangan jasa konstruksi (4 kegiatan), program perencanaan penataan ruang (10 kegiatan), program pengendalian dan pemanfaatan ruang (2 kegiatan), program pembangunan sarana dan prasarana perkerataapian (5 kegiatan), program peningkatan dan pengamanan lalu lintas (4 kegiatan), program pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut (6 kegiatan), program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ (1 kegiatan), program peningkatan pelayanan angkutan (21 kegiatan), program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (3 kegiatan). Pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 338.235.383.051,-, terealisasi sebesar Rp. 319.088.369.772,- atau 94,34 %. Artinya, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 19.147.013.279,- (5,66%). Efisiensi tertinggi berasal dari pelaksanaan program Peningkatan Dan Pengembangan Jasa Konstruksi dan program Peningkatan Pelayanan Angkutan yang realisasi anggarannya <90%. Jika dibandingkan antara persentase capaian indikator kinerja jumlah ruas jalan

di Provinsi Sumatera Barat dengan kondisi mantap sebesar 115,79% dengan realisasi anggaran sebesar 94,34% diperoleh tingkat efisiensi 21,45%.



Sasaran Strategis 5.1.2

Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Energi Ketenagalistrikan


Infrastruktur lain yang perlu untuk ditingkatkan selain jalan dan jembatan adalah infrastruktur ketenagalistrikan. Infrastruktur ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya. Infrastruktur ketenagalistrikan merupakan infrastruktur penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, dan pemerataan industri, yang berdampak lanjutan bagi penciptaan lapangan kerja dan ekonomi daerah.

Pemerintah mempunyai peran dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pembangunan tersebut akan meningkatkan akses masyarakat untuk memanfaatkan/menggunakan energi listrik. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja rasio elektrifikasi.

Untuk tahun 2020, rasio elektrifikasi ditargetkan 99,30%. Penetapan target sebesar 99,30% mengacu pada target tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 (95,82%), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 3,48%. Pencapaian

sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan tergambar pada tabel 3.60.

Tabel 3. 60 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.2

	Target	Realisasi	Capaian
 Rasio Elektrifikasi	99,30	99,33	100,03

Rasio elektrifikasi target 99,30%, terealisasi 99,33% dengan tingkat capaian 100,03% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja rasio elektrifikasi diukur berdasarkan data dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Elektrifikasi} = \frac{1.299.370}{1.308.100} \times 100\% = 99,33\%$$

Ket: Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Total = 1.299.370 RT (1.292.545 Pelanggan RT dan 6.825 Pelangan RT Non PLN)

Jumlah RT Total di Sumatera Barat= 1.308.100 RT.

Rasio elektrifikasi Sumatera Barat 99,33% merupakan rata-rata dari rasio elektrifikasi 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Rincian rasio elektrifikasi 19 Kabupaten/Kota diuraikan pada tabel 3.61.

Tabel 3. 61 Rincian Rasio Elektrifikasi 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	REALISASI DESEMBER 2020					
		JUMLAH RUMAH TANGGA	JML PLG RMH TANGGA	JML PLG RMH TANGGA NON PLN	JML PLG RMH TANGGA TOTAL	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)
	SUMATERA BARAT	1.308.100	1.292.545	6.825	1.299.370	98,81	99,33
1	Agam	123.785	124.103	136	124.239	100,26	100,37
2	Dharmasraya	51.599	51.712	-	51.712	100,22	100,22
3	Kepulauan Mentawai	24.567	13.457	4.050	17.507	54,78	71,26
4	Lima Puluh Kota	86.655	85.200	152	85.352	98,32	98,50
5	Padang Pariaman	104.590	104.914	55	104.969	100,31	100,36
6	Pasaman	57.085	55.092	498	55.590	96,51	97,38
7	Pasaman Barat	95.585	100.801	24	100.825	105,46	105,48
8	Pesisir Selatan	108.355	105.451	682	106.133	97,32	97,95
9	Sijunjung	50.665	50.392	10	50.402	99,46	99,48
10	Solok	88.435	83.383	357	83.740	94,29	94,69
11	Solok Selatan	37.963	35.685	827	36.512	94	96,18
12	Tanah Datar	89.516	89.754	34	89.788	100,27	100,30
13	Kota Padang	254.635	257.162	-	257.162	100	100
14	Kota Pariaman	20.425	20.682	-	20.682	100	100
15	Kota Padang Panjang	13.371	13.402	-	13.402	100,23	100,23
16	Kota Bukittinggi	31.851	31.987	-	31.987	100,43	100,43
17	Kota Payakumbuh	34.107	34.196	-	34.196	100,26	100,26
18	Kota Solok	18.650	18.870	-	18.870	100	100
19	Kota Sawahlunto	16.261	16.302	-	16.302	100,25	100,25

Sumber data: Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Capaian indikator kinerja rasio elektrifikasi sebesar 100,03% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja rasio elektrifikasi tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.62.

Tabel 3. 62 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi

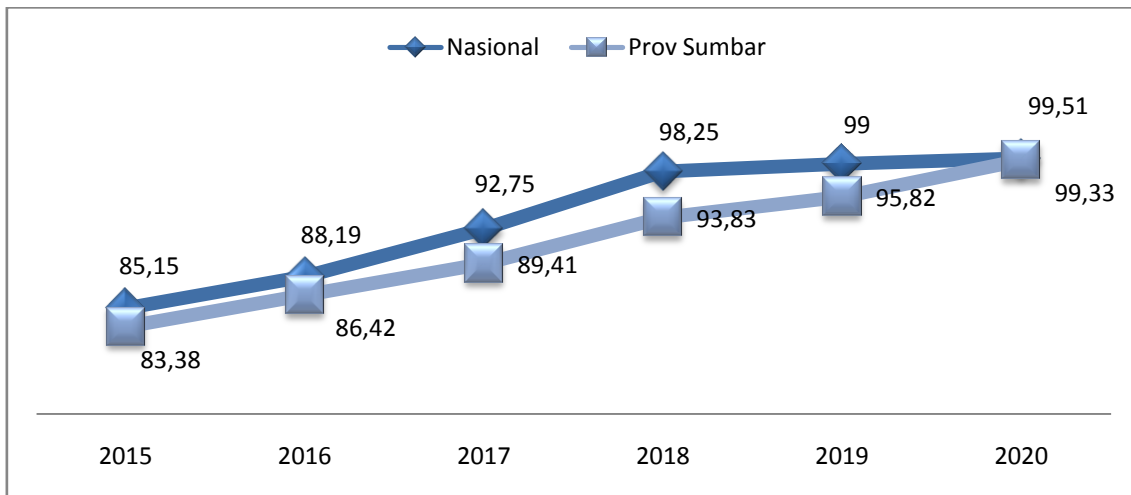
No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Rasio Elektrifikasi	99,33	95,82	100,03	96,62	99,75

Realisasi rasio elektrifikasi Sumatera Barat tahun 2020 adalah 99,33 lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaiannya >100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, rasio elektrifikasi tahun 2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 3,51. Capaian kinerja rasio elektrifikasi tahun 2019-2020 juga menunjukkan tren yang positif sejalan dengan tren realisasinya.

Untuk tahun 2021, rasio elektrifikasi ditargetkan 99,75 atau meningkat 0,42 dibandingkan dengan rasio elektrifikasi tahun 2020. Dengan kondisi rasio elektrifikasi Sumatera Barat sebesar 99,33, berarti di tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mencapai 99,58% dari target tahun 2021. Target tahun 2021, optimis dapat dicapai.

Jika dibandingkan dengan rasio elektrifikasi nasional, rasio elektrifikasi Sumatera Barat dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2015-2020) masih berada di bawah Nasional. Perbandingan rasio elektrifikasi Nasional dan rasio elektrifikasi Sumatera Barat tahun 2015-2020 disajikan pada grafik 39.

Grafik 39 Rasio Elektrifikasi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020



Sumber data: Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, selama tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan untuk:

1. Pembangunan 17 unit PLTS tersebar/SHS/LTSHE di Jorong Data Nagari Gerabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.
2. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha ketenagalistrikan (pemegang IO dan IUJPTL). Selama 2020, ditertibkan 33 pemilik izin penggunaan pembangkit untuk kepentingan sendiri (IO) dan 16 pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL).
3. Pemasangan instalasi listrik untuk rumah sederhana sebanyak 61 unit di Kabupaten Pasaman Barat.
4. Pemantauan perkembangan pembangunan 2 PLTM
5. Mendorong PT. PLN dalam perluasan jaringan listrik mencapai daerah-daerah terisolir.

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan rasio elektrifikasi antara lain:

1. Kesulitan untuk menuju lokasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
2. Keterbatasan APBD tahun 2020 dalam pengembangan pembangkit listrik.

Untuk kedepannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk membangun infrastruktur penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan listrik belum berkembang pada daerah terpencil dan pedesaan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan adalah Rp. 1.958.724.957,-. Anggaran ini tersebar pada 4 program yaitu program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan (6 kegiatan), program pembinaan, pengembangan dan pengawasan energi (4 kegiatan) program pengelolaan mineral dan batubara (7 kegiatan), dan program perencanaan dan pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (1 kegiatan). Pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 1.958.724.957,- terealisasi sebesar Rp. 1.950.737.357,- atau 99,59%. Artinya, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7.987.600,- (0,41%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja rasio elektrifikasi sebesar 100,03% dengan realisasi anggaran sebesar 99,59% diperoleh tingkat efisiensi 0,44%.



Sasaran Strategis 5.1.3 **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air**


Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. Akan tetapi, keberadaan sumber daya ini tidak selalu tetap sesuai kebutuhan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan pasokan air bisa disebabkan oleh kekeringan, bencana banjir serta belum optimalnya kinerja jaringan irigasi. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air antara lain melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pengendalian banjir dan pengamanan pantai serta pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya.

Dalam hal pengelolaan sumber daya air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air baku, mengendalikan daya rusak air dan melaksanakan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebagai sasaran ke 3 yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air.

Untuk tahun 2020, persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air ditargetkan 65,37%. Penetapan target indikator kinerja ini mengacu pada dokumen perencanaan strategis dengan mempertimbangkan tren realisasi indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun

sebelumnya. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 (63,95%), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 1,42%. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tergambar pada tabel 3.63.

Tabel 3. 63 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.3

	Target	Realisasi	Capaian
 Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya Air	65,37	64,20	98,21

Rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air target 65,37%, terealisasi 64,20% dengan tingkat capaian 98,21% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air diukur berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air} = \frac{76,54 \% + 64,29 \% + 51,78 \%}{3} = 64,20\%$$

Ket: persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi = 76,54 %
 persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air = 64,29 %
 persentase volume tampungan sumber-sumber air = 51,78 %

Perkembangan masing-masing komponen infrastruktur pengelolaan sumber daya air diuraikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan air irigasi

Pemenuhan kebutuhan air irigasi sangat erat kaitannya dengan luas daerah irigasi yang berfungsi. Pemenuhan kebutuhan air irigasi tahun 2020 adalah

76,54%. Tahun 2020, luas daerah irigasi yang fungsional adalah 49.759,48 ha. Jumlah tahun 2020 menunjukkan peningkatan sebesar 231 ha dibandingkan dengan luas daerah irigasi fungsional tahun 2019 (49.528,48 Ha).

2. Luas Kawasan yang terlindungi dari daya rusak air

Luas kawasan yang terlindungi daya rusak air tahun 2020 adalah 64,29% dari luas kawasan yang terdampak daya rusak air (3.130 ha). Luas kawasan ini meningkat 12,682 ha di tahun 2020 dibandingkan dengan luas kawasan yang terlindungi di tahun 2019 (1.999,495 ha).

3. Volume tampungan sumber-sumber air

Volume tampungan sumber-sumber air tahun 2020 adalah 51,78% dari volume potensi tampungan sumber-sumber air (587.467 m³). Jumlah ini tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019.

Capaian indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebesar 98,21% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.64.

Tabel 3. 64 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air	64,20	63,95	98,21	102,48	68,33

Rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2020 sebesar 64,20 tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya < 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi indikator kinerja ini menunjukkan tren positif dengan peningkatan di tahun 2020 sebesar 0,25. Berbanding terbalik dengan realisasi, tren capaian kinerja tahun 2019-2020 menunjukkan tren negatif dengan penurunan 4,27% di tahun 2020.

Untuk tahun 2021, rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air ditargetkan 68,33% atau meningkat 4,13% dari kondisi tahun 2020. Realisasi 2020 sebesar 64,20% menunjukkan pencapaian 93,96% dari target 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengoptimalkan upaya untuk mencapai target tahun 2021.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi 14 Daerah irigasi dengan rincian penanganan (1.159,99 m saluran primer, 987 m saluran sekunder, 25 m saluran tersier, 179 m saluran suplesi, 10 meter saluran pembuang, rehabilitasi 2 unit bendung, 3 unit bangunan ukur, 6 unit bangunan terjun, 1 unit penahan tebing dan 15 unit pintu air). Rehabilitasi DI ini berdampak pada peningkatan pemenuhan kebutuhan air irigasi sebanyak \pm 231 ha menjadi 49.528,48 ha di tahun 2020. Pemenuhan kebutuhan air irigasi 76,54% dari luas daerah irigasi kewenangan Provinsi (65.007 ha). Rincian Daerah Irigasi yang direhabilitasi tahun 2020 disajikan pada tabel 3.65.

Tabel 3. 65 Rincian Daerah Irigasi yang Direhabilitasi Tahun 2020

NO	DAERAH IRIGASI
1	D.I Bdr. Gadang Darek Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
2	D.I Talang Kemuning Jaya Kabupaten Pesisir Selatan
3	D.I Sapan Kayu Manang Kabupaten Solok
4	D.I Bdr. Sungai Aro Kabupaten Solok Selatan
5	D.I Koto Tuo Kota Padang
6	D.I Gunung Nago Kota Padang
7	D.I Bdr. Batu Hampa Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi
8	D.I Bdr. Halim Kabupaten Solok - Kota Solok
9	D.I Bdr. Batang Lembang Kabupaten Solok - Kota Solok
10	D.I Batang Parika Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
11	D.I Bandar Sangkir Geragahan Kabupaten Agam
12	DI. Batang Partupangan, Kabupaten Pasaman Barat (Kegiatan Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP))
13	DI Batang Tabik Kabupaten 50 Kota-Kota Payakumbuh (Kegiatan Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP))
14	DI. Lubuk Gobing Kabupaten Pasaman Barat (Kegiatan Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP))

Sumber data: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

- Membangun infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan pantai sepanjang 1.748 meter. Pembangunan infrastruktur ini berdampak pada perlindungan kawasan sebanyak 12.682 ha. Rincian pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan pantai disajikan pada tabel 3.66.

Tabel 3. 66 Rincian Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Tahun 2020

No	Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai
1	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Lurus-Maransi Kota Padang
2	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Sinamar Kabupaten 50 Kota
3	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Kalampaian Kabupaten Padang Pariaman
4	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Masang Kabupaten Pasaman Barat
5	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
6	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Hulu Masang Kabupaten Pasaman
7	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Belimbing Kota Padang
8	Pengamanan Muara dan Pantai Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan

No Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai

9	Pengamanan Pantai Pasi nan Tigo Kota Padang
10	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Ampu Kabupaten Pasaman Barat
11	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Mangor Kabupaten Padang Pariaman

Sumber data: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Pemeliharaan 7 embung yang tersebar di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Embung yang dipelihara selama tahun 2020 adalah sebagai berikut: Embung Batu Gadang (Kabupaten Tanah Datar), Embung Bancah (Kabupaten 50 kota), Embung Candung (Kabupaten Agam), Embung Ampiang Parak, Embung Taratak Timbulun (Kabupaten Pesisir selatan), Embung Parambahan (Kabupaten Solok) dan Embung Payo (Kabupaten Sijunjung).

Dalam hal peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadapi kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid 19. Dikarenakan pengelolaan sumber daya air ini sangat terkait dengan ketersediaan anggaran, maka refocusing anggaran mengakibatkan pembangunan beberapa infrastruktur sumber daya air tidak jadi dilaksanakan.
2. Kompetensi personel penyedia jasa (konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor) serta kinerja penyedia jasa yang masih perlu ditingkatkan
3. Waktu pelaksanaan pekerjaan yang sangat dipengaruhi oleh pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air di masa yang akan datang antara lain

1. Mengoptimalkan pemeliharaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pengelolaan sumber daya air.
3. Mengoptimalkan pengawasan agar infrastruktur pengelolaan sumber daya air dapat dimanfaatkan dengan baik.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air adalah Rp. 61.649.161.107,-. Anggaran ini tersebar pada 5 program yaitu program peningkatan dan pengembangan jasa konstruksi (4 kegiatan), program pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan kewenangan provinsi lainnya (46 kegiatan), program penyediaan dan pengolahan air baku (4 kegiatan), program pengendalian banjir dan pengamanan pantai (45 kegiatan), dan program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya (13 kegiatan). Pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 61.649.161.107,-, terealisasi sebesar Rp. 60.069.024.234,- atau 97,44%. Artinya, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.580.136.873,- (2,56%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebesar 98,21% dengan realisasi anggaran sebesar 97,44% diperoleh tingkat efisiensi 0,77%.



Sasaran Strategis 5.1.4 **Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur** **Layanan Dasar Masyarakat**

Layanan dasar masyarakat meliputi air bersih, sanitasi, listrik, permukiman. Hal yang perlu dilakukan untuk memenuhi layanan dasar tersebut adalah melalui pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat. Pembangunan ini diharapkan akan berdampak pada pemenuhan akan air bersih, sanitasi, listrik dan permukiman yang layak huni. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kewajiban pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat untuk mewujudkan tujuan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat. Cakupan infrastruktur layanan masyarakat dalam hal ini meliputi cakupan air minum, cakupan sanitasi dan penurunan rumah layak huni.

Untuk tahun 2020, persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat ditargetkan 54%. Penetapan target sebesar 54% mengacu pada target tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan juga mempertimbangkan anggaran pendukung. Hal ini dikarenakan pencapaian indikator ini sangat erat kaitannya dengan ketersediaan anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 (55,23%), target tahun 2020 ditetapkan 1,23% di bawah realisasi tahun 2020. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat tergambar pada tabel 3.67.

Tabel 3. 67 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.4

	Target	Realisasi	Capaian
 Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	54	55,57	102,91

Persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat target 54, terealisasi 55,57 dengan tingkat capaian 102,91% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat diukur berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat} = \frac{80,04\% + 81,68\% + 5\%}{3} = 55,57\%$$

Ket: cakupan air minum = 80,04%
 cakupan sanitasi = 81,68%
 penurunan rumah layak huni = 5%

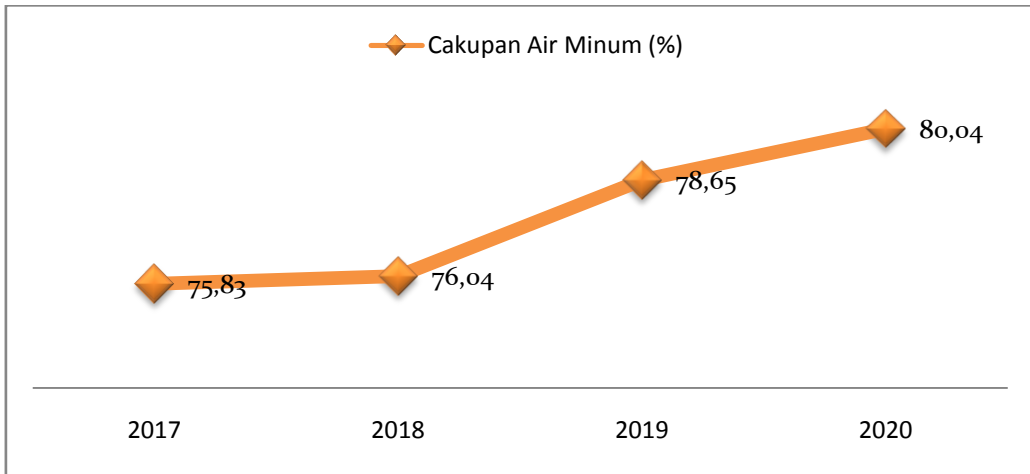
Perkembangan masing-masing komponen cakupan layanan masyarakat diuraikan sebagai berikut:

1. Cakupan Air Minum

Cakupan air minum Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mencapai 80,04% dari 5.060.063 jiwa (jumlah penduduk akses aman). Cakupan air minum tahun 2020 menunjukkan peningkatan 70.337 jiwa dari kondisi tahun 2019 (3.979.882 jiwa). Akses penyediaan air minum berasal dari jaringan perpipaan (PDAM dan Non PDAM) dan non perpipaan.

Dalam kurun waktu 4 tahun (2017-2020), cakupan air minum Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan sebagaimana digambarkan pada grafik 40.

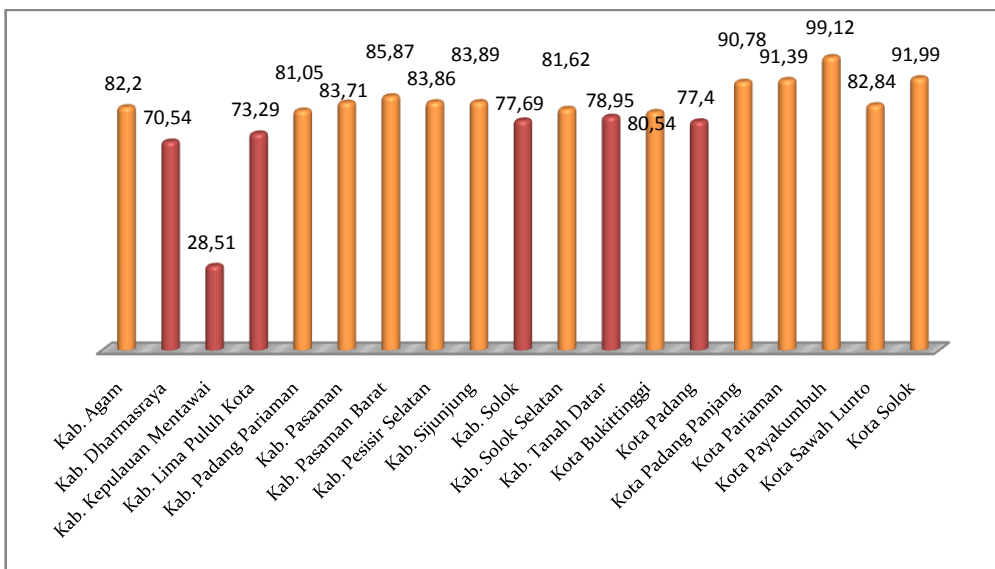
Grafik 40 Perkembangan Cakupan Air Minum Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2020



Sumber data: Dinas PUPR

Cakupan air minum 80,04% merupakan rekapitulasi dari data cakupan air minum 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Masih ada 6 Kabupaten/kota yang cakupan air minumnya <80%. Cakupan air minum kabupaten/kota tahun 2020 digambarkan pada grafik 41.

Grafik 41 Cakupan Air Minum Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

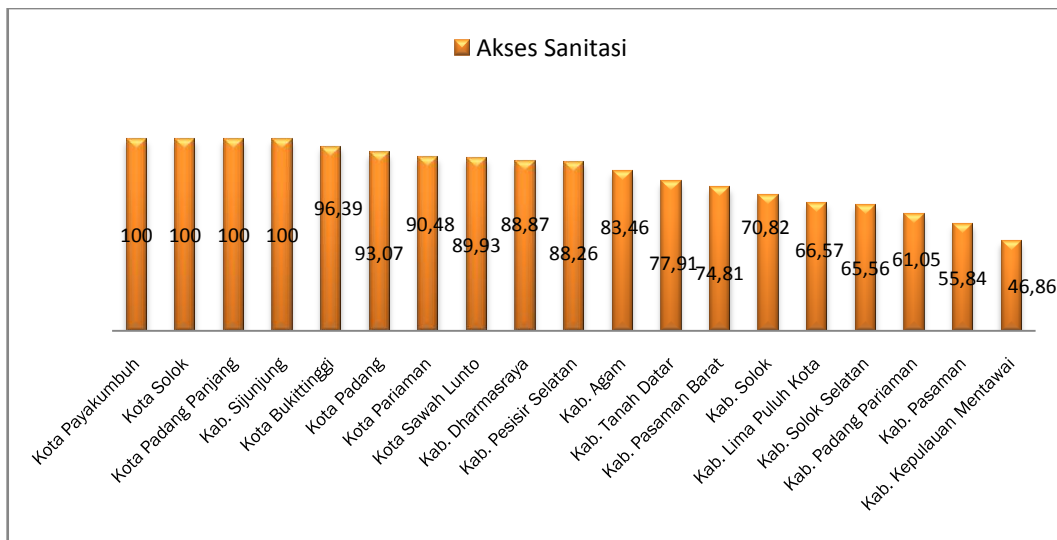


Sumber data: Dinas PUPR

2. Cakupan Sanitasi

Cakupan sanitasi ditargetkan agar rumah tangga memiliki akses jamban yang sehat. Cakupan sanitasi Provinsi Sumatera Barat adalah 81,68% meningkat 1,9% dibandingkan dengan cakupan sanitasi 2019 (79,78%). Cakupan sanitasi 81,68 merupakan akumulasi dari cakupan sanitasi dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Gambaran cakupan sanitasi kabupaten/kota tahun 2020 disajikan pada grafik 42.

Grafik 42 Cakupan Sanitasi Kabupaten/Kota tahun 2020



Sumber data: Dinas PUPR

3. Penurunan Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni (RTLH) di tahun 2020 menurun 5%. Jumlah RTLH di tahun 2020 meningkat dari kondisi sebelumnya menjadi 205.493 unit. Sepanjang 2020, sebanyak 10.410 rumah tidak layak huni ditangani di Sumatera Barat. Penanganan RTLH didanai dari BSPS (Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat) dan NAHP. Jumlah RTLH yang dapat ditangani pada tahun 2020 menurun 1.351 unit dibandingkan dengan di tahun 2019 (11.761 unit). Penanganan RTLH untuk 10.410 unit tersebut tersebar di 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Rincian penanganan RTLH disajikan pada tabel 3.68.

Tabel 3. 68 Penanganan RTLH berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Penanganan RTLH		
		BSPS	NAHP	JUMLAH
1	Kota Payakumbuh	100	0	100
2	Kota Solok	0	0	0
3	Kota Padang Panjang	100	0	100
4	Kab. Sijunjung	313	0	313
5	Kota Bukittinggi	0	0	0
6	Kota Padang	442	320	762
7	Kota Pariaman	100	0	100
8	Kota Sawah Lunto	0	0	0
9	Kab. Dharmasraya	500	0	500
10	Kab. Pesisir Selatan	1075	640	1715
11	Kab. Agam	620	160	780
12	Kab. Tanah Datar	640	340	980
13	Kab. Pasaman Barat	450	450	900
14	Kab. Solok	942	0	942
15	Kab. Lima Puluh Kota	180	0	180
16	Kab. Solok Selatan	558	510	1068
17	Kab. Padang Pariaman	710	300	1010
18	Kab. Pasaman	680	280	960
19	Kab. Kepulauan Mentawai	0	0	0
TOTAL		7410	3000	10410

Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Capaian indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat sebesar 102,91% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.69.

Tabel 3. 69 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat	55,57	55,23	102,91	102,91	56,33

Cakupan infrastruktur layanan masyarakat tahun 2020 adalah 55,57%, tercapai di atas target yang ditetapkan sehingga capaiannya >100%. Tren realisasi persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat tahun 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan 0,34%. Untuk capaian indikator ini tahun 2019 dan 2020 menunjukkan nilai yang sama.

Untuk tahun 2021, persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat di targetkan 56,33 atau meningkat sebesar 0,76% dibandingkan realisasi tahun 2020. Realisasi tahun 2020 sebesar 55,57 menunjukkan pencapaian 98,65% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengoptimalkan upaya untuk mencapai target tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan cakupan infrastruktur layanan masyarakat antara lain:

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengembangan dalam pelayanan air minum, sanitasi dan perumahan layak huni.
2. Melaksanakan pengawasan dan kontrol terkait pelayanan air minum, sanitasi dan perumahan layak huni.
3. Berkoordinasi dengan PDAM Kabupaten/Kota dan Pansimas dalam membangun jaringan perpipaan air minum.
4. Mengedukasi masyarakat untuk menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).

Dalam hal peningkatan cakupan infrastruktur layanan masyarakat di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadapi kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid 19. Dikarenakan pembangunan infrastruktur sangat terkait dengan ketersediaan anggaran, maka refocusing anggaran mengakibatkan pembangunan beberapa infrastruktur layanan masyarakat tidak jadi dilaksanakan.
2. Keterbatasan ketersediaan sumber air baku dan kesulitan dalam pembebasan lahan
3. Masih banyak daerah/desa di Kabupaten/Kota yang sulit dijangkau
4. Kurang akuratnya data terkait Rumah Tidak Layak huni.

Infrastruktur layanan masyarakat seperti air minum, sanitasi layak dan perumahan layak huni menjadi kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Oleh karena itu kedepannya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk:

1. Konsisten mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengembangan dalam pelayanan air minum, sanitasi dan perumahan layak huni.
2. Mendorong Kabupaten/Kota yang mempunyai keterbatasan sumber daya untuk melakukan kerjasama dengan pihak terkait pengelolaan air minum.
3. Mendorong Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan anggaran terkait pembangunan infrastruktur layanan masyarakat.
4. Mendorong Kabupaten//kota untuk menyediakan data Rumah Tidak Layak Huni yang lebih akurat.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat adalah Rp. 5.721.569.436,-. Anggaran ini tersebar pada 7 Program yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kabupaten/Kota (4 Kegiatan), Program Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem Air Limbah (4 Kegiatan), Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi (4 Kegiatan), Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan (3 Kegiatan), Program Pengembangan Perumahan (4 Kegiatan), program pengelolaan, pengembangan dan konservasi air tanah (6 kegiatan) dan program pengelolaan pertanahan (7 kegiatan). Pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 5.721.569.436,- terealisasi sebesar Rp. 5.611.003.157,- atau 98,07%. Artinya, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 110.566.279,- (1,93%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat sebesar 102,91% dengan realisasi anggaran sebesar 98,07% diperoleh tingkat efisiensi 4,84%.

Tujuan 5.2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Pemerintah Provinsi Sumatera barat menetapkan tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup adalah keniscayaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kelangsungan makhluk hidup yang membutuhkan unsur-unsur penting dari lingkungan hidup itu sendiri, seperti air, udara dan mineral. Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup nasional dan daerah yang digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota di tingkat provinsi. IKLH merupakan hasil

penggabungan analisis dari tiga indikator komponen lingkungan yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat perubahan nomenklatur, komponen indeks, metode perhitungan dan pembobotannya. Komponen yang digunakan dalam perhitungan IKLH di tahun 2020 yaitu Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas air laut. Akan tetapi, dikarenakan Pemerintah Provinsi tidak melakukan pemantauan kualitas air laut, maka dalam perhitungan IKLH untuk kabupaten/kota menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$$

IKLH Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat. IKLH merupakan salah satu alat untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup berdasarkan dari tren data sehingga dapat dijadikan salah satu kebijakan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Untuk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020, IKLH ditargetkan sebesar 77,76 (kategori baik). Penetapan target tahun 2020 mengacu pada target tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan IKLH tahun 2019 (meningkat 0,678 dari tahun sebelumnya) dan berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perhitungan IKLH. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang mencapai 77,082, target tahun 2020 meningkat 0,678. Pencapaian indikator kinerja tujuan 5.1. disajikan pada tabel 3.70.

Tabel 3. 70 Capaian indikator kinerja Tujuan 5.1

	Target	Realisasi	Capaian
 Indeks Kualitas Lingkungan hidup	77,76	79,33	102,02

Indeks kualitas lingkungan hidup target 77,76 (kategori baik), terealisasi 79,33 (kategori baik) dengan tingkat capaian 102,02% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diukur berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan skor dan kriteria sebagaimana disajikan pada tabel 3.68, IKLH sebesar 79,33 termasuk kategori Baik. Hal ini menunjukkan tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dapat tercapai dengan baik.

Tabel 3. 71 Skor dan Kriteria IKLH

SKOR	KRITERIA
90 – 100	Sangat Baik
70 – 89,9	Baik
50 – 69,9	Sedang
25 – 49,9	Buruk
0 – 24,9	Sangat Buruk

Sumber : KLHK, 2020

Rincian indeks kualitas lingkungan hidup diuraikan sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai 2020
1	Indeks Kualitas Air	75
2	Indeks Kualitas Udara	90,39
3	Indeks Kualitas Lahan	66,31

Capaian indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 102,02% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.72.

Tabel 3. 72 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas lingkungan hidup

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,33	77,082	102,02	110,88	69,43

Indek kualitas lingkungan hidup di tahun 2020 sebesar 79,33 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini >100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Kualitas lingkungan Hidup menunjukkan tren positif dengan peningkatan 2,248 di tahun 2020. Akan tetapi, untuk tren capaian kinerja tahun 2019-2020 menunjukkan tren negatif dengan penurunan 8,86. Hal ini dipengaruhi oleh penetapan target yang terlalu rendah di tahun 2019.

Untuk tahun 2021, Indeks Kualitas lingkungan hidup ditargetkan 69,43. Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2020 sudah tercapai di atas target tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali penetapan target tahun 2021.

Untuk pencapaian lingkungan hidup yang berkualitas, tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah, namun juga harus ada upaya perubahan dari masyarakat hingga industri yang menjaga aktivitasnya agar ramah lingkungan. Kesadaran berbagai pihak perlu terus ditingkatkan untuk selalu menjaga lingkungan hidup. Adapun upaya yang dilaksanakan oleh Pemeritah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah:

1. Menurunkan beban pencemaran dan merusakkan lingkungan melalui:

- a. Pemulihan Lahan Akses Terbuka oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jorong Balah Hilia Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dengan konsep ekowisata.
 - b. Penegakan hukum lingkungan terhadap 2 (dua) objek PROPER yang diduga melakukan pelanggaran.
2. Meningkatkan upaya pemeliharaan lingkungan hidup melalui:
- a. Adanya Surat Gubernur yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota terkait dengan kewajiban penyusunan dan evaluasi terhadap dokumen KLHS dan AMDAL/UKL-UPL.
 - b. Terdapat ketentuan yang menjadikan KLHS sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan persetujuan substansi dan/atau draft Perda dokumen perencanaan yang akan diproses penetapannya.
 - c. Koordinasi yang baik dengan kabupaten/kota terkait upaya-upaya pemeliharaan lingkungan. Sehingga pemerintah kabupaten/kota berupaya melakukan pemeliharaan lingkungan di wilayah masing-masing.
3. Meningkatkan kapasitas dan peran serta *stakeholder* baik perorangan, kelompok masyarakat, dan lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan melalui penetapan 8 (delapan) orang calon penerima Kalpataru tahun 2020, peran aktif 15 orang/kelompok masyarakat dalam bank sampah dan dasawisma dan peran aktif 20 orang/kelompok dalam kegiatan kampung iklim.

Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi tantangan berbagai isu lingkungan seperti:

1. Fluktuasi debit sungai dan pencemaran air. Isu ini antara lain dilatarbelakangi oleh meningkatnya pertumbuhan infrastruktur dan

ekonomi (misalnya industri sawit), meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pemukiman, meningkatnya luas lahan, meningkatnya produktivitas perikanan darat dan peternakan aktifitas pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga ke sungai, kurangnya komitmen pemda dalam pengawasan dan kebijakan tata ruang yang buruk.

2. Persampahan. Isu ini didorong oleh beberapa faktor, seperti peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya penggunaan bahan sekali pakai (tidak guna ulang), kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri, budaya malas, isu sampah tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah, berkembangnya program pengembangan pariwisata, kurangnya kesadaran pemerintah terhadap pengelolaan sampah dan tidak adanya penegakan hukum.
3. Alih fungsi lahan dan penurunan tutupan hutan. Isu ini berkembang akibat dari beberapa faktor, antara lain pertumbuhan penduduk yang meningkat dan tidak merata, peningkatan jumlah kebutuhan perumahan, pembukaan lahan baru dari masyarakat untuk perkebunan, dan lainnya.

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di masa yang akan datang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus berupaya untuk:

1. Meningkatkan upaya-upaya penataan lingkungan, dengan cara memenuhi kuantitas dan kualitas dokumen-dokumen perencanaan lingkungan dan penataan terhadap dokumen tersebut, menata perizinan lingkungan agar sesuai dengan tata kelola *good governance* dan mengupayakan terwujudnya mekanisme dan instrumen valuasi ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengendalikan laju beban pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan cara optimalisasi pengawasan, penerapan supremasi hukum dan

mengambil Langkah-langkah penanggulangan.

3. Meningkatkan upaya-upaya pemeliharaan dan konservasi lingkungan melalui optimalisasi penetapan kawasan dan pengendalian mutu lokasi pemeliharaan.
4. Meningkatkan kapasitas dan peran serta pemangku kepentingan dengan cara meningkatkan pemahaman mereka dan memfasilitasi dan membebaskan masyarakat seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup telah ditetapkan 3 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran Strategis 5.2.1

Meningkatnya Kualitas Air dan Udara

Air dan udara merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Peningkatan kualitas air dan udara akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, begitupun sebaliknya. Agar air dan udara dapat bermanfaat bagi pelestarian lingkungan hidup maka udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran air dan udara. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas air dan udara sebagai salah satu sasaran strategis yang harus dicapai untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja yaitu indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Capaian sasaran meningkatnya kualitas air dan udara tergambar pada tabel 3.73.

Tabel 3. 73 Capaian indikator kinerja Kinerja Sasaran Strategis 5.2.1

	Target	Realisasi	Capaian
 Indeks Kualitas Air	78	75	96,15
 Indeks Kualitas Udara	90	90,39	100,43
Rata-rata Capaian			98,29

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara adalah sebesar 98,29% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia. Untuk melestarikan fungsi air, perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Untuk mengetahui kualitas air ditetapkan indikator kinerja Indeks Kualitas Air. Penetapan indikator Indeks Kualitas Air diukur berdasarkan pemantauan sungai lintas kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan menggunakan parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) terlebih dahulu dihitung Indeks Pencemaran Air (IPA) yang diperoleh dari hasil pengukuran kualitas air sungai. Setelah IPA diperoleh kemudian dilakukan konversi ke IKA. Perhitungan IPA dengan menggunakan rumus:

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

Keterangan :

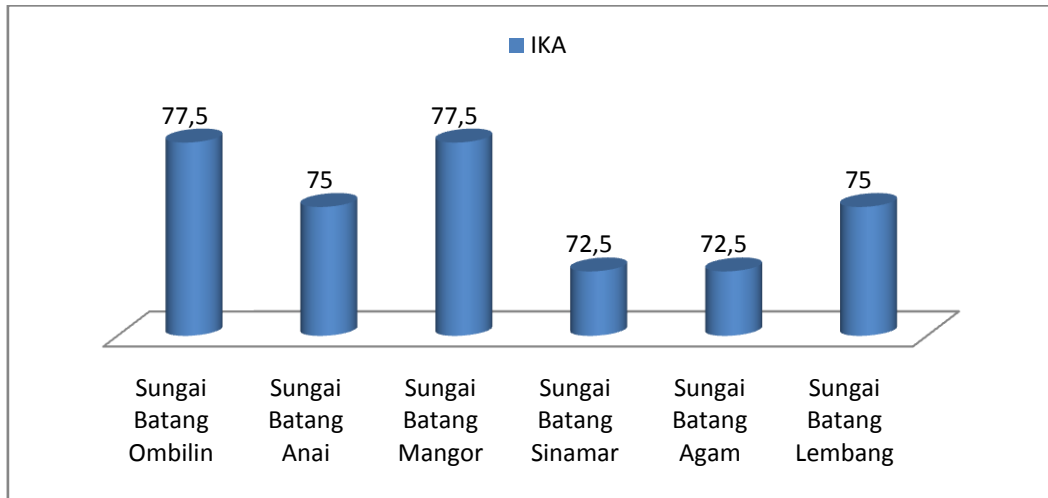
- PI_j : Indeks Pencemaran Air (IPA) sungai
- C_i/L_{ij} : perbandingan kadar maksimum hasil uji per parameter dengan Baku Mutu
- M : Maksimum
- R : Rata-rata

Pada tahun 2020, Indeks Kualitas Air ditargetkan sebesar 78 (kategori baik). Penetapan target indeks kualitas air mengacu pada target tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan Indeks Kualitas Air tahun 2019 serta berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perhitungan Indeks Kualitas Air. Jika dibandingkan dengan indeks kualitas air tahun 2019 (77,37) target tahun 2020 ditetapkan lebih tinggi 0,63.

Indeks Kualitas Air ditargetkan 78, terealisasi 75 dengan tingkat capaian 96,15% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indeks kualitas air diukur dari hasil pemantauan 6 sungai lintas kabupaten/kota di Sumatera Barat yaitu Sungai Batang Ombilin, Sungai Batang Anai, Sungai Batang Mangor, Sungai Batang Sinamar, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lembang berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Indeks kualitas air sebesar 75 menunjukkan kualitas air sungai di Provinsi Sumatera Barat termasuk pada kategori Baik. Rincian nilai IKA untuk 6 sungai yang dipantau disajikan dalam grafik 43.

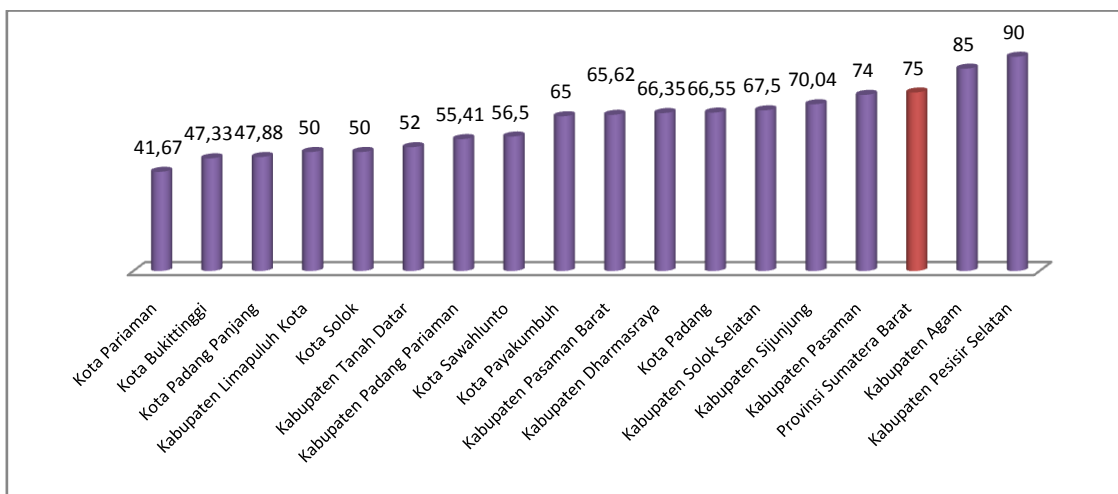
Grafik 43. Indeks Kualitas Air 6 Sungai yang dipantau



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Data Indeks Kualitas Air dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan ada 2 kabupaten/kota yang indeks kualitas airnya lebih tinggi dibandingkan dengan indeks kualitas air Provinsi Sumatera Barat. 15 Kabupaten/Kota dengan indeks kualitas airnya lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Pariaman memiliki indeks kualitas air yang terendah (41,67). Untuk Kabupaten Solok dan Kabupaten Kepulauan Mentawai belum ada indeks kualitas airnya. Gambaran Indeks Kualitas Air Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2020 disajikan pada grafik 44.

Grafik 44 Indeks Kualitas Air Kabupaten/Kota di Sumatera Barat



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja indeks kualitas air sebesar 96,15% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kualitas air tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.74.

Tabel 3. 74 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas air

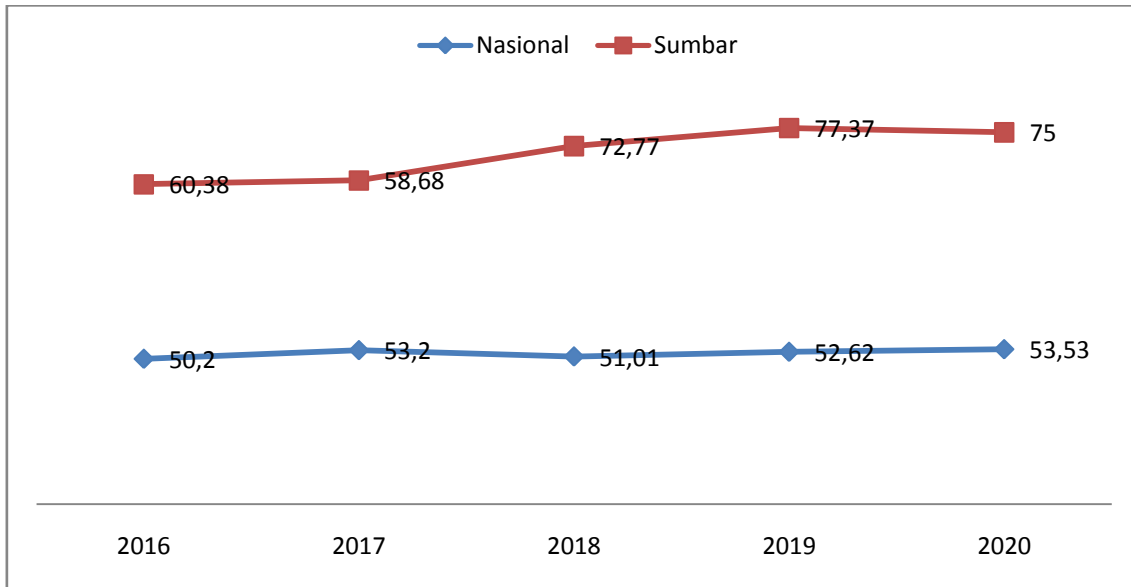
No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks Kualitas Air	75	77,37	96,15	117,85	65,98

Indek kualitas air di tahun 2020 sebesar 75, belum tercapai sesuai target yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini <100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Kualitas Air mengalami penurunan sebesar 2,37 di tahun 2020. Walaupun menurun, indeks kualitas air masih berada pada kategori Baik. Seiring dengan penurunan realisasi, capaian kinerja indeks kualitas air juga menurun 21,7 di tahun 2020.

Untuk tahun 2021, Indeks Kualitas air ditargetkan 65,98. Indeks kualitas air tahun 2020 sudah tercapai di atas target tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali penetapan target tahun 2021.

Indeks Kualitas Air Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional dengan selisih 21,47 di tahun 2020. Perbandingan Indeks Kualitas Air Provinsi dengan Nasional tahun 2016-2020 digambarkan pada grafik 45.

Grifik 45 Indeks Kualitas Air Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Dalam hal peningkatan kualitas air, salah satu yang dikelola adalah Limbah domestik yang masuk ke sungai. Limbah tersebut berasal dari permukiman penduduk dan pemilik usaha dan/atau kegiatan. Akan tetapi kewajiban pengelolaan baru dapat diterapkan untuk pemilik usaha dan/atau kegiatan. Peningkatan IKA juga dipengaruhi oleh peningkatan kualitas lahan karena akan mengurangi laju erosi yang menyebabkan peningkatan parameter TSS, TDS dan penurunan DO dari kadungan minimum.

Upaya yang telah dilakukan sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir dampak limbah cair yaitu:

1. Melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat salah satunya terkait dengan pengelolaan dan pemantauan limbah cair.
2. Penambahan jumlah objek Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER) dengan terlebih dahulu mengajukan usulan kepada KLHK. Pada PROPER

selain limbah cair dari proses produksi juga dilakukan penilaian ketaatan limbah cair domestik.

3. Memberikan rekomendasi kepada instansi lingkungan hidup terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan telah terbukti bahwa limbah cair yang dibuang melalui outlet melebihi baku mutu dari hasil penanganan pengaduan.
4. Mendorong instansi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk mewajibkan pemilik usaha dan/atau kegiatan mengelola limbah domestik melalui mekanisme 1) mengintegrasikan limbah cair domestik dengan limbah cair dari proses 2) membuat kolam IPAL tersendiri untuk mengelola limbah domestik 3) limbah domestik terintegrasi dengan septic tank yang kedap air dan bekerjasama dengan pihak ketiga guna penyedotan.
5. Mendorong kepada OPD terkait kabupaten/kota maupun provinsi guna membuat IPAL komunal limbah domestik pada pemukiman masyarakat di sekitar sungai.

Dalam hal meningkatkan kualitas masih ditemukan faktor penghambat antara lain:

1. Belum adanya kegiatan di kabupaten/kota yang secara langsung dapat memperbaiki kualitas air sungai sehingga dapat meningkatkan IKA di kabupaten/kota.
2. Sulitnya merubah perilaku masyarakat seperti tidak membuang sampah dan Buang Air Besar di Sungai.
3. Sarana, prasarana dan jangkauan layanan pengelolaan sampah yang masih terbatas.
4. Belum terkelolanya limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat sebelum dibuang ke sungai.

5. Masih maraknya kegiatan penambangan ilegal di sungai.
6. Kegiatan penambangan masih diperbolehkan sepanjang mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.

Upaya untuk peningkatan Indeks Kualitas Air di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pengalihan pupuk kimia ke pupuk organik guna mewujudkan pertanian ramah lingkungan.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terkait dengan perubahan perilaku masyarakat agar tidak buang air besar sembarangan.
3. Melakukan upaya sinergisitas dalam mengelola sumber pencemar, melakukan upaya peningkatan tutupan lahan, normalisasi sungai dengan kabupaten/kota dan instansi vertikal baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDASHL) maupun Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Wilayah Sungai Sumatera) sesuai dengan kewenangan.
4. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk membuat program pengadaan jamban untuk masyarakat yang berada di sekitar sungai dan/atau upaya perubahan perilaku tidak buang air besar sembarangan.
5. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk meminimalisir penggunaan pupuk kimia dan meningkatkan pemakaian pupuk organik.
6. Ikut serta dalam upaya penertiban kegiatan penambangan ilegal di sungai dengan melibatkan *stakeholder* terkait.
7. Memaksimalkan upaya preventif untuk pencemaran yang berasal dari pemilik usaha dan/atau kegiatan.

2. Indeks Kualitas Udara

Selain air, udara juga sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Agar udara dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara. Untuk mengetahui kualitas udara ditetapkan indikator kinerja Indeks Kualitas Udara. Penetapan indikator Indeks Kualitas Udara diukur berdasarkan pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan menggunakan parameter NO₂ dan SO₂. Formula perhitungan IKU adalah sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right)$$

Catatan:

Ieu = rata-rata (SO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien SO₂ Ref EU, dan NO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien NO₂ Ref EU).

Baku mutu udara ambien referensi EU untuk NO₂ = 40 µg/m³, SO₂ = 20µg/m³.

Indeks Kualitas udara tahun 2020 ditargetkan sebesar 90 (kategori sangat baik). Penetapan target indeks kualitas udara mengacu pada target tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan Indeks Kualitas udara tahun 2019 serta berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perhitungan indeks kualitas udara. Jika dibandingkan dengan indeks kualitas udara tahun 2019 (89,45) target tahun 2020 ditetapkan lebih tinggi 0,55.

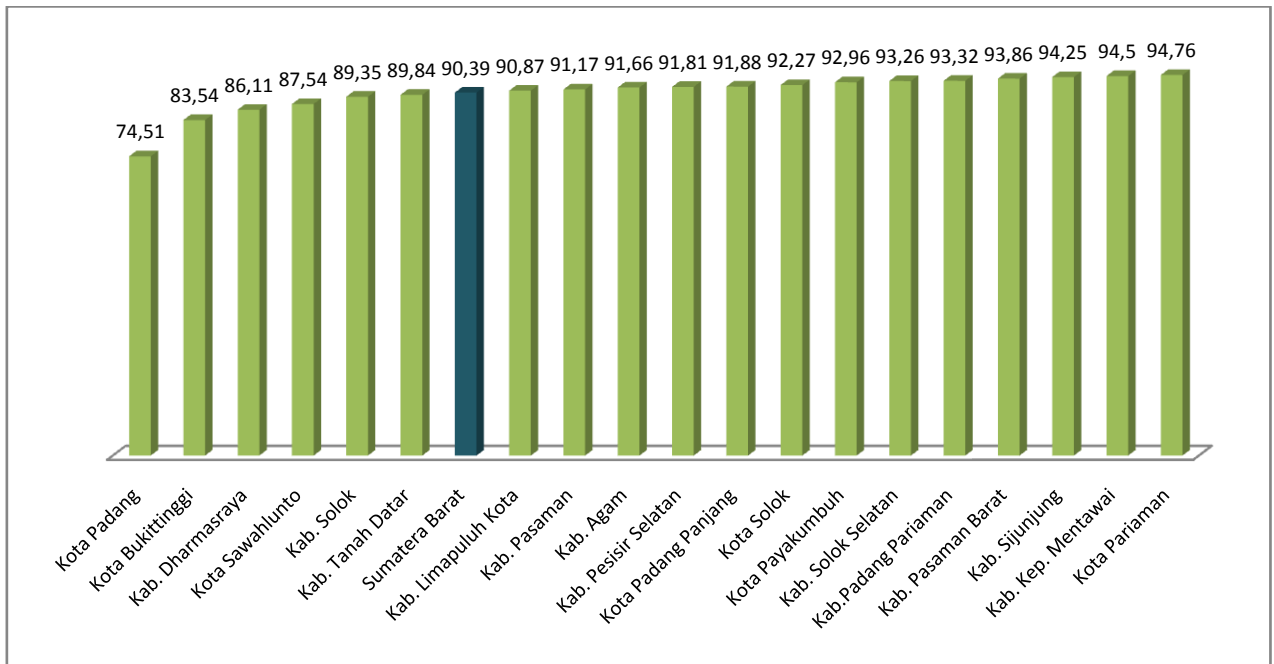
Indeks Kualitas Udara ditargetkan 90, terealisasi 90,39 dengan tingkat capaian 100,43% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja indeks kualitas udara diukur berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* di 19 (sembilan

belas) kabupaten/kota yang masing-masingnya diwakili oleh 4 (empat) lokasi dengan karakteristik aktivitas yang dominan berupa padat transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat), kawasan Industri (bukan industrinya), pemukiman padat penduduk, dan perkantoran. Indeks kualitas udara 90,39 menunjukkan kualitas udara di Provinsi Sumatera Barat termasuk kategori sangat baik. Indeks kualitas udara Provinsi Sumatera Barat merupakan rata-rata dari indeks kualitas udara dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Kualitas udara 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat berada pada kategori Baik dan Sangat Baik. Dari 19 kabupaten/kota, indeks kualitas udara 13 Kabupaten/kota berada di atas indeks kualitas udara Provinsi Sumatera Barat dan 6 Kabupaten/kota berada di bawah kualitas udara Provinsi Sumatera Barat. Kualitas udara sangat baik berada di Kota Pariaman dan kualitas udara yang paling rendah berada di Kota Padang. Indeks kualitas udara Kabupaten/kota disajikan pada grafik 46.

Grafik 46 Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota se Sumatera Barat



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja indeks kualitas udara sebesar 100,43% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kualitas udara tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.75.

Tabel 3. 75 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas udara

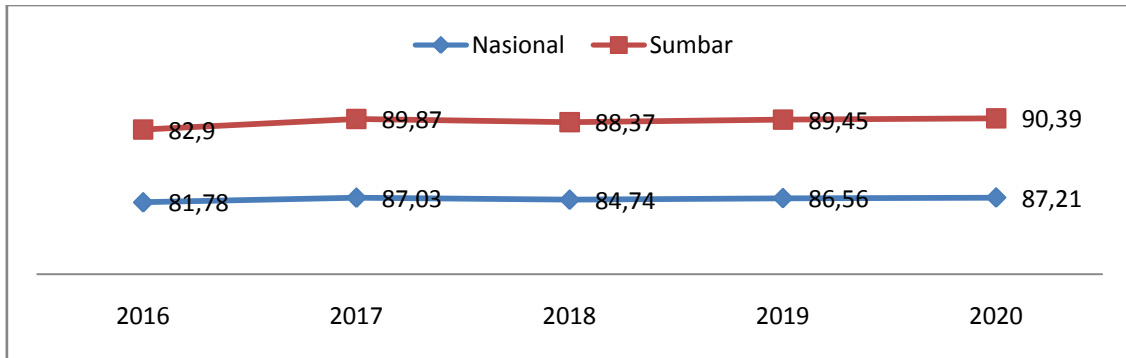
No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks Kualitas Udara	90,39	89,45	100,43	107,71	83,58

Realisasi indeks kualitas udara di tahun 2020 sebesar 90,39 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini >100%. Indeks kualitas udara 90,39 termasuk kategori udara dengan kondisi sangat baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Kualitas udara meningkat sebesar 0,94 di tahun 2020. Berbeda dengan realisasi yang mengalami peningkatan, capaian kinerja indikator ini menunjukkan penurunan di tahun 2020 sebesar 7,28%.

Untuk tahun 2021, Indeks Kualitas Udara ditargetkan 83,58. Indeks kualitas udara tahun 2020 sudah tercapai di atas target tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali penetapan target tahun 2021.

Jika dibandingkan antara capaian IKU provinsi dengan capaian IKU nasional tahun 2020, maka capaian IKU provinsi sudah di atas capaian nasional sebesar 3,65%. Sama halnya dengan tahun 2020, 4 tahun (2016-2020) sebelumnya indeks kualitas udara Provinsi juga berada di atas nasional sebagaimana digambarkan pada grafik 47.

Grafik 47 Indeks Kualitas Udara Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan Indeks Kualitas Udara:

1. Mendorong kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan uji emisi masal yang dilakukan secara periodik bekerjasama dengan pihak swasta dengan melibatkan OPD terkait
2. Melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat salah satunya terkait dengan pengelolaan dan pemantauan sumber emisi.
3. Penambahan jumlah objek Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER) dengan terlebih dahulu mengajukan usulan kepada KLHK.
4. Melakukan upaya penegakan hukum lingkungan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran khususnya yang memiliki sumber emisi.
5. Pembinaan terhadap OPD Kabupaten/Kota oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab dalam melakukan uji emisi.

Faktor Penghambat peningkatan Indeks Kualitas Udara adalah:

1. Belum ada regulasi untuk pembatasan kendaraan bermotor yang boleh beroperasi.

2. Penegakkan hukum terkait pembakaran sampah oleh masyarakat masih belum optimal.
3. Penegakkan hukum lingkungan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan belum berjalan optimal masih sebatas sanksi administratif dengan mempertimbangkan kepentingan investasi.

Kualitas udara Sumatera Barat pada tahun 2020 dengan kategori Sangat Baik. Upaya yang akan dilakukan adalah mempertahankan kondisi kualitas udara dan berupaya untuk meminimalisir penurunan kualitas udara yang akan berpengaruh terhadap IKU dengan cara:

1. Mengusulkan penambahan jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan melalui Program Penilaian Kinerja Lingkungan Perusahaan (PROPER) yang merupakan program nasional.
2. Mengusulkan penambahan jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan melalui Program Penilaian Kinerja Lingkungan Perusahaan Daerah (PROPER Daerah) sesuai dengan anggaran yang tersedia.
3. Mendorong kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk membuat program serupa PROPER Daerah.
4. Mendorong kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang memiliki sumber emisi dan melakukan upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
5. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk membuat taman kota, Ruang Terbuka Hijau, Taman Kehati dan *arboretum* dengan tanaman yang dapat menyerap NO₂ dan SO₂.

6. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk menyediakan transportasi massal yang aman dan nyaman.
7. Penerapan penegakan hukum lingkungan bagi pelanggaran oleh pemilik usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan memberikan rekomendasi apabila izin lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara adalah Rp. 5.131.097.174,-. Anggaran ini tersebar pada 6 program yaitu program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional (2 kegiatan), program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (10 kegiatan), program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (4 kegiatan), program tata lingkungan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam (6 kegiatan), program pentaatan dan penegakan hukum lingkungan (2 kegiatan), program pengembangan kinerja pengolahan persampahan (6 kegiatan). Pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 5.131.097.174,-, terealisasi sebesar Rp. 4.832.864.070,- atau 94,19%. Artinya, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 298.233.104,- (5,81%). Efisiensi tertinggi berasal dari pelaksanaan program tata lingkungan, perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam yang realisasi anggarannya < 90% yaitu sebesar 77,41%. Jika dibandingkan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara sebesar 98,29% dengan realisasi anggaran sebesar 94,19% diperoleh tingkat efisiensi 4,1%.




Sasaran Strategis 5.2.2 **Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan**

Kualitas hutan dan lahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Kualitas hutan dan lahan juga akan mempengaruhi kualitas air dan kualitas udara. Terhadap kualitas air, kualitas hutan dan lahan dapat mengurangi potensi erosi yang pada akhirnya akan mengurangi kadar TSS (Total Suspended Solid) di badan air. Untuk kualitas udara, fungsi dari vegetasi yang ada akan berkontribusi menyerap dan menangkap polutan tertentu di udara ambien. Berdasarkan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas hutan dan lahan sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja indeks tutupan hutan (ITH). Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, terminologi ITH berubah menjadi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan perbandingan antara luas tutupan hutan (hutan primer dan hutan sekunder) di seluruh wilayah provinsi dengan luas wilayah provinsi. Pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merubah nomenklatur IKTL menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan menambahkan instrumen rehabilitasi hutan dan lahan.

Indeks Kualitas Lahan tahun 2020 ditargetkan sebesar 68,4 (kriteria sedang). Penetapan target indeks kualitas lahan mengacu pada target tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan Indeks Kualitas lahan tahun 2019 serta berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perhitungan indeks kualitas lahan. Jika dibandingkan dengan indeks kualitas lahan tahun 2019 (67,59) target tahun 2020 ditetapkan lebih tinggi 0,81. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas hutan dan lahan tergambar pada tabel 3.76.

Tabel 3. 76 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.2.2

	Target	Realisasi	Capaian
 Indeks Tutupan Hutan/Indeks Kualitas Tutupan Lahan	68,4	66,31	96,94

Indeks Kualitas Lahan target 68,4 terealisasi 66,31 dengan tingkat capaian 96,94% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja indeks kualitas lahan diukur berdasarkan data dan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{IKL} &= 100 - \{(84,4 - (\text{LTL} - \text{DKK} \times 100) \times 50/54,3) \\
 &= 100 - \{(84,4 - (0,48 - 0 \times 100) \times 50/54,3) \\
 &= 66,31
 \end{aligned}$$

Ket : LTL/ITL = Luas Tutupan Lahan = 0,48

DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal = 0

$$\begin{aligned}
 \text{LTL} &= \frac{\text{LTH} + ((\text{LBKH} + \text{LBFL} + \text{KR} + \text{RTH} + \text{Kehati} + \text{RHL 2010}) \times 0,6)}{\text{LWP}} \\
 &= \frac{1.883.769,75 + ((174.474,89 + 38.817,76 + 112,60 + 6.476 + 28,5 + 86) \times 0,6)}{4.224.728,25} = 0,48
 \end{aligned}$$

Keterangan:

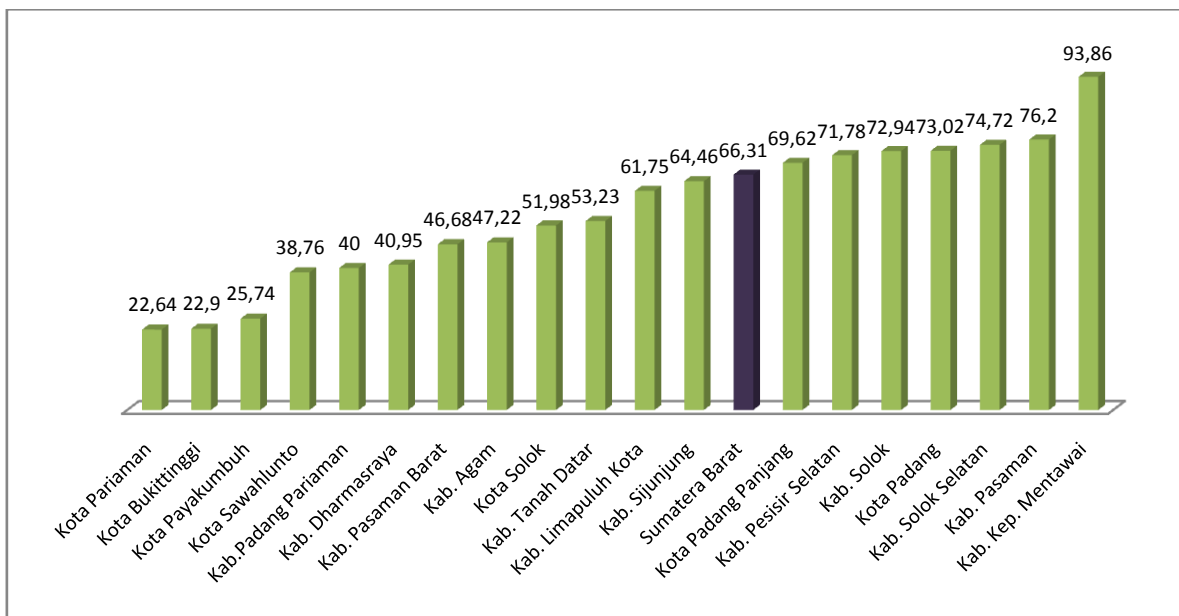
Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat (LWP)	4.224.728,25
Luas Hutan (LTH)	1.883.769,75
Luas Belukar Dalam Kawasan (LBKH)	174.474,89
Luas Belukar Fungsi Lindung (LBFL)	38.817,76
Kebun Raya (KR)	112,60
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.476,59
Taman Kehati (kehati)	28,50
RHL 2010 (RTL)	86,00

Sumber: 1) Luas hutan dan belukar dari Direktorat PKLAT Ditjen PPKL KLHK, 2020

2) Luas Kebun Raya, RTH, dan Kehati dari kab/kota di Provinsi Sumatera Barat, 2020

Dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, 12 Kabupaten/kota mempunyai indeks kualitas lahan di bawah indeks kualitas lahan Provinsi dan sisanya 7 Kabupaten/kota mempunyai indeks kualitas lahan di atas indeks kualitas lahan Provinsi. Berdasarkan kriterianya 8 kabupaten/kota memiliki indeks kualitas lahan yang buruk, 5 kabupaten/kota dan Provinsi termasuk kriteria sedang, 5 kabupaten/kota kriteria Baik dan 1 kabupaten/Kota termasuk kriteria sangat baik. Kualitas lahan sangat baik berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Indeks kualitas Lahan Kabupaten/kota disajikan pada grafik 48.

Grafik 48 Indeks Kualitas Lahan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja indeks kualitas lahan sebesar 96,94 diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kualitas lahan tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.77.

Tabel 3. 77 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas lahan

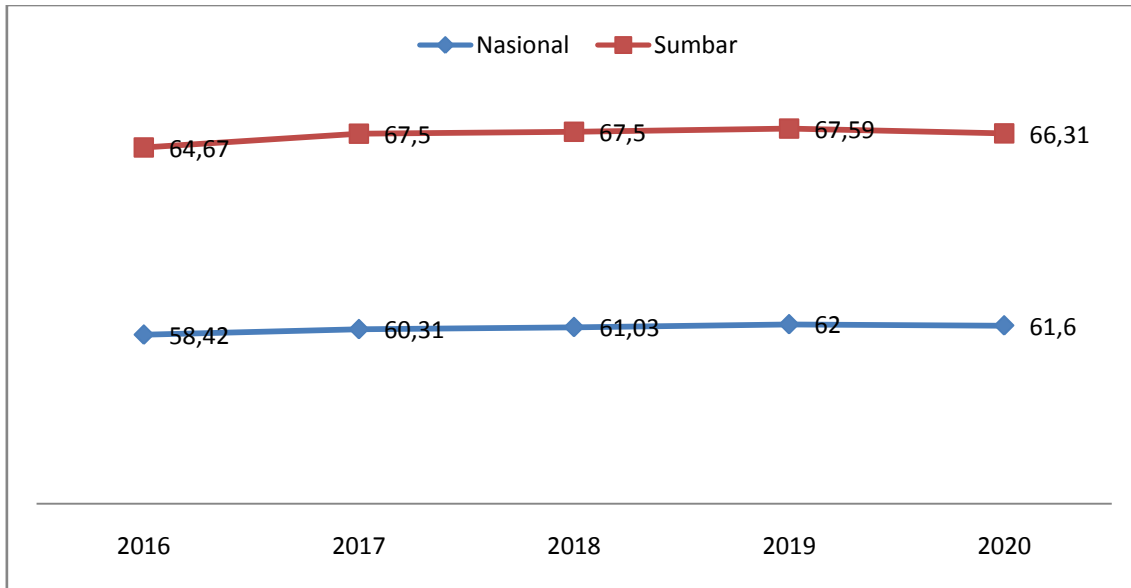
No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks Kualitas Lahan	66,31	67,59	96,94	97,22	61,41

Indek kualitas lahan di tahun 2020 adalah 66,31. Kondisi ini menunjukkan indeks kualitas lahan belum mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini < 100%. Dengan Indeks kualitas lahan 66,31 berarti kualitas lahan di Sumatera Barat termasuk kategori Sedang. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks kualitas lahan mengalami penurunan 1,28 di tahun 2020. Begitupun dengan capaian kinerja indikator ini yang juga mengalami penurunan di tahun 2020.

Untuk tahun 2021, Indeks Kualitas lahan ditargetkan 61,41. Indeks kualitas lahan tahun 2020 sudah tercapai di atas target tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali penetapan target tahun 2021.

Dalam kurun waktu 4 tahun (2016-2019) indeks kualitas lahan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Akan tetapi di tahun 2020, kondisinya mengalami penurunan. Hal ini juga sama dengan kondisi perkembangan indeks kualitas lahan di tingkat nasional. Jika dibandingkan dengan Nasional, indeks kualitas lahan Provinsi Sumatera Barat masih tercapai di atas indeks kualitas nasional. Indeks kualitas lahan Provinsi dan Nasional disajikan pada grafik 49.

Grafik 49 Indeks Kualitas Lahan Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan antara lain:

- a. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memfasilitasi pemulihan Lahan Akses Terbuka oleh KLHK di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman pada lahan seluas 3,9 Ha dengan konsep ekowisata yang meliputi wisata air dan arboretum (penanaman pohon untuk tujuan penelitian atau pendidikan) dan rencana pengembangannya pada Nagari Lubuk Alung untuk Tahun 2021.
- b. Melalui Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada tahun 2020 seluas 180 Ha dan Tahun 2019 seluas 383 Ha serta pemeliharaan pasca penanaman.
- c. Melakukan penegakan hukum bagi pembalok liar.

Peningkatan kualitas lahan di Sumatera Barat terkendala oleh banyaknya alih fungsi lahan yang cepat merupakan faktor dominan dalam penurunan IKL. Alih fungsi lahan terjadi baik pada kawasan hutan maupun APL serta pada lahan

yang telah dilakukan rehabilitasi. Alih fungsi lahan sejalan dengan kebutuhan untuk infrastruktur, perumahan, perladangan dan pertanian serta pemanfaatan hasil hutan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab terhadap alih fungsi lahan yang berada di Kawasan Hutan adalah Dinas Kehutanan, sedangkan untuk yang di APL adalah OPD yang menangani pertanian, perkebunan, pekerjaan umum dan pemukiman.

Upaya untuk peningkatan Indeks Kualitas Lahan di masa yang akan datang antara lain:

- a. Melakukan inventarisasi lahan akses terbuka dan upaya untuk meminimalisir kerusakan lahan dengan melibatkan *stakeholder* guna meminimalisir kegiatan penambangan tanpa izin (PETI). Kegiatan PETI baik di kawasan hutan maupun APL dapat mengurangi tutupan lahan.
- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM agar kegiatan penambangan segera melakukan reklamasi pada lahan yang sudah tidak dilakukan penambangan.
- c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengusulkan rencana RHL baik pada APL maupun kawasan hutan.
- d. Membuat *pilot project* pemulihan lahan akses terbuka.
- e. Memfasilitasi kepada pemilik usaha dan/atau kegiatan agar mengarahkan CSR untuk melakukan penanaman pada lokasi lahan akses terbuka yang telah dipulihkan oleh KLHK di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- f. Memfasilitasi dan mendorong kabupaten/kota untuk pembuatan arboretum, taman Kehati, RTH.
- g. Memfasilitasi pemulihan lahan akses terbuka yang akan dilakukan oleh peraih kalpataru di Kabupaten Sijunjung.
- h. Melakukan upaya penegakan hukum bagi pembalakan liar.

- i. Mendorong kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dan melakukan upaya hukum apabila terdapat pelanggaran.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas hutan dan lahan adalah Rp. 10.789.765.744,-. Anggaran ini tersebar pada 7 program yaitu program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam (27 kegiatan), program pengendalian kebakaran hutan (8 kegiatan), program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam (11 kegiatan), program pemanfaatan potensi sumber daya hutan (30 kegiatan), program perhutanan sosial dan kemitraan (30 kegiatan), program pemantapan kawasan hutan (11 kegiatan), program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (3 kegiatan). Pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas hutan dan lahan.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 10.789.765.744,- terealisasi sebesar Rp. 10.532.559.197,- atau 97,62%. Artinya, terdapat efisiensi Rp. 257.206.547,- (99,02). Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas hutan dan lahan sebesar 96,94% lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran sebesar 97,62%.



Sasaran Strategis 5.2.3

Menurunnya resiko bencana

Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu wilayah yang memiliki potensi risiko bencana yang tinggi di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Sumatera Barat yang terletak di hadapan jalur pertemuan dua lempeng bumi dan juga segmen patahan bumi. Adapun bencana yang menjadi

tanggungjawab intervensi pemerintah provinsi Sumatera Barat adalah cuaca ekstrim, kekeringan, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, tsunami, banjir dan gempa bumi. Bencana yang terjadi akan berdampak kerusakan di semua bidang seperti bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis menurunkannya risiko bencana.

Dalam hal penanggulangan bencana, sasaran yang ditetapkan termasuk tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana guna diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana.

Lingkup kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat adalah seluruh wilayah Sumatera Barat, namun dengan adanya keterbatasan kewenangan provinsi maka batasan untuk penanganan ke daerah bencana dilakukan ketika bencana memapar lebih dari 1 kabupaten/kota dalam 1 kali kejadian dan tingkat risiko minimal bencana yang berada pada tingkat risiko sedang berdasarkan peta risiko bencana Provinsi Sumatera Barat yang diterbitkan oleh BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Untuk tahun 2020, persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 75%. Penetapan target sebesar 75% mengacu pada target tahun ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Penetapan target ini didasarkan juga pada kewenangan penanganan bencana tingkat provinsi. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 (74%), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 1%. Pencapaian sasaran strategis menurunkannya risiko bencana tergambar pada tabel 3.78.

Tabel 3. 78 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2.3

	Target	Realisasi	Capaian
 <p>Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana</p>	75	75	100

Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 75%, terealisasi 75% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana diukur berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana} = \frac{468 \text{ kejadian}}{625 \text{ kejadian}} \times 100\% = 75\%$$

Ket: Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana = 468 kejadian
 Jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat= 625 kejadian

Uraian bencana yang terjadi selama tahun 2020 di Sumatera Barat diuraikan pada tabel 3.79.

Tabel 3. 79 Jenis Bencana yang terjadi di tahun 2020 di Sumatera Barat

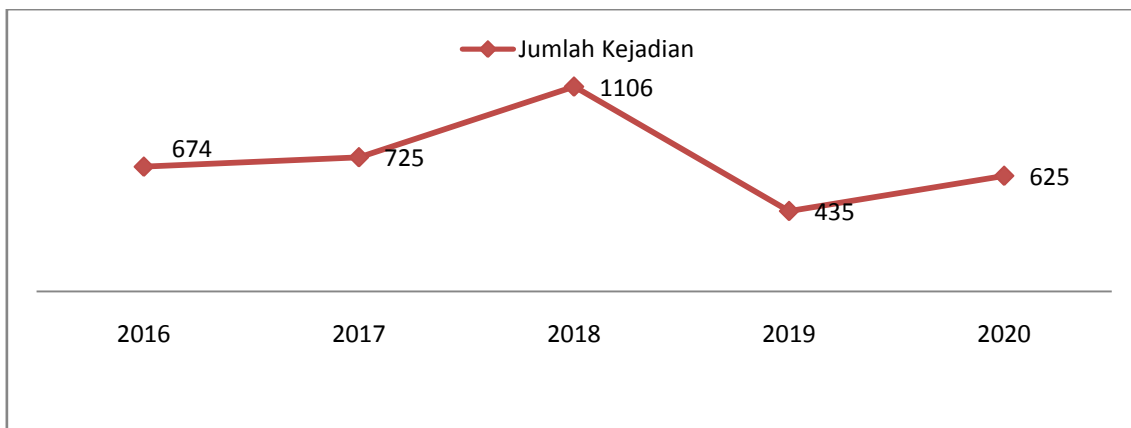
No	Jenis Bencana	Jumlah
1	Abrasi Pantai	4
2	Abrasi Sungai	1
3	Angin Kencang	323
4	Banjir	90
5	Banjir Bandang	17
6	Bendungan jebol	1
7	Jalan ambas	1
8	Jembatan Roboh	1
9	Kebakaran	3

No	Jenis Bencana	Jumlah
10	Kebakaran Hutan dan Lahan	14
11	Kebakaran Rumah	1
12	Longsor	142
13	Orang Hanyut	2
14	Orang Hilang	12
15	Orang Tenggelam	10
16	Pergerakan Tanah	2
17	Tersambar Petir	1
Total		625

Sumber data: BPBD Prov Sumbar

Selama tahun 2020, di Sumatera Barat terjadi 17 jenis bencana. Bencana yang sering terjadi adalah angin kencang (323 kejadian), longsor (142 kejadian) dan banjir (90 kejadian). Untuk perkembangan kejadian bencana yang terjadi di Sumatera Barat tahun 2016-2020 disajikan pada grafik 50.

Grafik 50 Kejadian Bencana di Sumatera Barat Tahun 2016-2020



Sumber data: BPBD Prov Sumbar

Capaian indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana sebesar 100% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.80.

Tabel 3. 80 Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana	75	74	100	100	75

Realisasi indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana tahun 2019-2020 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan sehingga capaian kerjanya 100%. Secara absolut jumlah kejadian bencana yang terjadi di tahun 2020 lebih banyak daripada kejadian bencana yang terjadi di tahun 2019 dengan selisih sebanyak 190 kejadian

Untuk tahun 2021, persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 75%. Target ini sama dengan target yang ditetapkan di tahun 2020. dengan mempertimbangkan tren realisasi dan capaian kinerja indikator ini, target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Dalam hal penanggulangan bencana pada kondisi tanggap darurat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 telah mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah masyarakat dan kelembagaan yang siap menghadapi bencana. Sampai dengan tahun 2020, telah terbentuk 615 kelompok masyarakat tangguh bencana (55% dari total lokasi rawan bencana) yang tersebar pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Meningkatkan jumlah infrastruktur (peralatan dan sistem peringatan dini bencana) yang siap dan berfungsi. Sampai dengan tahun 2020, sebanyak 55 peralatan dapat difungsikan

3. Memberikan bantuan personil, logistik dan peralatan ke lokasi bencana
4. Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan terkait dengan lokasi kejadian, dampak, jumlah korban dan kerugian serta tindakan penanggulangan bencana yang dilakukan.
5. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan bencana antara lain:

1. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami teknis penanggulangan bencana.
2. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dirasakan langsung oleh masyarakat,
3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana yang masih belum memadai.
4. Pengalihan anggaran untuk penanganan covid 19 yang berdampak pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi bencana.
5. Keterbatasan SDM relawan penanggulangan bencana
6. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana.

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan bencana di masa yang akan datang antara lain:

1. Peningkatan kesiapsiagaan aparatur dalam menghadapi bencana
2. Pemeliharaan infrastruktur (sarana dan prasarana) pendukung penanggulangan bencana
3. Perbaikan dan perawatan peralatan penunjang penanggulangan bencana.

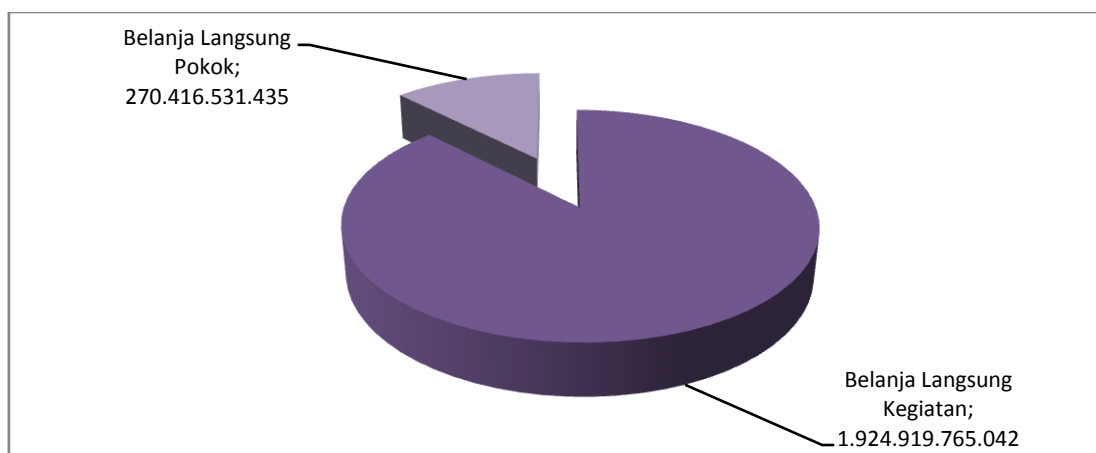
Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis menurunnya risiko bencana adalah Rp. 12.122.062.162,-. Anggaran ini tersebar pada 5 program yaitu program peningkatan mitigasi bencana (4 kegiatan), program peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana (7 kegiatan), program pemulihan daerah pasca bencana (4 kegiatan), program peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan (2 kegiatan), program peningkatan penanganan tanggap darurat bencana (2 kegiatan). Pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis menurunnya risiko bencana.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 12.122.062.162,- terealisasi sebesar Rp. 11.582.186.418,- atau 95,55%. Artinya, terdapat efisiensi sebesar Rp. 539.875.744,- (4,45%). Jika dibandingkan capaian indikator kinerja sasaran strategis menurunnya risiko bencana sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 95,55% diperoleh tingkat efisiensi 4,45%.

3.4. REALISASI KEUANGAN

Anggaran belanja daerah menurut urusan dalam Anggaran Belanja Pendapatan Daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.942.806.786.976,- yang terdiri dari anggaran belanja langsung kegiatan Rp. 2.651.062.865.669,- (90,09%) dan belanja langsung pokok Rp. 291.743.921.307,- (9,91%). Untuk penanganan Covid 19 di tahun 2020, terjadi *refocusing* anggaran sebesar Rp. Rp.541.252.747.542,-. Selama tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan perubahan anggaran. Anggaran belanja daerah menurut urusan dalam Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Perubahan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.195.336.296.477,- yang terbagi untuk belanja langsung kegiatan dan belanja langsung pokok. Rincian belanja tersebut disajikan pada grafik 51.

Grafik 51 Rincian Belanja Langsung Tahun 2020



Sumber data: Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan grafik 51, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari Rp. 2.195.336.296.477,- anggaran belanja langsung urusan dalam APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, sebesar 87,68% (Rp.1.924.919.765.042,-) digunakan untuk pelaksanaan 204 program yang mendukung pencapaian 18 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi penurunan jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 11 program di tahun 2020. Anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung program/kegiatan yang mendukung pencapaian 18 sasaran strategis tahun 2020 diuraikan pada tabel 3.81.

Tabel 3. 81 Anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung program/kegiatan yang mendukung pencapaian 18 sasaran strategis tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	18.060.569.901	16.806.916.214	93,06
2	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	16.242.888.597	14.078.781.767	86,68
3	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan akuntabel	31.656.728.055	30.039.824.263	94,89

No	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
4	Meningkatnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	28.008.452.326	25.669.588.414	91,65
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	89.300.642.033	77.934.864.869	87,27
6	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	622.506.278.363	596.726.912.756	95,86
7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	532.430.769.927	457.992.819.458	86,02
8	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat	75.133.221.029	67.343.486.581	89,63
9	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	2.329.079.135	2.313.251.679	99,32
10	Meningkatnya Nilai Ekspor	575.288.131	559.297.832	97,22
11	Menurunnya tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	73.068.083.914	66.013.906.542	90,35
12	Meningkatnya Konektivitas dan aksesibilitas Wilayah	338.235.383.051	319.088.369.772	94,34
13	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur ECTL	1.958.724.957	1.950.737.357	99,59
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	61.649.161.107	60.069.024.234	97,44
15	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.721.569.436	5.611.003.157	98,07
16	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.131.097.174	4.832.864.070	94,19
17	Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan	10.789.765.744	10.532.559.197	97,62

No	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
18	Menurunnya Risiko Bencana	12.122.062.162	11.582.186.418	95,55
TOTAL		1.924.919.765.042	1.769.146.394.580	91,91

2. Dalam pencapaian 18 sasaran strategis tersebut, anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp. 1.769.146.394.580,- atau 91,91% dari anggaran yang ditetapkan. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 155.773.370.462,- atau 8,09%. Sementara itu, rata-rata capaian kinerja 18 sasaran strategis adalah 81,08%. Jika dibandingkan, persentase capaian realisasi anggaran 91,09% lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja 18 sasaran strategis.
3. Sebesar 12,32% dari total anggaran belanja langsung atau Rp. 270.416.531.435,- digunakan untuk melaksanakan 5 program yang mendukung pemenuhan kebutuhan internal organisasi yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.



BAB IV PENUTUP



BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan dari bab 1 sampai bab 3, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 menggambarkan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Kinerja ini didasarkan pada ketercapaian 9 indikator kinerja yang mengukur 7 tujuan dan 23 indikator kinerja yang mengukur 18 sasaran yang ditetapkan pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
2. Rata-rata capaian 18 sasaran strategis berdasarkan realisasi 23 indikator kinerja adalah 81,08% termasuk kategori keberhasilan "Baik". Rincian pencapaian 18 sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. 6 sasaran strategis (33,33%) mencapai keberhasilan dengan kategori memuaskan, 10 sasaran strategis (55,55%) mencapai keberhasilan dengan kategori *sangat baik*, 1 sasaran strategis (5,56%) mencapai keberhasilan dengan kategori *cukup* dan 1 sasaran strategis (5,56%) mencapai keberhasilan dengan kategori *kurang baik*.

- b. Sasaran strategis dengan pencapaian tertinggi adalah sasaran meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah dengan capaian sebesar 115,79%, dan sasaran strategis terendah adalah sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi daerah dengan capaian sebesar - 227,42%. Hal ini bertolak belakang dari realisasi investasi daerah di tahun 2019 yang mencapai 342,29%.
- c. Dari 23 indikator kinerja yang mengukur sasaran ada dua indikator yang realisasinya menggunakan realisasi tahun sebelumnya. Indikator tersebut adalah indeks kerukunan tahun 2020 dan nilai evaluasi SAKIP tahun 2020.
- d. Untuk indeks kerukunan tidak dilakukan penilaian di tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi covid 19. Sedangkan nilai evaluasi SAKIP tahun 2020 belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4.2. LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG

Pemerintah Provinsi selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja setiap tahunnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan dan memperbaiki implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara terus menerus dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan SAKIP menjadi salah satu alat yang jika diterapkan secara tepat akan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas anggaran. Sehingga anggaran yang digunakan benar-benar untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang antara lain:

1. Memanfaatkan Pohon Kinerja yang telah dirumuskan untuk meningkatkan kinerja yang selaras dan saling terkait.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sehingga program/kegiatan yang dilaksanakan terkait langsung dengan kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara berjenjang. Sehingga berdampak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Menjadikan hambatan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target di tahun 2020 sebagai dasar merumuskan strategi pencapaian kinerja di masa yang akan datang.
4. Menyusun rencana aksi yang lebih akurat untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
5. Menggunakan aplikasi e-kinerja untuk menilai kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



LAMPIRAN



**HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA					
I MISI 1					
Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"					
1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama	1.1 Indeks Kerukunan	68,8	64,4	93,60
1.1	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	1.1.1 Indeks Kerukunan	68,8	64,4	93,60
2	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	1.2 Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional	47	41	87,23
2.1	Meningkatnya Pelestarian nilai-nilai Budaya	2.1.1 Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional	47	41	87,23
II MISI 2					
Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional					
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	71	66,79	94,07
1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	1.1.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00
		1.1.2 Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)	BB (75,89)	97,29
1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	1.2.1 Indeks Profesionalitas ASN	54	53,75	99,54
		1.2.2 Indeks e-Government	2,9	3,1	106,90
1.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.3.1 Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	84,80	90,14	106,30

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
III	MISI 3				
	Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas. sehat. beriman. berkarakter. dan berkualitas tinggi				
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,13	72,39	100,36
	1.1 Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat	1.1.1 Harapan lama sekolah 1.1.2 Rata-rata lama sekolah	14,86 8,85	14,01 8,92	94,28 100,79
	1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1.2.1 Angka harapan hidup	69,38	69,31	99,90
IV	MISI 4				
	Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh. produktif. dan berdaya saing regional dan global. dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah				
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 1.2 Indeks Gini	5,88 0,328	-1,6 0,301	-27,21 108,23
	1.1 Meningkatkan Jumlah Pendapatan Masyarakat	1.1.1 Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	48,19	44,03	91,37
	1.2 Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Daerah	1.2.1 Persentase Pertumbuhan investasi	3,83	-8,71	-227,42
	1.3 Meningkatkan Nilai Ekspor	1.3.1 Nilai Ekspor (Juta USD)	1365,81	1531,84	112,16
	1.4 Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	1.4.1 Tingkat Kemiskinan 1.4.2 Tingkat Pengangguran	5,83 5,82	6,56 6,88	87,48 81,79
V	MISI 5				
	Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				
1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap 1,2 Rasio elektrifikasi	38 99,30	44 99,33	115,79 100,03
	1.1 Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah	1.1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	38	44	115,79
	1.2 Meningkatkan Pemanfaatan Infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	1.2.1 Rasio elektrifikasi	99,30	99,33	100,03
	1.3 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	1.3.1 Persentase Rata-rata Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	65,37	64,20	98,21

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	1.4.1 Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	54	55,57	102,91
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2,1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,76	79,33	102,02
2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.1.1 Indeks Kualitas Air	78	75	96,15
		2.1.2 Indeks Kualitas Udara	90	90,39	100,43
2.2	Meningkatnya Kualitas Hutan & Lahan	2.2.1 Indeks Tutupan Hutan/Indeks Kualitas Tutupan Lahan	68,4	66,31	96,94
2.3	Menurunnya resiko bencana	2.3.1 Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	75	75	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja					81,08

KEPALA BIRO ORGANISASI,



AHMAD ZAKRI, S.sos, M.si
Pembina Tk I
NIP. 197305231993031003



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA				
I	MISI 1			
	Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"			
1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama	1.1 Indeks Kerukunan	69	Satpol PP, Badan Kesbangpol
	1.1 Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	1.1.1 Indeks Kerukunan	69	Satpol PP, Badan Kesbangpol
2	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	1.2 Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional	47	Dinas Kebudayaan
	2.1 Meningkatnya Pelestarian nilai-nilai Budaya	2.1.1 Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional	47	Dinas Kebudayaan
II	MISI 2			
	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional			
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	71	OPD terkait 8 Area Perubahan
	1.1 Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	1.1.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	B. Keuda, Biro AP2BMD
		1.1.2 Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)	Biro Organisasi
	1.2 Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	1.2.1 Indeks Profesionalitas ASN	54	Badan Kepegawaian Daerah
		1.2.2 Indeks e-Government	3	Dinas KOMINFO
	1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.3.1 Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	85	Biro Organisasi

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
III	MISI 3 Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas. sehat. beriman. berkarakter. dan berkualitas tinggi			
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72	Lintas Perangkat Daerah
	1.1 Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat	1.1.1 Harapan lama sekolah 1.1.2 Rata-rata lama sekolah	15 9	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
	1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1.2.1 Angka harapan hidup	69	Dinas Kesehatan, RSUD
IV	MISI 4 Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh. produktif. dan berdaya saing regional dan global. dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah			
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 1.2 Indeks Gini	6 0	
	1.1 Meningkatkan Jumlah Pendapatan Masyarakat	1.1.1 Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	48	Lintas Perangkat Daerah
	1.2 Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Daerah	1.2.1 Persentase Pertumbuhan investasi	4	Dinas Penanaman Modal & PTSP
	1.3 Meningkatkan Nilai Ekspor	1.3.1 Nilai Ekspor (Juta USD)	1,366	Disperindag
	1.4 Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	1.4.1 Tingkat Kemiskinan 1.4.2 Tingkat Pengangguran	6 6	Lintas Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah
V	MISI 5 Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			
1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap 1,2 Rasio elektrifikasi	38 99	
	1.1 Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah	1.1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.2 Meningkatkan Pemanfaatan Infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	1.2.1 Rasio elektrifikasi	99	Dinas ESDM

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
	1.3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	1.3.1 Persentase Rata-rata Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	65 Dinas PSDA
	1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	1.4.1 Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	54 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2,1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78	
	2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.1.1 Indeks Kualitas Air 2.1.2 Indeks Kualitas Udara	78 78 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
	2.2	Meningkatnya Kualitas Hutan & Lahan	2.2.1 Indeks Tutupan Hutan/Indeks Kualitas Tutupan Lahan	68 Dinas Kehutanan
	2.3	Menurunnya resiko bencana	2.3.1 Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	75 BPBD

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
A	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	18.060.569.901	
1	Peningkatan Perlindungan Masyarakat	104.138.829	Satpol PP dan Damkar
2	Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	2.291.982.565	
3	Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	51.461.300	
4	Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	1.754.341.918	
5	Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur	56.054.000	
6	Pemetaan daerah rawan kebakaran	35.314.000	
7	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	1.437.727.580	B. Kesbangpol
8	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	43.561.600	
9	Pendidikan Politik Masyarakat	683.000.000	
10	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	260.129.675	
11	Pencegahan, Penangan Dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	42.300.700	
12	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	2.469.467.232	Biro Bina Mental
13	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamatan, dan Pengembangan	8.672.658.481	
14	Pengembangan lembaga-lembaga Sosial	158.432.021	
B	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	16.242.888.597	
1	Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.799.017.200	D. Kebudayaan
2	Pemberdayaan Dan Penguatan Eksistensi Lembaga-lembaga Adat, Seni Dan	150.000.000	
3	Pembinaan Dan Pengembangan Pendidikan Budaya	511.328.000	
4	Pengembangan Dan Penguatan Nilai Budaya	12.096.739.333	
5	Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya	685.804.064	
C	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan akuntabel	31.656.728.055	
1	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	47.779.000	Inspektorat Provinsi
2	Peningkatan Fungsi Pengawasan Dan Penegakan Hukum	7.101.631.403	
3	Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	734.702.974	Biro AP2BMD
4	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.094.786.289	D. PUPR, D.Nakertrans, B.Umum
5	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5.135.895.691	B.Keuda
6	Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	417.237.815	
7	Peningkatan Pendapatan Daerah	5.591.976.645	

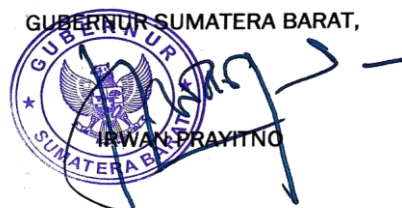
NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
8	Kerjasama Pembangunan	553.694.696	Biro Kerjasama, Pemb & Rantau
9	Peningkatan Manajemen Pemerintah Daerah	361.223.940	
10	Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan	244.725.000	
11	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dan Ketatalaksanaan Pemda	1.119.696.338	Biro AP2BMD
12	Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah	107.395.459	Biro Pemerintahan
13	Perencanaan Pembangunan Daerah	1.278.368.923	Bappeda
14	Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan	210.624.628	
15	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.552.773.808	
16	Pengelolaan Otonomi Daerah	904.527.862	Biro Pemerintahan
17	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Dan SKPD Provinsi Sumatera Barat	128.515.800	Biro Organisasi
18	Manajemen Perubahan	71.171.784	
D	Meningkatnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	28.008.452.326	
1	Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	5.430.336.770	BKD, B. Organisasi
2	Pendidikan Kedinasan	1.999.120.460	BPSDM
3	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	486.716.890	
4	Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah	535.226.488	B. Organisasi
5	Kerjasama Informasi Dan Media Massa	508.552.300	D. Kominfo
6	Informasi dan Komunikasi Publik	2.390.488.552	
7	Pengelolaan E-Government Pemerintahan Daerah	9.685.283.478	
8	Peningkatan penyediaan data statistik sektoral	314.783.500	
9	Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandiaan	325.853.400	
10	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3.967.050.739	B. Humas
11	Pembangunan Materi Hukum	716.222.200	B. Hukum
12	Sarana Dan Informasi Hukum	49.203.250	B. Hukum
13	Peningkatan Penataan Peraturan	523.898.500	B. Hukum
14	Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	216.220.270	Biro Organisasi
15	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	859.495.529	Biro Perekonomian
E	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	89.300.642.033	
1	Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	3.019.342.111	Biro Umum
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	61.568.641	Biro Organisasi
3	Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum	481.788.200	Biro Hukum
4	Peningkatan Pelayanan Kedinasan	14.854.915.932	Biro Umum, B. Penghubung
5	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	66.651.739.176	Set. DPRD
6	Pengembangan Data Dan Informasi	78.072.400	B. Penghubung
7	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	221.744.600	
8	Peningkatan Pelayanan Publik	1.361.860.000	B. Penghubung, B. Keuda
9	Penguatan Inovasi Daerah	899.609.900	Balitbang
10	Penelitian Dan Pengembangan IPTEK Untuk Menunjang Pemerintahan Daerah	935.373.023	
11	Penataan Administrasi Kependudukan	509.843.800	DPPKBKPS
12	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	141.357.900	D. Kearsipan Perpustakaan
13	Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem	83.426.350	
F	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	622.506.278.363	
1	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	105.000.000	D. Pendidikan
2	Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus	11.020.212.700	
3	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan	6.623.776.750	
4	Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	155.662.089.180	
5	Peningkatan Mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Menengah	448.487.591.631	
6	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	607.608.102	D. Kearsipan & Perpustakaan
G	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	532.430.769.927	
1	Obat Dan Pembekalan Kesehatan	5.072.754.473	Dinkes, 4 RSUD
2	Upaya Kesehatan Masyarakat	10.060.182.749	
3	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	3.262.814.007	
4	Perbaikan Gizi Masyarakat	5.027.375.600	
5	Pengembangan Lingkungan Sehat	895.789.550	
6	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit (Menular/Tidak Menular)	4.097.502.300	
7	Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS.	183.082.094.043	
8	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	8.698.200	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS.	229.930.000	Dinkes, 4 RSUD
10	Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	461.147.500	
11	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	55.813.429.531	
12	Peningkatan Pelayanan BLUD	251.469.930.735	
13	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	436.115.078	D. PP & PA
14	Peningkatan Kualitas Keluarga	23.067.250	
15	Peningkatan Sistem Data Gender Dan Anak	35.839.500	
16	Peningkatan Perlindungan Perempuan	257.596.393	
17	Peningkatan Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak	120.060.145	
18	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	397.985.358	
19	Diversifikasi Pangan	825.664.200	D. Pangan
20	Peningkatan Ketahanan Pangan	4.977.871.170	
21	Keluarga Berencana	103.992.950	DPPKBKPS
22	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	25.020.000	
23	Peningkatan Pengendalian Penduduk	81.890.739	
24	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	4.262.351.215	Dispora
25	Pengembangan Organisasi Pemuda Dan Manajemen Olahraga	1.180.718.280	
26	Peningkatan Penyadaran Kepemudaan	127.665.661	
27	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	93.283.300	
H	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat	75.133.221.029	
1	Pengamanan Sumber Daya Hewani	2.257.226.925	Disnak Keswan
2	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil	636.288.700	
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana	921.040.752	
4	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	75.000.000	
5	Peningkatan Produksi Dan Produktifitas	8.411.543.000	
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM	261.974.000	
7	Peningkatan Perlindungan Konsumen	291.838.475	D. Perindag
8	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	509.718.900	
9	Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	649.046.471	
10	Peningkatan Kualitas Produk Industri	981.377.150	
11	Peningkatan SDM Pertanian	700.000.000	DispertaHorbun
12	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Pertanian	33.486.000	
13	Pemberdayaan Penyuluhan	100.000.000	
14	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil	368.726.763	
15	Peningkatan Sarana dan Prasarana	6.244.402.248	
16	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	4.070.265.863	
17	Peningkatan Produksi Dan Produktifitas	8.041.065.534	
18	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM	5.103.539.835	
19	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5.746.080.400	Dispar
20	Pengembangan Ekonomi Kreatif	1.550.997.404	
21	Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	3.649.831.746	
22	Pengembangan Destinasi Dan Daya Tarik Pariwisata	1.025.000.000	
23	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil	1.114.508.200	DKP
24	Pengembangan Ekonomi Maritim	5.182.776.598	
25	Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan	6.057.372.000	
26	Peningkatan Sarana dan Prasarana	183.673.900	
27	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	13.800.000	
28	Peningkatan Produksi Dan Produktifitas	1.648.588.820	
29	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM	3.435.026.230	
30	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.083.841.300	Diskop UKM
31	Peningkatan Dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	1.036.036.550	
32	Peningkatan Dan Pengembangan Daya Saing UMKM	3.749.147.265	
I	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	2.329.079.135	
1	Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	616.057.456	DPM PTSP
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	1.713.021.679	
J	Meningkatnya Nilai Ekspor	575.288.131	
1	Peningkatan Dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	575.288.131	Disperindag
K	Menurunnya tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	73.068.083.914	
1	Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3.160.000	Dinas Sosial
2	Pembinaan Anak Terlantar	8.141.573.000	
3	Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas Dan Eks Trauma	3.349.048.946	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
4	Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar	3.475.648.156	Dinas Sosial
5	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila,	1.061.474.756	
6	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	150.271.500	
7	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah	37.510.544.900	
8	Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	277.619.154	
9	Pemberdayaan Fakir Miskin	5.663.245.648	
10	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	672.129.900	Biro Bintal
11	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	380.000.000	DPMD
12	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari	4.655.164.053	
13	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Diversifikasi Usaha	93.149.239	
14	Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3.278.864.100	
15	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari	358.110.950	
16	Penganggulangan Kemiskinan	183.000.000	
17	Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.541.031.562	Disnakertrans
18	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Diverifikasi Usaha	175.992.800	
19	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	333.941.300	
20	Perlindungan Tenaga Kerja Dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja	523.910.000	
21	Percepatan Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan	240.203.950	
L	Meningkatnya Konektivitas dan aksesibilitas Wilayah	338.235.383.051	
1	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Provinsi	42.673.814.816	Dinas PUPR
2	Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi	126.046.032.140	
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Binamargaan	1.092.718.300	
4	Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis	160.829.254.184	
5	Peningkatan Dan Pengembangan Jasa Konstruksi	526.000.000	
6	Perencanaan Penataan Ruang	1.168.826.750	
7	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	175.000.000	
8	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perkerataapian	298.982.726	Dishub
9	Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	310.594.350	
10	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut	643.323.335	
11	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	92.164.000	
12	Peningkatan Pelayanan Angkutan	3.446.609.852	
13	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	932.062.598	
M	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur EKTU	1.958.724.957	
1	Pembinaan Dan Pengembangan Ketenagalistrikan	1.202.804.607	D. ESDM
2	Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Energi	166.900.050	
3	Pengelolaan Mineral Dan Batubara	497.550.500	
4	Perencanaan Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral	91.469.800	
N	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	61.649.161.107	
1	Peningkatan Dan Pengembangan Jasa Konstruksi	572.869.310	D.PSDA
2	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan	36.934.998.481	
3	Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku	1.514.122.900	
4	Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai	21.945.640.288	
5	Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Air	681.530.128	
O	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.721.569.436	
1	Pengembangan Perumahan	149.713.246	D. Perumahan Rakyat, Perkim & Pertanahan
2	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	2.987.439.400	
3	Pengelolaan Pertanahan	291.576.550	
4	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota	258.245.400	Dinas PU PR
5	Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi	607.476.140	
6	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.229.704.200	
7	Pengelolaan, Pengembangan Dan Konservasi Air Tanah	197.414.500	D.ESDM
P	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.131.097.174	
1	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.122.887.375	DLH
2	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	825.516.799	
3	Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan	111.423.000	
4	Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam	880.494.800	
5	Pentaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan	128.347.200	
6	Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan	62.428.000	
Q	Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan	10.789.765.744	
1	Perlindungan Dan Konservasi Sumberdaya Alam	945.491.394	Dishut
2	Pengendalian Kebakaran Hutan	3.006.970.700	
3	Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	4.270.891.000	
4	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	1.433.102.300	
5	Perhutanan Sosial dan Kemitraan	1.031.780.600	
6	Pemantapan Kawasan Hutan	60.151.250	
7	Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan	41.378.500	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
R	Menurunnya Risiko Bencana	12.122.062.162	
	1 Peningkatan Mitigasi Bencana	802.489.840	BPBD
	2 Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	5.123.902.393	
	3 Pemulihan Daerah Pasca Bencana	1.691.863.097	
	4 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebencanaan	4.103.806.832	
	5 Penanganan Tanggap Darurat Bencana	400.000.000	
TOTAL ANGGARAN BELANJA URUSAN		1.924.919.765.042	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO